

**KAJIAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN PENGELOLAAN DANA DESA
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP)**

TESIS

Oleh:
MOH. FARHAN
NIM : 16800024



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**KAJIAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN PENGELOLAAN DANA DESA
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP)**

TESIS

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Magister Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh:

MOH FARHAN

NIM 16800024

PEMBIMBING

Dr. Indah Yuliana, SE., MM
NIP. 19740918 200312 2 004

DR. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si
NIP. 19670227 199803 2 001

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : MOH FARHAN

Nim : 16800024

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : KAJIAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP).

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana diatas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I



Dr. Indah Yuliana, SE., MM
NIP. 19740918 200312 2 004

Pembimbing II



DR. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si
NIP. 19670227 199803 2 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP. 19730719 200501 1 003

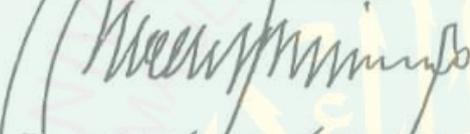
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul **Kajian Efektifitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)** ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 19 Juni 2019.

Dewan Penguji


Eko Suprawitno, S.E., M.Si, Ph.D
NIP: 19750109 199903 1 003

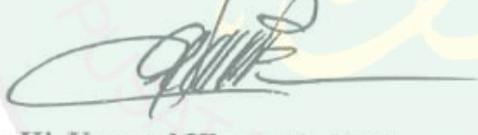
Ketua


Dr. H. Salim Al Idrus, M.M, M.Ag
NIP: 19620115 199803 1 001

Penguji Utama


Dr. Indah Yuliana, SE., MM
NIP: 19740918 200312 2 004

Pembimbing I


Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si
NIP: 19670227 199803 2 001

Pembimbing II

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. Hj. Omi Sumbulah, M.Ag
NIP: 19520710826 199803 2 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOH FARHAN**
NIM : **16800024**
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul/penelitian : Kajian Efektifitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 10 Juni 2019

Hormat saya



MOH FARHAN
16800024

PERSEMBAHAN

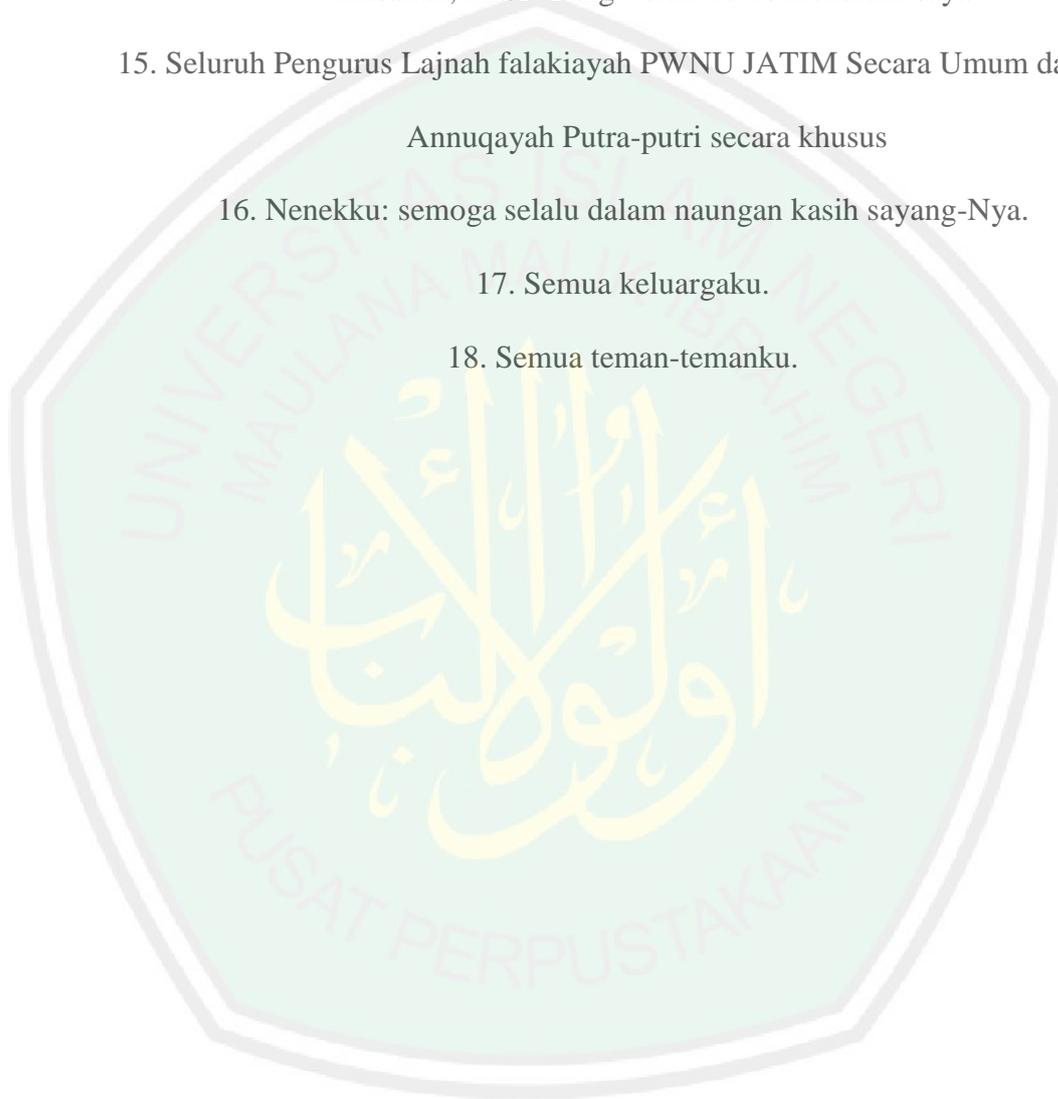
Bismillahi ta'ala..

Puji syukur atas nikmat dan rahmatNya.

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak A. Qurdi bin H. Syafie dan Ibu Ulfah binti H. Nur Ruddin tercinta yang tiada henti berusaha, memotivasi dan mendoakan putranya untuk terus berproses lebih baik, cinta tak terhingaku...
2. Adik kandung saya, Ubaidillah. Teruslah Berproses, hingga lebih baik dan lebih tinggi dari saya. Janganlah merasa tidak bisa, apapun itu akan saya lakukan untuk bahagia dan cita-citamu.
3. Kedua Mertua tercinta Semoga dalam lindungannya.
4. Calon Istri saya Nur Aini, M.Pd. yang semoga segera Allah halalkan dan jodohkan hingga ke Syurga-Nya.
5. Seluruh Keluarga saya, yang telah mendoakan mensupport hingga detik ini
6. Dan keluarga saya yang telah lebih dulu di panggil oleh Allah, Semoga Allah mengampuni dosanya dan ditempatkan di SyurgaNya.
7. Seluruh pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah khususnya Daerah Latee.
8. Seluruh pengasuh Pondok Pesantren Hidayatut-Thalibin
9. Seluruh Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Dadaprejo Batu Malang.
10. Seluruh Guru-guru saya dari Alif samapi sekarang
11. Seluruh Dosen Uin Maulana Malik Ibrahim Malang

12. Seluruh Dosen Pascasarjana Uin Malang
13. Bapak Kaprodi Ekonomi Syariah Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
14. Pembimbing Saya Dr. Indah Yuliana, SE., MM. dan Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si. Yang Telah Tulus mendidik saya
15. Seluruh Pengurus Lajnah falakiyah PWNU JATIM Secara Umum dan LF Annuqayah Putra-putri secara khusus
16. Nenekku: semoga selalu dalam naungan kasih sayang-Nya.
17. Semua keluargaku.
18. Semua teman-temanku.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صل و سلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله
وصحبه اجمعين. اما بعد.

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada hadirat Allah SWT. Yang telah memberikan *rahmat* beserta *Taufiq*-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat selesai. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kehadiran Nabi Muhammad SAW. serta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penelitian tesis yang berjudul **“Kajian Efektifitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)”**, ditulis dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai syarat memperoleh gelar magister Ekonomi Syariah (ME).

Selain itu, penelitian ini tidak akan terselesaikan tepat waktu tanpa peran andil dari beberapa pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu dan bapak tercinta.
2. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Mulyadi, M.Pd.I, selaku direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA., selaku ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Dr. Indah Yuliana, SE., MM., dan Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si, selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas waktu, kesabaran dan ketelatenan telah berkenan membimbing, mengarahkan serta memberi support demi terselesaikannya penulisan tesis ini.
6. Kedua orang tua peneliti, Bapak & Ibu peneliti yang senantiasa menyemangati, memotivasi, mendampingi dan tiada henti mendoakan peneliti dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Dan Teruntuk Calon Istriku Nur Aini, M.Pd Yang Telah setia mendampingi sampai rampungnya Tesis ini, Semoga Allah Selalu Menyertainya. *Aamien*
8. Segenap dosen pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. yang telah mengajar dan mendidik penulis.
9. Keluarga besar magister Ekonomi Syariah kelas B angkatan 2016, yang telah menjadi keluarga, sahabat dan teman berbagi ilmu.
10. Pengasuh PPA. Latee Sekeluarga Pengasuh PP. Hidayatut Thalibin dan PP.Darul Falah Sekeluarga. Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat, tahfiq, hidayah dan ma'unahNya kepada kita semua. *Aamiin*.
11. Ibnu Hajar, S.Sy.,M.E (dosen INSTIKA yang telah membantu mengarahkan peneliti), semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT. *Aamiin*
12. Dan Seluruh Keluargaku Semoga dalam Lindunganya
13. Teman dan adik-adik tersayang kontrakan “baity jannaty” yang selalu mensupport peneliti dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, walaupun penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin menyajikan yang terbaik. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk selanjutnya agar lebih baik.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Malang 10 Juni 2019

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.

2. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	DI
ب	=	B	ط	T}
ت	=	T	ظ	D} d} pilih salah satu shob
ث	=	Ts	ع	(' koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	Gh
ح	=	H}	ف	F
خ	=	Kh	ق	Q
د	=	D	ك	K
ذ	=	Dh	ل	L
ر	=	R	م	M
ز	=	Z	ن	N
س	=	S	و	W
ش	=	Sy	ه	H
ي	=	S}	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau diakhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (´), berbalik dengan koma (˘), untuk pengganti lambang “ع”

3. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *d}ammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vocal (a) panjang=	a>	misalnya	Menjadi	قال	qa>la
Vocal (i) panjang=	i>	misalnya	Menjadi	قيل	qi>la
Vocal (u) panjang=	u>	misalnya	Menjadi	دون	du>na

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	او	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlan
Diftong (ay)	اي	misalnya	خير	menjadi	Khayrun

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan Ujian Tesis	iii
Lembar Pengesahan Ujian Tesis	iv
Lembar Pernyataan.....	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	viii
Pedoman Transliterasi Arab Latin	xi
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel	xix
Daftar gambar.....	xxi
Daftar Bagan	xxii
Daftar Lampiran	xxiii
Motto	xxiv
Abstrak	xxv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Orisinalitas Penelitian	16
F. Definisi Istilah.....	24

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekonomi Islam.....	29
a. Pengertian Ekonomi.....	29
b. Ekonomi Menurut Islam.....	30
c. Pengembangan Ekonomi Perspektif Islam	30

B. Dana Desa	33
a. Pengertian Desa.....	33
b. Pemerintah Desa	37
c. Dasar-Dasar Pembangunan Desa.....	39
d. Pengertian Dana Desa.....	41
e. Ketentuan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN	43
f. Tinjauan Dana Desa.....	45
C. Efektifitas Pengelolaan Pengembangan Ekonomi Desa	51
a. Pengertian Efektifitas.....	51
b. Ukuran Efektifitas	56
c. Tinjauan Tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Desa	59
d. Pengertian Pengelolaan.....	61
e. Asas Pengelolaan Dana Desa.....	71
f. Pengembangan Ekonomi Desa	73
D. Kerangka Berpikir.....	74

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	77
B. Kehadiran Peneliti	79
C. Lokasi Penelitian	79
D. Sumber dan Jenis Data	79
E. Teknik Pengumpulan Data	81
F. Analisis Data	84
G. Pengecekan Data	86
H. Tahap-Tahap Penelitian	86

BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data 14 Desa di Kecamatan Pragaan	88
1. Profil Desa sendang.....	88
a. Sejarah Desa (DD) Sendang.....	88
b. Dana Desa Sendang.....	92
2. Profil Desa Rombasan.....	95
a. Sejarah Desa.....	95
b. Dana Desa (DD) Rombasan.....	98
3. Profil Desa Sentol Laok	101
a. Sejarah Desa.....	101
b. Dana Desa (DD) Sentol Laok	106
4. Profil Desa Sentol Daya	107
a. Sejarah Desa	107
b. Dana Desa (DD) Sentol Daya	110
5. Profil Desa Pakamban Daya	118
a. Kondisi Geografis Desa	118
b. Dana Desa (DD) Pakamban Daya.....	120
6. Profil Desa Pakamban Laok.....	120
a. Sejarah Desa.....	120
b. Dana Desa (DD) Pakamban laok	124
7. Profil Desa Pragaan Laok.....	142
a. Sejarah Desa	142
b. Dana Desa (DD) Pragaan Laok	146
8. Profil Desa Pragaan Daya	147
a. Sejarah Desa	147
b. Dana Desa (DD) Pragaan Daya	151
9. Profil Desa Prenduan	159
a. Sejarah Desa	159
b. Dana Desa (DD) Prenduan	162
10. Profil Desa Aeng Panas	175
a. Sejarah Desa.....	175

b. Dana Desa (DD) Aeng Panas.....	177
11. Profil Desa Larangan Perreng	190
a. Idenditas Desa	190
b. Dana Desa (DD) Larangan Perreng	191
12. Profil Desa Jaddung	192
13. Profil Desa Kaduarah Timur	192
a. Idenditas Desa Kaduarah Timur	192
b. Dana Desa (DD) Kaduarah Timur	193
14. Profil Desa Karduluk	197
a. Sejarah Desa	197
b. Dana Desa (DD) Karduluk	198
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian di Kecamatan Pragaan	204
1. Pengelolaan DD di Desa Sendang	204
2. Pengelolaan DD di Desa Rombasan	209
3. Pengelolaan DD di Desa Sentol Laok	211
4. Pengelolaan DD di Desa Sentol Daya	213
5. Pengelolaan DD di Desa Pakamban Daya	215
6. Pengelolaan DD di Desa Pakamban Laok	217
7. Pengelolaan DD di Desa Pragaan Laok	219
8. Pengelolaan DD di Desa Larangan Perreng.....	221
9. Pengelolaan DD di Desa Kaduarah Timur.....	223
10. Pengelolaan DD di Desa Pragaan Daya.....	225
11. Pengelolaan DD di Desa Prenduan	227
12. Pengelolaan DD di Desa Jaddung.....	228
13. Pengelolaan DD di Desa Aeng Panas	228
14. Pengelolaan DD di Desa Karduluk	230
1. Efektifits Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan ekonomi Desa Sendang	233
2. Efektifits Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan ekonomi Desa Rombasan.....	235

3. Efektifits Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan ekonomi Desa Sentol Laok	236
4. Efektifits Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan ekonomi Desa Sentol Daya	238
5. Efektifits Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan ekonomi Desa Pakamban Daya	240
6. Efektifits Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan ekonomi Desa Pakamban Laok	241
7. Efektifits Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan ekonomi Desa Pragaan Laok.....	243
8. Efektifits Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan ekonomi Desa Larangan Perreng	244
9. Efektifits Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan ekonomi Desa Jaddung.....	246
10. Efektifits Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan ekonomi Desa Kaduarah Timur	246
11. Efektifits Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan ekonomi Desa Pragaan Daya	247
12. Efektifits Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan ekonomi Desa Prenduan.....	249
13. Efektifits Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan ekonomi Desa Aeng Panas.....	251
14. Efektifits Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan ekonomi Desa Karduluk.....	253

BAB V: PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Penggunaan Dana Desa	255
2. Analisis Efektifitas Penggunaan Dana desa dalam Pengembangan Ekonomi.....	270

BAB VI: PENUTUP

A. SIMPULAN 285
B. SARAN286

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran



DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin.....	5
2.	Tabel 1.2 Jumlah Dan Presentase Penduduk Miskin	8
3.	Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin.....	9
4.	Tabel 1.4 Perhitungan L.Q Kabupaten Sumenep.....	12
5.	Tabel 1.5 Perbandingan Ekonomi.....	13
6.	Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	27
7.	Tabel 3.1 Perencanaan Pelaksanaan Observasi	61
8.	Tabel 3.2 Topik Wawancara	62
9.	Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	90
10.	Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Struktur Usia	92
11.	Tabel 4.3 Anggaran Dana Desa Sendang	93
12.	Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	98
13.	Tabel 4.5 Anggaran Dana Desa Rombasan	98
14.	Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin	106
15.	Tabel 4.7 Anggaran Dana Desa Sentol Laok.....	106
16.	Tabel 4.8 Jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	108
17.	Tabel 4.9 Anggaran Dana Desa Sentol Daya	110
18.	Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	120
19.	Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	123
20.	Tabel 4.12 Anggaran Dana Desa Pakamban Laok	124
21.	Tabel 4.13 Jumlah Penduduk Berdasarakan Jenis Kelamin	145
22.	Tabel 4.14 Anggaran Dana Desa Pragaan laok	146

23. Tabel 4.15 Jumlah penduduk Berdasarkan Usia	150
24. Tabel 4.16 Anggaran Dana Desa Pragaan Daya	151
25. Tabel 4.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	161
26. Tabel 4.18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin	161
27. Tabel 4.19 Anggaran Dana Desa Prenduan	162
28. Tabel 4.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	177
29. Tabel 4.21 Anggaran Dana Desa Aeng Panas	177
30. Tabel 4.22 Anggaran Dana Desa Larangan Perreng	191
31. Tabel 4.23 Anggaran Dana Desa Kaduarah Timur	193
32. Tabel 4.24 Jumlah penduduk berdasarkan jenis Kelamin	198
33. Tabel 4.25 Anggaran Dana Desa Karduluk	198
34. Tabel 5.1 Peningkatan Jumlah Dana Desa dalam Pertahun	27
35. Tabel 5.2 Dana Desa di Kecamatan Pragaan Kab.Sumenep 2018.....	270

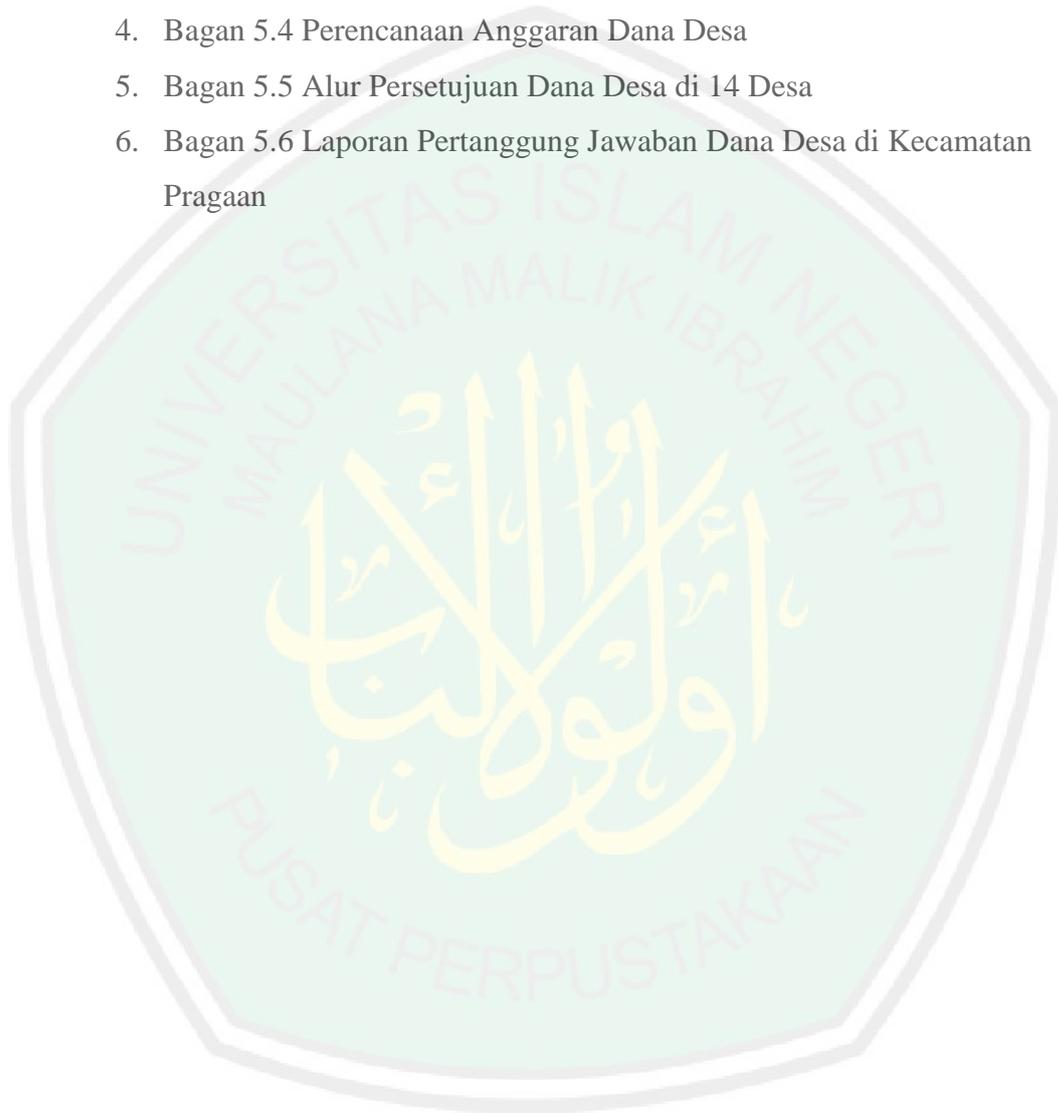
DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Grafik
2. Gambar 1.2 Peta Tematik
3. Gambar 2.1 kerangka berfikir
4. Gambar 4.1 Foto Fisik Sendang
5. Gambar 4.2 Foto Paving sendang
6. Gambar 4.3 Foto Usaha Lele



DAFTAR BAGAN

1. Bagan 5.1 Alur Pendapatan Desa
2. Bagan 5.2 Tahap Perencanaan Dana Desa di 14 Desa Kecamatan Pragaan
3. Bagan 5.3 Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di 14 Desa
4. Bagan 5.4 Perencanaan Anggaran Dana Desa
5. Bagan 5.5 Alur Persetujuan Dana Desa di 14 Desa
6. Bagan 5.6 Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa di Kecamatan Pragaan



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman dokumentasi
2. Lampiran-lampiran (dokumentasi)



MOTTO

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Mujadalah (58): 11)

ABSTRAK

FARHAN, MOH. 2019, *Kajian Efektifitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep). Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Dr. Indah Yuliana, SE.,MM., (II) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si.

Kata Kunci: Pengembangan Ekonomi Perspektif Islam, Dana Desa.

Mengingat Dana Desa (DD) yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan sebaik mungkin. Yang mana dalam pelaksanaan program pembangunan desa dengan dana desa juga harus melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kemajuan desa yang dikelola dengan dana desa. Demi terciptanya desa mandiri maka peningkatan potensi ekonomi desa yang berbasis masyarakat harus dimunculkan. Dalam peningkatan ekonomi desa maka diperlukan pelibatan masyarakat sekitar terutama dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan sebagai proses mengambangkan, kemandirian, dan menswadayakan. Berdasarkan latar belakang masalah yang kami urai di atas, maka pembahasan yang ingin dibahas adalah pengelolaan penggunaan dana desa di kecamatan pragaan dan analisis efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi. Dengan tujuan untuk memahami pengelolaan dana desa dan menganalisis efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi.

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan *interview*, dan menggantinya melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan dekritif analitis.

Hasil penelitian ini anggaran yang bersumber dari APBN yang bernama Dana Desa (DD) harus dimaksimalkan dalam rangka pembangunan desa untuk menjadi lebih baik. Pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang sesuai dengan harapan penerima manfaat pembangunan desa, lebih-lebih dalam pengembangan ekonomi Desa. Dengan itu hasil rumusan masalahnya adalah (1) Pengelolaan penggunaan Dana Desa adalah kegiatan yang *didesain* untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan akan mendapatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. (2) Analisis efektifitas penggunaan dana desa dalam Pengembangan Ekonomi adalah suatu keberhasilan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi, sehingga masyarakat dapat merasakan keberhasilan perencanaan pengelolaan dana desa terhadap pengembangan ekonomi desa; Pengembangan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

FARHAN, MOH. 2019, *The Study of Effectiveness in The Use of Village Funds management within Economic Development of Islamic Economic Perspectives (Case Study in Pragaan District, Sumenep Regency)*. Thesis, Master of Islamic Economic Department, Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. Supervisors: (1) Dr. Indah Yuliana, SE.,MM., (II) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si.

Key Words: Economic Development of Islamic Perspective, Village Funds.

Retracing to the village funds (DD) provided are so large, it should be managed as well as possible. In the implementation of village project and village funds also should involve the communities, so the communities know the progress of their village which is managed by using village funds. For the sake of an independent village creation, the community-based economic potential of the village must be raised. In improving the village economy, it is necessary to involve the community surrounding especially in prioritising the village development or empowerment of village communities. Empowerment is as a process of development, independence and self-reliance. Based on the background of the problem above, this study will discuss about the management in the use of village funds in Pragaan subdistrict and analysis of the effectiveness in the use of village funds in economic development. This study aims to understand the management of village funds and analyse the effectiveness in the use of village funds in economic development.

This study is field research by using a qualitative approach. While the data collection techniques use observation and interview techniques and delve through primary data sources and secondary data sources. After collecting the data, it will be analyzed by using inductive method and descriptive analysis.

The result of this study is budgets for APBN namely village funds (DD) should be maximized for the project of village to be better. The effective development is the establishment in accordance with the expectation of beneficiaries of village project, especially in the development of village economy. The result of the problem are (1) Management of the village fund used is an activity which is designed for village project and community empowerment. In hopes of getting prosperity and village development. (2) Analysis of effectiveness in the use of village funds in Economic Development is a success for community empowerment in economic development so the community can feel the success of village fund management planning for village economic development; Economic development or community empowerment.

مستخلص البحث

محمد فرحان. 2019، دراسة فعالية استخدام إدارة منحة القرية في تنمية الاقتصاد في ضوء الاقتصاد الإسلامي (دراسة الحالة في ناحية براكثان منطقة سومنب) رسالة الماجستير، قسم الاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة الأولى: د. إنداح يوليانا الماجستير، المشرفة الثانية: د. عمرة الحسنة الماجستير الحاجة.

الكلمات المفتاحية: تنمية الإقتصاد في ضوء الإسلام، منحة القرية.

كما يعرف بأن منحة القرية التي أعطيت بجملة كثيرة، فلا بد أن يديرها بجيد الذي يستخدمها في تنمية القرية وبنائها لازم بمشاركة المجتمع حتى يشعرون تقدم القرية التي يديرها بمنحة القرية. ولوجود القرية المستقل أو القائمة بذاتها فيحتاج إلى تنمية الاحتمال في الاقتصاد على أساس المجتمع لازم أن يبدواها. ولتنميتها، يحتاج إلى مشاركة المجتمع خاصة في بناء القرية وحفاظها. وحفاظ القرية هو إجراء التنمية والمستقلة والمساعدة. ولهذا خلفية البحث، سيبحث عن إدارة استخدام منحة القرية في ناحية براكثان وتحليل فعالية استخدام منحة القرية في ناحية براكثان. وراختار الباحث باستخدام بحث الميدانية وباستخدام المدخل الكيفي، ويستخدم الباحث في أسلوب جمع البيانات بالملاحظة والمقابلة. ويصدرها بمصادر البيانات الرئيسي ومصادر البيانات الثانوية. ويحللها الباحث باستخدام طريقة الحثي والوصفي.

(يعني منحة القرية لا APBN ونتائج البحث يبين بأن الموازنة التي صدرت من مؤسسة الموازنة البنائية البلدية) بد ليكملها في بناء القرية لتكون القرية أجيد. والبناء الفعال هو البناء المطابق برجاء قابل منافع بناء القرية، خاصة في اقتصاد القرية. ولذا، النتائج من الأسئلة البحث هي: (1). إدارة استخدام منحة القرية هي الأنشطة التي تصممها لبناء القرية وحفاظ المجتمع. برجاء لنيل المصلحة القرية وتسوية بنائها. (2). تحليل فعالية استخدام منحة القرية في تنمية الاقتصاد هي الانجازات إلى حفاظ المجتمع وتنمية الاقتصاد. حتى يحصل المجتمع أن يشعروا انجازات إدارة منحة القرية إلى تنمية اقتصاد القرية؛ تنمية اقتصاد وحفاظ المجتمع.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan di tingkat Desa sudah sejak lama digulirkan dengan adanya bantuan dari pemerintah yaitu dengan alokasi Dana Desa yang diambil dari 10% Dana APBD, sejak terbitnya Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa maka pembangunan Desa bisa dilakukan dengan Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa ini maka setiap Desa wajib melakukan pembangunan Desa, terutama dalam bidang pengembangan potensi ekonomi lokal.¹

Mengingat Dana yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan sebaik mungkin. Yang mana dalam pelaksanaan program pembangunan Desa dengan Dana Desa juga harus melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kemajuan Desa yang dikelola dengan Dana Desa. Demi terciptanya Desa mandiri maka peningkatan potensi ekonomi Desa yang berbasis masyarakat harus di munculkan. Dalam peningkatan ekonomi Desa maka diperlukan pelibatan masyarakat sekitar terutama dalam pembangunan Desa maupun pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan Desa yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan bagian dari Dana perimbangan

¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Pasal 5.

keungan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat Desa.

Adapun Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan Desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah Desa serta pemberian Dana pembangunan infrastruktur peDesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah Desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap Desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Dana Desa (DD).

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-keuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Arah Pemberdayaan Masyarakat Desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah yang memang mempunyai kebijakan pembangunan

yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dalam alokasi Dana anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa.

Pembangunan Desa harus mengedepankan kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan Desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan Desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Sedangkan tujuan dari pemberian Dana Desa di setiap Desa adalah untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Desa agar lebih mandiri dari sebelumnya sehingga masyarakat di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah peDesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangatlah efektif guna untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Potensi ekonomi saat ini sangat menjadi incaran suatu daerah untuk dapat membangun dan membangkitkan partisipatif masyarakat. Dukungan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi di masyarakat Desa pun sudah diwujudkan dalam implementasinya hal ini terkait dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang merupakan desentralisasi birokrasi yang mengalami perubahan yang cukup baik agar kebijakan-kebijakannya yang di buat akan cepat tersalurkan dan akan membantu mengurangi masalah masalah yang ada.

Adapun letak geografis pulau Madura terletak ditimur laut pulau Jawa, kurang lebih 7° sebelah selatan dari katulistiwa diantara 112° dan 114° bujur timur. Pulau ini dipisahkan dari Jawa oleh selat Madura yang menghubungkan laut Jawa dengan laut Bali. Moncongnya dibarat laut, karena bentuknya disebut corong dangkal dan lebarnya tidak lebih dari beberapa mil laut. Sejak zaman dahulu kala corongnya merupakan suatu daerah pelabuhan penting.² Panjang pulau Madura kurang lebih 190 km yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.³

Madura dikenal sebagai wilayah yang kaya akan Sumber daya Alam dan kebudayaannya, kekayaan Alam di Pulau Madura meliputi Garam, Tembakau, Jagung dan Padi. Rata-rata pencaharian Masyarakat Madura

² Huub De Jonge, *Seri Terjemah MADURA dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan, Ekonomi, dan Islam*, (Jakarta:PT. Gramedia, 1989) Hlm. 3-4.

³ DR. A. Latief Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: LKIS, 2002) hlm. 37.

adalah Petani. sedangkan budaya yang terdapat di madura dibangun dari berbagai unsur baik dari pengaruh Animisme, Hinduisme dan Islam. Madura memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan masyarakat lainnya (masyarakat di luar pulau madura) Tradisi dan kebudayaan yang ada di Madura diantaranya Muang Sangkal, Kerapan Sapi, dan Mamacah (Rokat Tase’).

Sedangkan Tingkat daya saing ekonomi di kabupaten Sumenep dapat dilihat dari beberapa hal. Setidaknya, terdapat tiga hal untuk dapat menilai tingkat daya saing ekonomi suatu daerah, yaitu pengamatan potensi sektor yang dapat diekspor keluar daerahnya, perbandingan besaran DPRB dalam lingkup provinsi. Berikut ini adalah proyeksi PDRB kabupaten Sumenep di tahun 2021 dengan menggunakan basis data 2016

Tabel 1.4
Perhitungan LQ Kabupaten Sumenep

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,87	2,86	2,75	2,62	2,60	2,73	2,85	2,75
Pertambangan dan Penggalian	4,50	4,46	5,18	6,36	6,64	5,94	5,14	5,46
Industri Pengolahan	0,1	0,1	0,1	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17
Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,0	0,1	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,48	0,47	0,48	0,45	0,46	0,47	0,47	0,47
Konstruksi	0,7	0,7	0,7	0,64	0,64	0,67	0,69	0,68
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,56	0,59	0,58	0,56	0,57	0,60	0,62	0,58
Transportasi dan Pergudangan	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13

Informasi dan Komunikasi	0,8	0,8	0,8	0,81	0,86	0,90	0,95	0,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,6	0,6	0,6	0,63	0,64	0,68	0,71	0,67
Real Estate	0,5	0,5	0,5	0,51	0,51	0,55	0,57	0,54
Jasa Perusahaan	0,2	0,2	0,2	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,3 8	1,3 8	1,3 6	1,27	1,27	1,28	1,31	1,32
Jasa Pendidikan	0,8	0,8	0,8	0,79	0,81	0,86	0,90	0,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,5 4	0,5 2	0,5 1	0,48	0,48	0,51	0,53	0,51
Jasa Lainnya	0,4 5	0,4 6	0,4 5	0,43	0,43	0,45	0,47	0,45

Sumber : Data PDRB Ekonomi Tahun 2016 Kabupaten Sumenep⁴

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kabupaten Sumenep memiliki 3 sektor basis, yaitu pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata pada setiap lapangan usaha yang lebih dari 1 ($LQ > 1$) menunjukkan bahwa daerah tersebut secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ke daerah lain sekaligus dapat memenuhi kebutuhan daerah mereka sendiri.

Dalam perbandingannya dengan sektor Nasional, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kabupaten Sumenep memiliki daya saing yang tidak kalah dibanding Nasional.

Sedangkan perbandingan dengan tingkat Madura dalam konteks Pulau Madura, ada beberapa aspek yang menjadi acuan daya saing Kabupaten Sumenep dibidang ekonomi. Nilai PDRB, Proyeksi PDRB

⁴ Buku 1 Masterplan Smart City Kabupaten Sumenep, Hlm. 32

kedepannya, dan Nilai LQ merupakan pertimbangan untuk menentukan posisi Kabupaten Sumenep diantara tiga Kabupaten.

Untuk Lebih Jelasnya bisa lihat tabel di bawah ini :

Tabel 1.5
Perbandingan Ekonomi Berdasarkan LQ di Pulau Madura

Uraian	<i>LQ (Location Quotient)</i>				Posisi Sumenep
	Sampang	Bangkalan	Pamekasan	Sumenep	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,49	1,03	1,49	1,64	1
Pertambangan dan Penggalian	1,63	0,69	0,08	0,57	3
Industri Pengolahan	0,40	0,75	2,12	1,73	2
Pengadaan Listrik dan Gas	0,43	1,50	2,03	1,14	3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,53	1,56	1,88	0,99	3
Konstruksi	0,46	1,79	1,68	1,03	3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,53	1,35	2,01	1,10	3
Transportasi dan Pergudangan	0,37	1,49	1,96	1,28	3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26	2,00	1,26	1,39	2
Informasi dan Komunikasi	0,44	1,28	1,85	1,38	2
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,36	1,35	1,55	1,59	1
Real Estate	0,50	1,23	2,22	1,14	3
Jasa Perusahaan	0,52	1,21	2,35	1,07	3

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,48	1,53	2,16	0,96	3
Jasa Pendidikan	0,44	1,55	1,97	1,11	3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,53	1,11	2,36	1,11	2
Jasa lainnya	0,53	1,20	2,02	1,20	3
TOTAL	39.620	17.619	10.309	22.949	2

Sumber : Data PDRB Tahun 2017 dalam Kabupaten Dalam Angka⁵

Berdasarkan tabel diatas, Sumenep memiliki nilai total PDRB Migas tertinggi kedua setelah Kabupaten Sampang di Pulau Madura, namun apabila untuk non migas, kabupaten Sumenep berada diposisi tertinggi pertama se Pulau Madura. Nilai total PDRB tersebut didominasi pada sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kemudian disusul sektor pertambangan dan penggalian. Dari kedua sektor tersebut kabupaten Sumenep unggul dari sisi nilai PDRB dibanding 3 lainnya.

Selain itu, dari sisi LQ kabupaten Sumenep unggul dalam 2 sektor dibanding 3 lainnya, yaitu pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor jasa keuangan dan asuransi. Juga bisa dilihat dari cakupan dan orientasi pasar, kabupaten Sumenep memiliki nilai positif dibanding kabupaten lainnya yang ada di pulau Madura. Yaitu ada beberapa komoditas sumenep seperti garam, batik hingga keris seringkali wilayah ekspornya bisa di tingkat pasar Internasional.

⁵ Buku 1 Masterplan Smart City Kabupaten Sumenep, Hlm. 34

Berdasarkan gambaran tentang kabupaten Sumenep diatas, kabupaten Sumenep pada dasarnya bisa memiliki daya saing yang sangat baik pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Selain terkenal sebagai penghasil komoditas Jagung Sumenep juga dengan fakta topografi jenis tanahnya yang sangat mendukung untuk kegiatan pertanian.

Pada dasarnya, pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perDesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan.⁶

Dalam Penelitian ini, Peneliti memilih Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, karena dari sektor Pendidikan, kecamatan Pragaan mempunyai pendidikan dari tingkat RA/TK sampai Perguruan tinggi, yang tersebar disetiap Desa bahkan setiap dusun.

Selain kecamatan yang dalam fase berkembang untuk sektor pendidikan, kecamatan merupakan salah satu penghasil garam terbaik di Kabupaten. Sementara untuk pelayanan kesehatan, kecamatan Pragaan satu-satunya kecamatan yang mempunyai rumah sakit swasta.

Adapun lokasi Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep adalah berada di jalan raya provinsi Pamekasan Sumenep, kabupaten paling timur di pulau Madura. Sedangkan letak Kecamatan Pragaan berada pada paling

⁶ Chandra Kusuma Putra dkk. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No 6.

barat kecamatan yang ada di kabupaten Sumenep, berjarak sekitar 30 km dari kota Sumenep, berbatasan dengan Kecamatan kaduarah barat, Kabupaten Pamekasan.

Secara geografis, kecamatan Pragaan berada di antara 6°00'-7°30' dengan ketinggian \pm 117 meter dari permukaan laut, luas kecamatan Pragaan yang memiliki lahan seluas 6.691.316 ha. Wilayah yang cukup luas ini ternyata tidak memberikan harapan penghidupan masyarakat Pragaan karena susunan tanahnya, sebagaimana daerah madura lainnya cenderung terdiri dari batu-batu berkapur (lime store rock) dan sebagian besar tanahnya berjenis mediteran. Sedangkan curah hujan rata-rata pertahunnya 2176 mm dengan jumlah harainya kurang lebih 1000 hari per tahun.

Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep Mempunya 14 Desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 66.632 jiwa dari 14 Desa. Adapun rincianya adalah sebagai berikut :⁷

⁷ Dokumentasi Gambar ADD Kecamatan Pragaan, di ambil pada Tanggal 07 Maret 2019.

Tabel. 1.5.
Nama Desa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

NO	DESA
01	KADUARA TIMUR
02	SENDANG
03	ROMBASAN
04	SENTOL LAOK
05	SENTOL DAYA
06	LARANGAN PERRENG
07	SENTOL DAYA
08	PAKAMBAN LAOK
09	JADDUNG
10	PRAGAAN LAOK
11	PRAGAAN DAYA
12	PRENDUAN
13	AENG PANAS
14	KARDULUK

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Di kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, dan untuk Mengetahui dan menganalisa Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa di 14 Desa tersebut.

Program Dana Desa (DD) merupakan sebuah program yang dijalankan dengan baik akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang; pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya di sebuah Desa di setiap kabupaten di Indonesia, khususnya di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemerintah Desa dan juga masyarakat. Dengan

harapan Dana Desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan ekonomi.

Untuk lebih jelasnya ADD dan DD masing-masing Desa di kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep bisa dilihat di tabel berikut:

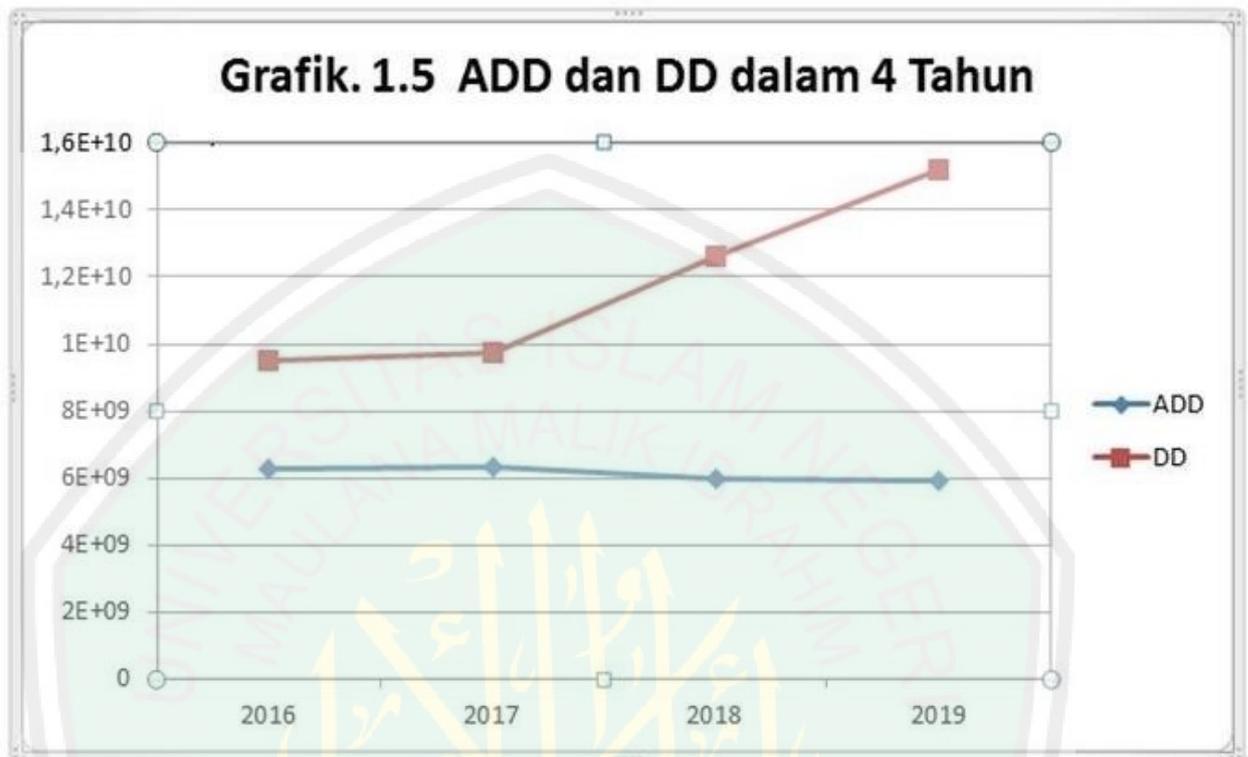
Tabel 1.5
Sumber dan Alokasi Dana Desa di kecamatan Pragaan tahun 2018

NO	DESA	ADD	DD	JUMLAH
1	Kaduara Timur	Rp. 382.921.011	Rp. 813.513.000	Rp. 1.196.434.011
2	Sendang	Rp.304.962.545	Rp. 716.239.000	Rp. 1.021.201.545
3	Rombasan	Rp. 290.652.455	Rp. 698.383.000	Rp. 989.035.455
4	Sentol Laok	Rp. 304.292.095	Rp. 715.403.000	Rp. 1.019.695.095
5	Larangan Perreng	Rp. 400.307.193	Rp. 993.380.000	Rp. 1.393.687.193
6	Sentol Daya	Rp. 499.055.756	Rp. 1.115.972.000	Rp. 1.615.027.756
7	Pakamban Daya	Rp. 357.615.463	Rp. 939.487.000	Rp.1.297.102.463
8	Pakamban Laok	Rp. 430.595.010	Rp. 873.001.000	Rp. 1.303.597.010
9	Jaddung	Rp. 563.244.244	Rp. 1.038.516.000	Rp. 1.601.760.224
10	Pragaan Laok	Rp. 487.009.859	Rp. 943.393.000	Rp. 1.430.402.859
11	Pragaan Daya	Rp. 597.681.154	Rp. 1.081.485.000	Rp1.679.166.154
12	Prenduan	Rp. 417.186.099	Rp. 856.268.00	Rp. 1.273.454.099
13	Aeng Panas	Rp. 377.153.216	Rp. 806.317.000	Rp. 1.183.470.216
14	Karduluk	Rp. 567.861.981	Rp. 1.044.277.00	Rp .1.612.138.981
	JUMLAH	Rp. 5.980.539.089	Rp. 12.635.634.000	Rp. 18.861.617.311

Sumber : Dokumentasi Kasi DD dan ADD di kecamatan Pragaan⁸

⁸ Dokumentasi Kasi DD dan ADD di Kecamatan Pragaan di ambil pada tanggal 07 Maret 2019.

Grafik 1.2 ADD dan DD dalam 4 Tahun



Sumber: Dokumentasi Kasi ADD dan DD Kecamatan Pragaan, 24 Maret 2019.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan selain digunakan untuk pembuatan pagar kantor Desa, rehap gedung kantor Desa, pelatihan, gaji perangkat Desa dan kepala Desa, tunjangan BPD pembuatan batas dusun, dan pembelian perlengkapan kantor Desa, juga digunakan untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi (pembangunan infrastruktur, BUMDes). Sehingga dengan adanya program tersebut secara tidak langsung akan menambah pendapatan bagi masyarakat di Kecamatan Pragaan.⁹

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang seperti yang diteliti

⁹ Wawancara Darussalam Selaku Bapak Camat Kecamatan Pragaan (Tanggal 14 Maret 2019) Pukul 9:45 WIB.

oleh Yudhistira Harisandi yang berjudul, “*Analisis pengaruh BUMDes dalam meningkatkan ekonomi pedesaan di kabupaten Subondo*”. Maksudnya adalah dalam meningkatkan ekonomi pedesaan dengan cara BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) lebih berperan dari Desa sendiri tidak pada masyarakatnya juga. Dengan begitu maka perlu ekonomi Desa itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam penggunaan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti lebih jauh dalam memahami pengelolaan penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pragaan terhadap perkembangan perekonomian di masing-masing Desa. Oleh karenanya, judul Tesis, “**Kajian Efektifitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)**”. sangat menarik untuk diteliti, dengan harapan akan ada inovasi baru bagi pemerintah dan masyarakat serta dapat memberikan kontribusi positif bagi lembaga pemerintahan dalam meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pragaan?

2. Bagaimana Analisis efektifitas penggunaan Dana Desa dalam pengembangan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami Pengelolaan penggunaan Dana Desa di kecamatan Pragaan.
2. Untuk menganalisa Efektifitas penggunaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Penggunaan Dana Desa (DD) juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat menDesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pembedayaan masyarakat Desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

- a) Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
- b) Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga
- c) Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa.

Peneliti berharap dalam penelitian ini memiliki nilai manfaat, karena seyogyanya sebuah nilai yang ada dalam sebuah penelitian akan dijadikan acuan di penelitian selanjutnya. Manfaat-manfaat itu adalah :

1. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan Membuka wawasan Bagi Peneliti bagi Pembaca pada umumnya.
- b) Sebagai sumbangan untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

2. Manfaat Teoritis

- a) Dapat dijadikan Petunjuk Seputar Penggunaan Dana Desa dalam pengembangan Ekonomi.
- b) Mengetahui bagaimana peran alokasi Dana Desa (DD) dalam pengembangan ekonomi

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Tesis ini mengangkat tema, “Kajian Efektifitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)”. Berdasarkan Penelitian terdahulu yang menguraikan dan menjelaskan letak perbedaan bidang kajian yang diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya, Hal ini ditujukan agar bisa menghindari pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama dengan begitu dapat memperoleh pembaruan.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 1.1 ORISINALITAS PENELITIAN

NO	NAMA PENELITI, JUDUL & TAHUN PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
01	Lina Naatun Nafidhasi <i>“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”</i> . 2015	Untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah Desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis.	Menggunakan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aloksi Dana Desa sangat berperan penting terhadap Akuntabilitas.
02	Yudhistira Harisandi, Muhammad Iqbal Anshory <i>“Analisis Pengaruh Bumdes Dalam Meningkatkan Ekonomi PeDesaan Di Kabupaten Situbondo”</i> . Tahun 2010	Untuk meningkatkan ekonomi peDesaan dengan menggunakan Bumdes	Menggunakan Kuantitatif	Hailnya Pengelolaan Dana Desa salah satunya untuk Bumdes Pembahasan Alokasi Dana Desa ini lebih pada BUMDes
03	Yuliana Musin <i>“Evaluasi Pengelolaan Dana</i>	Untuk membangun ekonomi masyarakat dengan alokasi Dana Desa	Menggunakan Kualitatif	Dapat mengetahui dari hasil pengelolaan Terhadap Penggunaan Dana Desa

	<i>Alokasi Desa (Dad) Dalam Percepatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Konawe</i> . Tahun 2017			
04	Rini Listiyani <i>“Effectiveness Implementation Used Of Village Fund For Fiscal Year 2015 Policy In Gunungpring Village, Muntilan District, Magelang District”</i> . Tahun 15	Untuk menambah pendapat masyarakat dengan cara ADD dengan pelaksanaan yang matang.	Menggunakan Kuantitatif.	Hasilnya kebijakan dan implementasi dalam penggunaan Dana Desa.
05	Ahmad Mustanir, Darmiah. <i>“Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang”</i> . Tahun 2016	Untuk mendapatkan kebijakan kebijakan yang benar-benar dapat menyentuh kepada masyarakat sekitar.	Menggunakan Kualitatif.	Hasil penelitian yang tanggapan responden tentang sumber daya (Dana dan tenaga) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat keterpaduan antara pelaku pembangunan terhadap partisipasi masyarakat.
06	M. Ridwan Tikollah <i>“Analisis Pengelolaan Alokasi</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,	Sama-sama membahas tentang penggunaan Dana	Perbedaannya lebih pada implementasinya

	<i>Dana Desa (Add) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone</i> . Tahun 2018	pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	Desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan keuangan ADD	
07	Lina Nasehatun Nafidah <i>"Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang"</i> . Tahun 2017	Mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan	Sama-sama tentang pengelolaan keuangan	Tidak pada penerapan penggunaan keuangan Dana Desa dan keuangnya
08	Dwi Febri Arifiyanto <i>"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember"</i> . Tahun 2014	Penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk di masing-masing Desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Sama-sama Akuntabilitisa alokasi Dana Desa	Perbedaanya lebih pada terapan dan salah satu Desa saja
09	Aswar	Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, kurang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sehingga berdampak kepada rendahnya partisipasi dari masyarakat mengikuti kegiatan perumusan program.	Sama-sama membahas tentang kebijakan Dana Desa dan persamaanya ada pada implementasinya	Lebih pada implementasinya tidak pada kebijakanya dan pelaksanaanya . sehingg sangat tidak efektif

	<p><i>“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala”.</i></p> <p>Tahun 2019</p>			
10	<p>Deni Kurniadi Sunjaya</p> <p><i>“Analisis Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Malinau Dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan”.</i></p> <p>Tahun 2017</p>	<p>Kebijakan Dana Desa untuk pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau dari aspek konten, konteks, proses dan aktor. Tidak hanya itu Tidak adanya regulasi dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembangunan kesehatan di Desa menyebabkan ketimpangan pembangunan kesehatan.</p>	<p>Sama-sama kebijakan tentang penggunaan Dana Desa tapi lebih pada kesehatan atau puskesmas.</p>	<p>Tidak adanya koordinasi yang efektif sehingga penggunaan Dana Desa terlanjur sehingga sangat tak efektif.</p>
11	<p>Feiby Vencentia Tangkumahat</p> <p><i>“Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”.</i></p> <p>Tahun 2017</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan program Dana Desa di Kecamatan Pineleng berjalan cukup baik, namun untuk kedepannya diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan skill dari aparat pemerintah Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program ini guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.</p>	<p>Sama-sama peningkatan pembangunan dalam penggunaan Dana Desa.</p>	<p>Lebih pada dampak pembangunan.</p>
12	<p>Gunawan Arif Wibowo</p> <p><i>“Evaluasi Pengelolaan Alokasi</i></p>	<p>Hasil musrenbang dalam menetapkan pembangunan sarana dan prasarana Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta</p>	<p>Sama-sama penggunaan Dana Desa dan lebih</p>	<p>Perbedaannya ada pada alokasi Dana Desa pada penggunaan Dana Desa sarana dan</p>

	<p><i>Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)</i>”.</p> <p>Tahun 2017</p>	<p>masih adanya budaya paternalistik.</p>	<p>pada pengelolaanya.</p>	<p>prasarana.</p>
13	<p>Coristya Berlian RamaDana, Heru Ribawanto, Suwondo</p> <p><i>“KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”</i>.</p> <p>Tahun 2016</p>	<p>Hasil penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik Desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh Desa dengan peraturan Desa mengenai badan usaha milik Desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan Desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik Desa ini hanya sebatas papan nama saja.</p>	<p>Dalam pembahasan ini Penguatan Dana Desa lebih pad BUMDes.</p>	<p>Penggunaan Dana Desa tidak tercairkan untuk BUMDes.</p>
14	<p>Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie</p> <p><i>“PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi pada Desa Deket Kulon</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi Dana Desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala</p>	<p>Sama-sama pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan Masyarakat.</p>	<p>Aparat Desa masih belum aktif semaksimal mungkin sehingga tidak dapat menerapkan dengan efektif.</p>

	<i>Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)</i> ”.	Desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi Dana Desa tersebut		
	Tahun 2016			
15	Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said “ <i>PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)</i> ”.	Terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yakni: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pertanggungjawaban atau pelaporan.	Sama-sama pengelolaan Dana Desa tapi lebih pad pemberdayaan.	Tidak memberikan penerapan yang maksimal dalam pemberdayaan.

Dari penelitian yang di tulis oleh peneliti terdahulu ada perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti saat ini yaitu lebih pada Alokasi Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Serta pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya monoton pada kebijakan alokasi Dana Desa saja, tetapi juga mengungkap fungsi dari Alokasi Dana Desa tersebut dalam pengembangan ekonomi Masyarakat, sehingga dalam penelitian ini peneliti memilih judul, “*Kajian Efektifitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep).*”

F. Definisi Istilah

1. Efektifitas

Menurut Bungkaes¹⁰ efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektifitas” Bagaimanapun definisi efektifitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektifitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya : (1). Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan; (2). Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal). Sedangkan menurut Menurut Ravianto Masruri¹¹ pengertian efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Sedangkan menurut pakar Budiani¹² mengungkapkan efektifitas adalah

¹⁰ Bungkaes H,R, J. H. Posumah Burhanuddin kyai Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Acta Diurna*, vol. - (-) : 1-23 2013.

¹¹ Masruri. Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (*Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010*). *Governance and Public Policy*, vol. 1 (1): 2004

¹² Budiani, Ni Wayan. *Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. *Input*, vol. 2 (1) : 49-57. 2009

kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektifitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki.

2. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari APBN yang penyalurnya melalui kas desa. Dana desa (DD) adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten¹³. Sedangkan dan desa menurut saibani¹⁴Dana Desa adlah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kotadan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, dan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarkatan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat mensejahterkan rakyat

3. Efektifitas Dana Desa

Efektifitas dana desa seperti yang di ungkapkan pakar duncan¹⁵ adalah , dalam penelitian ini efektivitas pada Kajian Efektifitas

¹³ PENGERTIAN DANA DESA [http:// astadi77.blogspot.co.id/2016/04/makalah-alokasi-dana-desa-html/diakses_pada_tanggal16_Juli_2019](http://astadi77.blogspot.co.id/2016/04/makalah-alokasi-dana-desa-html/diakses_pada_tanggal16_Juli_2019)

¹⁴ A Saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Media Pustaka.2014), h. 4

¹⁵ Duncan. *Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ilmu Sosial, 110.* (2015)<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/7849/7413> Di akses 14 juli 2019.

Penggunaan dana desa dalam pengembangan Ekonomi dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan atau ketepatan penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Begupun juga dengan pakar sedarmawati¹⁶ mengungkapkan bahwa efektivitas dana desa merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.

4. Pengembangan

Pengembangan berasal dari kata kembang/*kem.bang/* menjadi berkembang */ber.kem.bang/* mekar terbuka, yang kemudian mengembang */me.ngem.bang/* berkembang, mengembangkan */me.ngem.bang.kan/* membuka lebar-lebar, memperkembangkan */mem.per.kem.bang.kan/* menjadikan lebih berekmbang, perkembangan */per.kem.bang.an/* prihal berekmbang, pengembang */pen.gem.bang/* orang yang mengembangkan serta pengembangan */pe.ngem.bang.an/* yang memiliki arti proses. Sedangkan Ekonomi adalah proses cara berfikir dan bertindak dalam hal keekonomian yang berlandasan pada asas islam atau maqasyid syariah¹⁷

5. Pengembangan Ekomomi

Twelvetrees dalam bukunya Zubaedi luluhatta¹⁸ mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat adalah *“The process of assisting ordinary*

¹⁶ Sedarmayanti. Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju (2009).

¹⁷ KBBI Online di akses pada tangga 15 Juli 2019

¹⁸ Zubaidi Luluhatta, *“Pengembangan Masyarakat”* Online ada pada laman <https://luluhatta.wordpress.com/2014/10/13/pengembangan-masyarakat-community-development/> yang diakses pada 20 Mei 201

people the improve their own communities by undertaking collective action". Sedangkan menurut United Nation, Pengembangan Ekonomi masyarakat di Desa adalah suatu proses yang di*Desain* untuk menciptakan kondisi ekonomi dan kemajuan sosial untuk komunitas yang berhubungan dengan partisipasi aktif dan untuk memnuhi kemungkinan kepercayaan atas inisiatif komunitas di Desa.

Secara umum Ayub M. Padangaran¹⁹, mengungkapkan Pengembangan ekonomi masyarakat di Desa diartikan sebagai sebuah upaya untuk memperluas atau meningkatkan, atau mengubah potensi-potensi ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat ke suatau keadaan sebelumnya.

6. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi islam menurut pakar zaki fuad Challi²⁰ mengungkapkan persepektif ekonomi Islam merupakan ajaran universal bukan hanya berbicara tentang ibadah secara vertical kepada Allah SWT. melainkan juga berbicara tentang semua aspek kehidupan termasuk ekonomi di dalamnya. Ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. kemudian dikenal dengan istilah Ekonomi Islam. Sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, tetapi pada prakteknya untuk hal-hal yang

¹⁹ Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari : Unhalu Press, 2011), h. 29.

²⁰ Zaki Fuad. Chalil,. *Pemerataan Distribusi Kekeyaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2009

situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan bisa mengalami perubahan



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.²¹ Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.²²

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur- unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 854

²² M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 3.

tertentu.²³

b. Ekonomi Menurut Islam

Menurut M. Akram Khan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Khan ini memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam). Ilmu ekonomi Islam adalah Ilmu normatif karena ia terikat oleh norma-norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam. Ia juga merupakan ilmu positif karena dalam beberapa hal, telah menjadi masyarakat islam.²⁴

Menurut Kursyid ahmad bahawa ilmu ekonomi islam adalah sebuah usaha istematis untuk mamahami masalah-masalah dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif islam.²⁵ Ekonomi islam dapat juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur oleh islam dengan landasan Al-Quran dan Hadits.

c. Pengembangan Ekonomi Perspektif Islam

islam merupakan Agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas

²³ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers:2009), Hlm.2

²⁴ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 64.

²⁵ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 1-2.

sosial, tanpa implikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara sia-sia.²⁶

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Pengertian pemberdayaan masyarakat Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha.

Menurut Saefuddin nilai-nilai dasar Pengembangan ekonomi dibagi menjadi 3 yaitu :

1) Kepemilikan.

Pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut.

kepemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia dan bila orang itu mati harus didistribusikan

²⁶ Titis Istikomah, “ Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui *Entrepreneurship Capacity Building*, (ECB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Study Pada Kelompok TaniKecamatan Talang Padang), Skripsi Program Strata 1 IAIN Lampung, 2015), h. 45.

atau dialihkan kepemilikannya kepada ahli waris menurut ketentuan islam.

2) Keseimbangan

Pengaruh faktor keseimbangan terlihat pada berbagai praktek ekonomi Islam, misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Onsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usahanya diarahkan untuk di dunia dan diakhirat saja, tetapi berkaitan juga dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban harus direalisasikan.

3) Keadilan

Kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliaan dalam Islam, selain itu kata yang paling banyak disebut dalam Al- Qur'an setelah Allah dan ilmu pengetahuan, ialah keadilan. Baik yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Seorang ulama kontemporer yang bernama Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa, "Ruh sistem Islam merupakan pertengahan yang adil."²⁷

²⁷ Anwar Abbas "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumen" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Al-Iqtishad (Vol: IV. No 1 Januari 2012) h. 115-116

B. Dana Desa

a. Pengertian Desa

Istilah Desa berasal dari bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah Desa dan peDesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep perDesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan Desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa Desa. Definisi tentang Desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing²⁸

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

1. Desa Swadaya

Merupakan Desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisonal dan sangat terikat dengan adat

²⁸ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 226.

istiadat. Desa biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri Desa swadaya sebagai berikut:

- a) Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional).
- b) Adat istiadat masih mengikat kuat.
- c) Produksi Desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun.
- d) Pendidikan dan Keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
- e) Prasarana masih sangat kurang
- f) Kelembagaan Formal dan Informal kurang berfungsi dengan baik.
- g) Swadaya Masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan Desa menunggu intruksi dari atas.²⁹

2. Desa Swakarsa

Merupakan Desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan Desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata

²⁹ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah...*, hlm. 231.

pencapaian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri Desa swakarsa sebagai berikut :

- a. Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk Desa mulai merupakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
- b. Dalam Produksi Desa masih pada tingkat sedang tidak ada penambahan, yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.
- c. Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, adat 4-6 lembaga yang hidup.
- d. Fasilitas Keterampilan masyarakat dan pendidikanya pada tingkat sedang 30-6 %K telah lulus MI bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
- e. Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan Desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.³⁰

3. Desa Swasembada

Merupakan Desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan

³⁰ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*,.. Hlm-231-232.

sekunder lebih berkembang. Ciri-ciri Desaswasembada sebagai berikut :

- a. Mata pencaharian penduduk sebagian besar disektor jasa dan perdagangan.
- b. Produksi Desa tinggi dengan penghasilan usah diatas 100 juta rupiah pertahun.
- c. Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
- d. Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
- e. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
- f. Fasilitas Prasmanan mulai lengkap dan baik.
- g. Penduduk sudah mempunyai inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pengembangan Desa.³¹

Kemajuan Desa berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Desa yang dekat dengan kota akan memiliki kebiasaan, gaya hidup, tata nilai dan percepatan pembangunan yang berbeda dari Desa yang jaraknya jauh dari kota.

³¹ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, Hlm 232

b. Pemerintah Desa

Dalam UU RI Nomor 22 tahun 1999, Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentinagn masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Penegrtian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi.³² Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokarasi Desa sebagai berikut:

- a. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.
- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat di tuntutan dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala Desa mempunyai wewenang untuk

³² Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, Hlm 233.

melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

- d. Sebagai perwujudan demokrasi, diDesa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan keputusan kepala Desa.
- e. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.
- f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.
- g. Berdasarkan hak asal-usul Desa yang bersangkutan, kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.

Dalam batang tubuh UU RI Nomor 22 Tahun 1999 Desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah Desa yang memosisikan pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang

pemerintahan “birokrasi Desa”. Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini. Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat Desa akan menghasilkan kepala Desa sebagai pemimpin pemerintah Desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin Desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di Desa yang bersangkutan.³³

Susunan pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan di Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala Desa dan dibantu perangkat Desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah Desa.³⁴

c. Dasar-Dasar Pembangunan Desa

Pembangunan Desa dan pembangunan masyarakat Desa telah menjadi dua istilah yang sering di campuradukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat

³³ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, Hlm 234

³⁴ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, Hlm 237

Desa (*community development*) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan Desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.³⁵

Secara rinci Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan Desa meliputi:

- a. Tujuan ekonomi Meningkatkan produktivitas di daerah peDesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di peDesaan.
- b. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat peDesaan.
- c. Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk Desa.
- d. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat Desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.³⁶

Dari uraian tersebut jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitanya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, merupakan masalah yang sangat penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara

³⁵ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, Hlm 240.

³⁶ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, Hlm 242.

maksimal dalam usaha- usaha pembangunan dan memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan Desa dan pembangunan masyarakat Desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya didalam pembangunan Desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat Desa.

Pada dasarnya pembangunan peDesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spritual. berdasarkan pancasila didalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat peDesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, dan demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.³⁷

d. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adlah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di

³⁷ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*,,. Hlm 243.

transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kotadan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, dan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarlkatan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat mensejahterkan rakyat.³⁸

a) Sumber Dana Desa

Belanja Negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.³⁹ Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusatdan transfer kepada daerah.⁴⁰ Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu Dana otonomi khusus, Dana penyesuaian dan Dana perimbangan.

Berdasarkan pada pertauran pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan sirumuskan dalam pengalokasian Dana Desa menyatakan bahwa Dana Desa

³⁸ A Saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Media Pustaka.2014), h. 4

³⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

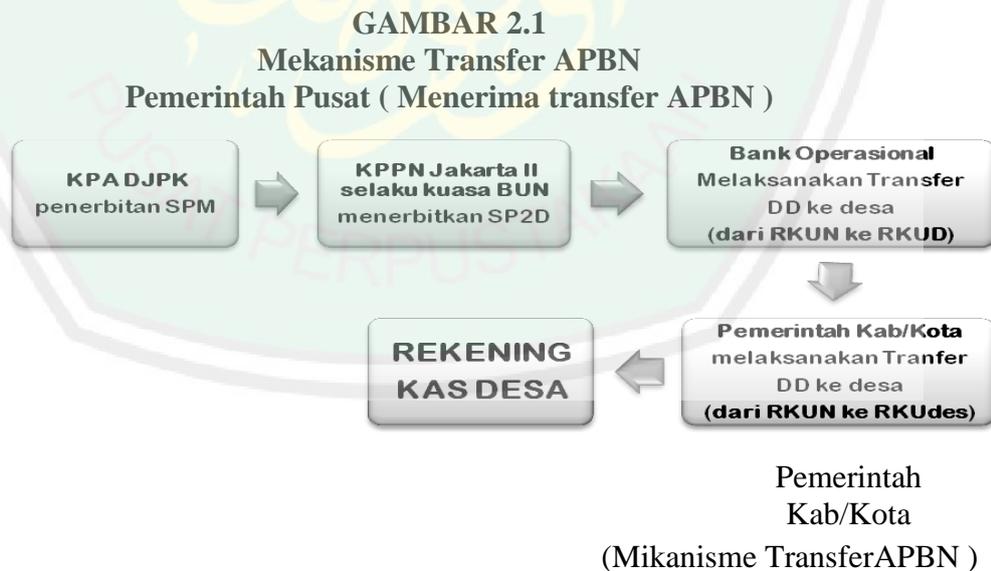
⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

- 1) Alokasi dasar.
- 2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.⁴¹

e. Ketentuan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari rekening kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas Desa, seperti yang terlihat dalam gambar berikut



⁴¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Adapun mekanisme pencairan Dana dan penyaluran alokasi Dana Desa:⁴²

- a) Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b) Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- d) Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan Dana dari kas daerah ke rekening Desa.
- e) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas Desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bendahara Desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dan sebelumnya.

⁴² A Saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,.. Hlm, 19.

- b. Sekertaris Desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - c. Bendahara Desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas Desa pada bank yang ditunjuk.
 - d. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara Desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.
- f. Tinjauan Dana Desa**⁴³

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya Desa yang mandiri dimana :

- a) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga

⁴³ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* Bandung: FOKUSMEDIA, 2015 h. 54.

masyarakat setempat.

- b) Sebagai komponen Desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d) Sebagai cita-cita jangka panjang, Desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli Desa dalam jumlah yang memadai.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni:

- 1) Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
- 2) Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan, dan kekayaan masyarakat, pemertaan pembangunan.
- 3) Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.⁴⁴

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerinah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan,

⁴⁴ Deddy Supriadi dan Dadang Sholihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 169.

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:⁴⁵

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- d) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
- e) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
- f) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g) Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa, semua kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Alokasi Dana Desa dipergunakan secara terara, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa sangat

⁴⁵ Chalib Sholeh , Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Hlm 62.

terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.⁴⁶

Penggunaan alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah Desa 30% alokasi Dana Desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah Desa dalam pembiayaan operasional Desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi Dana Desa. Sedangkan 70% Dana Desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi Desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat Desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat Desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di Desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, linmas.⁴⁷

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan

⁴⁶ Chalib Sholeh , Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Hlm 75.

⁴⁷ Chalib Sholeh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Hlm 75.

masyarakat Desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :

- a) Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes.
- b) Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu.
- c) Pengelolaan dan pembinaan pendidikan anak usia dini.

2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi.⁴⁸

- a) Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa.
- b) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
- c) Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa.
- d) Pembangunan energi baru dan tabarukan.
- e) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi dan lingkungan.
- f) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa.
- g) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
- h) Pengembangan sarana dan prasarana produksi Desa.

3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi

⁴⁸ Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya.⁴⁹

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan.⁵⁰

C. Efektifitas Pengelolaan Pengembangan Ekonomi Desa

a. Pengertian Efektifitas

Efektifitas adalah sebuah kosa kata Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris *Efective*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Efektifitas berarti dapat membawahasil berhasil guna.⁵¹

Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu

⁴⁹ Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

⁵⁰ Rosnawati, “*Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kab. Way Kanan Dalam Perspektif Islam*”, (Skripsi Pogram Strata 1 IAIN, Lampung, 2015), h. 3.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia., hal 374

perusahaan atau pencapaian tujuan.⁵²

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa efektifitas adalah program yang dijalankan berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Menurut Osborne dan Gaebler (1997), efisiensi adalah ukuran berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing unit *output*, sedangkan efektivitas adalah ukuran kualitas *output* itu. Ketika mengukur efisiensi, harus diketahui berapa banyak biaya yang harus ditanggung untuk mencapai suatu *output* tertentu. Ketika mengukur efektivitas harus diketahui apakah investasi tersebut dapat berguna. Efisiensi dan efektivitas merupakan hal penting, tetapi ketika organisasi publik mulai mengukur kinerja, seringkali hanya mengukur tingkat efisiensi saja.

Sedangkan Efektifitas Dana Desa adalah sebagian dari salah satu edintitas pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah dibawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.⁵³

Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat

⁵² Amin Tunggal Wijaya, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rineka Cipta Jaya, 199), hal 32

⁵³ J. Koho Riwu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Yogyakarta: Usaha Nasional, 1989) hlm. 212.

tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusanru mahtanggungnya sendiri.⁵⁴

Desa juga sebagai sebuah kesatuan masyarakat dengan berbagai macam variasi pola kehidupan maka perlu dikaji secara seksama rencana pembangunan supaya dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Dewasa ini pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka pembangunan di desa. Kemajuan negara harus dipahami dengan pembangunan manusia dan infrastruktur dari desa karena menyiapkan sumber daya manusia dari desa akan secara keseluruhan terberdayakan dengan optimal.

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk dana Inpres Bantuan Desa. Kebijakan ini menjadi kebijakan strategis dalam rangka membangun desa. Membangun dalam makna pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan masyarakat atau kelompok lemah lebih berdaya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lemah menjadi lebih baik. Dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan berpartisipasi dalam proses

⁵⁴ J. Koho Riwu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Yogyakarta: Usaha Nasional,1989) hlm. 212

pembangunan desa, sehingga mereka memiliki kebebasan, bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kemiskinan dan kebodohan. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak terlepas dari kekuasaan karena dalam kekuasaan ada *power*, sehingga ide Utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan atau pemerintah desa.⁵⁵

Selama ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa maka menjadi sebuah tanggung jawab besar pengelola dana desa untuk lebih teliti dalam pengelolaannya.

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa dalam otonomi daerah sangat penting, dimana pemerintah daerah dituntut untuk membangun daerahnya sendiri dengan partisipasi penuh masyarakat.

Pemerintah Indonesia maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pembangunan sepakat bahwa pembangunan pendesaan adalah sangat penting. Sejak masa Orde Baru melalui Pelita I sampai dengan sekarang pembangunan pendesaan telah dilaksanakan melalui pembangunan lembaga- lembaga pendesaan, pembangunan infrastruktur pendesaan serta kegiatan ekonomi sosial budaya. Pembangunan dilaksanakan dengan pola perencanaan dari pusat mengakibatkan tidak efektif hasil dari pembangunan serta kurang

⁵⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 58-59

memberi mafaat kepada masyarakat setempat.

Pemerintah desa berhak merencanakan pembangunan dari desa untuk kemajuan desa. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pembangunan pedesaan sebagaimana yang dimaksud disusun oleh pemerintah desa dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, pemerintah dan masyarakat desa berpartisipasi. ngan membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah dan masyarakat desa adalah dua pihak yang harus terlibat dalam pembangunan desa.

Pembangunan desa adalah impian seluruh masyarakat desa karena mempunyai dampak terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kemudian dapat memberi mamfaat secara berkesinambungan. Selama ini pembangunan banyak yang dilakukan secara mubazir tanpa tujuan yang jelas. Secara implisit dampak pembangunan harus berdampak kepada masyarakat meliputi dampak kepada pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berdampak kepada pembanguna infrastruktur yang tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang secara utuh dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Efektifitas sebuah pembangunan juga dinilai dari hasil

pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Berkelanjutan dengan maksud pembangunan yang dilakukan sesuai dengan partisipasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dari berbagai pihak dan yang terpenting kontribusi masyarakat loka.⁵⁶

Dalam meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dibutuhkan :

1. Kepemimpinan lokal yang aspiratif ke bawah dan berwawasan kedepan pada pembangunan yang berkelanjutan.
2. Sosialisasi, pendampingan, dan penguatan kelembagaan pedesaan.⁵⁷

Hal ini akan memberi dampak terhadap kualitas hidup masyarakat yang semakin lebih baik. Dana Desa selama ini yang lebih banyak difokuskan dalam bentuk fisik pada dasarnya melalui sebuah proses perencanaan yang matang yang disertai dengan partisipasi masyarakat sekitar. Didalam proses inilah masyarakat duduk bersama merumuskan apa yang menjadi program pembangunan dari dana desa yang didapatkan, partisipasi inilah yang menjadi salah satu titik awal keefektifan sebuah pembangunan bersama.

Pembangunan desa adalah “keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar

⁵⁶ Supriyatna, *Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, (Pustaka Utama, Yogyakarta: 1985) hal. 30

⁵⁷ Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan.....* hal 70

kesejahteraan dalam desa”⁵⁸ Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Inilah yang mewujudkan sebuah pembangunan yang ideal serta efektif dan dapat digunakan oleh masyarakat secara maksimal. Pembangunan tidak semata-mata hanya siap secara administrasi, akan tetapi dapat terukur dengan pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat setempat. Pembangunan dari dana desa yang efektif akan membantu pemerintah daerah serta pemerintah pusat dalam pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dana Desa yang efektif juga akan menumbuhkembangkan potensi ekonomi dalam masyarakat sekitar. Menumbuhkan sumber daya manusia yang mandiri secara ekonomi dan sosial, karena infrastruktur penunjang sudah ada dalam kebutuhan masyarakat.

b. Ukuran Efektifitas

Konsepsi terkait efektivitas menurut pendapat para ahli berbeda-

⁵⁸ Siagian Sondang. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. (Jakarta. Bumi Aksara: 2005) Hal. 108

beda dan beragam. Menurut Makmur⁵⁹ “efektivitas merupakan suatu ketepatan yang terjadi antara harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai”. Selanjutnya Liang Gie⁶⁰ berpendapat bahwa “Efektivitas merupakan suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang di kehendaki Ardila⁶¹. Pakar lainnya Steers,⁶² mengungkapkan pendapatnya bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tidak memberi tekanan yang terhadap pelaksanaannya”. Begitu juga dengan Sedarmayati,⁶³ yang menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang diberikan untuk menilai seberapa jauh/besar pencapaian target yang telah di tentukan sebelumnya dapat tercapai. Apabila persentase pencapaiannya tujuan semakin tinggi maka hal ini berarti bahwa semakin tinggi pula nilai efektivitasnya.

Terkait efektivitas, dalam penelitian ini efektivitas pada Kajian

⁵⁹ Makmur. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Rafika aditama 2015

⁶⁰ M. Lee. Policy And Rule Configutation : Korean Rural Develoment Movement Saemaul Undong. Bloomington, Indiana : Indiana University 1990

⁶¹ Ardila, Novi. Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Mensanak Kecamatan Senayan Kabupaten Lingga. *Jurnal Naskah Publik, 1-14*. http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/JURNAL-NOVI.pdf. Di akses pada 25 April 2019.

⁶² Steers, M. Richard. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. Sumpeno, 1985.

⁶³ Sedarmayanti. Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju (2009).

Efektifitas Penggunaan dana desa dalam pengembangan Ekonomi dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan atau ketepatan penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pendapat Duncan⁶⁴, untuk dapat mengetahui efektivitas dapat dilakukan dengan menilai atau mengukur hal-hal berikut Steers⁶⁵ :

1. Integritas, Yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
2. Adaptasi, merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.
3. Pencapaian tujuan, adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.

Berbeda dengan pendapat Duncan di atas, Makmur⁶⁶ berpendapat bahwa untuk dapat mengetahui efektivitas dari suatu pembangunan adalah dengan cara menilai komponen di bawah ini:

⁶⁴ Duncan. *Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ilmu Sosial, 110*. (2015) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/7849/74> Di akses 14 juli 2019.

⁶⁵ Steers, M. Richard.. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. Sumpeno,

⁶⁶ Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika aditama (2015).

1. Ketepatan Penentuan Waktu: Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya : hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program kegiatan tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran : hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketetapan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.

Sedangkan untuk pengkategorian tingkat efektifitas dapat dilihat dari pencapaian target dalam pelaksanaan suatu program pengembangan dan pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat supranto (2000), maka dalam penelitian ini dilakukan pengkategorian menjadi 5 kelas atau tingkatan yaitu “ sangat tidak efektif, tidak efektif , cukup efektif, efektif dan sangat efektif.

c. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Desa

Pembangunan menurut Alexander (1994) adalah “proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, infrastruktur, pertahanan, pengembangan ekonomi, pendidikan, dan teknologi,

kelembagaan, dan budaya” para pakar lain (Ginanjar kartasasmita, 1994) berpendapat bahwa pembangunan merupakan “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana” (Pasaribu, 2005 p.16). Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sondang P. Siagaan (2000) yang menyatakan “pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembiunaan bangsa (*nasional building*)” (Makmur, 2015, p.118). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan perubahan seluruh aspek kehidupan masyarakat menuju yang lebih baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang sedang dijalankan untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan konteks yang akan dikaji lebih lanjut maka dalam hal ini pelaksanaan pembangunan yang menjadi fokus adalah pembangunan yang bersifat fisik. Pembangunan fisik dalam hal ini seperti pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan pengembangan ekonomi desa, dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa dilakukan oleh seluruh aparatur desa

beserta masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Indikator keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat dari pencapaian yang dilakukan berdasarkan pada ketetapan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin besar Persentase pencapaian target dalam pelaksanaan pembangunan maka pembangun tersebut dapat dikatakan berhasil.

d. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses atau rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana desa dalam peraturan presiden No 60 tentang dana desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan

dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.⁶⁷

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen merupakan proses perencanan, pengorganisasian, organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa

⁶⁷ Thomas, *Pengelolaan Alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembagunan di desa sebwang kecamatan sesayap kebaupaten tanah Tidung*. 2013

manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007). Pengelolaan Dana Desa meliputi tiga kegiatan penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan.⁶⁸

Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah

⁶⁸ Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.

diverifikasi.⁶⁹

Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilakukan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat Musdus (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa (BPKP, 2015).

Musrenbangdes merupakan forum diskusi usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) (Kurrohman, 2015). Prinsip ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang.

Musrenbangdes ini adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (Pemdes), dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk

⁶⁹ BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. *Warta Pengawasan* Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519. 17 November 2016. www.bpkp.go.id.

menyepakati hal-hal yang strategis. Yang dimaksud hal-hal yang strategis di desa seperti penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Musrenbangdes diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.⁷⁰

Salah satu indikator keberhasilan Musrenbangdes adalah keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes. Semakin banyak dan semakin luas unsur masyarakat yang dilibatkan, maka legitimasi hasil Musrenbangdes menjadi semakin kuat dihadapan masyarakat. Karena itu, Musrenbangdes didesain untuk umum dan tidak bersifat rahasia. Setiap warga desa berhak untuk hadir sebagai peserta Musrenbangdes (Rozaki, 2015: 34-35). Namun dalam pelaksanaannya, terkadang musrenbangdes hanyalah pertemuan formalitas antara tokoh masyarakat, pemerintah dan dewan.⁷¹

Dalam Musrenbangdes akan dibahas pula mengenai pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). TPK merupakan tim yang dibentuk oleh pemerintah desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa. TPK terdiri dari dua unsur perangkat desa dan tiga unsur dari LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa). TPK memiliki tugas pokok yaitu menyusun

⁷⁰ (Rozaki, 2015: 11-30).

⁷¹ (Randa, 2015).

Rencana Anggaran Biaya (RAB), menetapkan spesifikasi barang dan jasa, menyimpan dokumen pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Desa disertai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Perbup Sukoharjo No. 5 Tahun 2016).

Kemudian setelah RKP Desa telah dibahas dan disepakati bersama, TPK menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. Kemudian Sekretaris Desa menyusun Rancangan APB Desa sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada BPD untuk membahas dan menyepakati bersama. RAPB Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

RAPB Desa yang telah disepakati bersama, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi RAPB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya RAPB Desa. Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa RAPB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka

Kepala Desa diberi waktu untuk menyempurnakan paling lama tujuh hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Berjalan (BPKP, 2015).

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musrenbangdes (Diansari, 2015).

Untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014). Kemudian dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan

jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota (BPKP, 2015).

Melalui SIMDA Desa, terdapat beberapa keuntungan yang dapat dicapai, antara lain: Aplikasi SIMDA Desa telah dibangun sesuai dengan regulasi yang berlaku, dapat mempermudah tata kelola keuangan desa, SIMDA Desa telah dibangun dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan aplikasi (*user friendly*), dengan menggunakan aplikasi tersebut maka secara otomatis sudah terdapat *built-in internal control* (Oktaresa, 2015: 19).

Semua pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Semua transaksi, baik pendapatan maupun belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban ini disampaikan setiap bulan kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa (Permendagri No. 113

Tahun 2014).

Penggunaan ADD dalam APB Desa digunakan paling banyak 30% untuk belanja Aparatur Desa dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD), dan paling banyak 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Langkah awal yang harus dilakukan pelaksana kegiatan setelah APB Desa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa (BPKP, 2015).

3. Pertanggung Jawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut (Permendagri No. 113 Tahun 2014):

- a) Laporan semestara realisasi pelaksanaan APB Desa

Laporan Semesteran ini terdiri dari Laporan Semester Pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Semester Akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari (DJBPD,2016)

- b) Laporan Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa bupati/walikota setiap akhir tahun.

Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Permendagri No. 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan (DJBPD, 2016).

- c) Laporan realisasi penggunaan dana desa

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli TA berjalan dan untuk

Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari TA berikutnya (BPKP, 2015)

e. Asas Pengelolaan Dana Desa

Fungsi dana desa atau yang biasa dikenal dengan istilah DD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dana desa yang diperuntukkan bagi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat harus diolah serta digunakan dengan baik dan tepat guna oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa.

Pada pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan desa dalam rangka mengimplementasikan dana desa yang ada harus sesuai dengan asas pengelolaan dana desa yang telah ditentukan. Berdasarkan Permendagri No.

113/2014, Bab II Pasal 2 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa harus sesuai asas pengelolaan yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.⁷² Asas pertama yaitu partisipatif yang artinya dalam proses pengelolaan anggaran serta pelaksanaan pembangunan di desa tidak hanya melibatkan kaum elit desa (pejabat pemerintah desa) tetapi juga harus melibatkan masyarakat lokal baik pemuda, perempuan, petani dan lain sebagainya untuk dapat

⁷² Kemendes. *Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat-Desa http://www.djpk.depkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/03/03.-Penggunaan-Dana_Desa_Kemendes.pdf. Di akses pada 07April 2019

menciptakan pembangunan yang tepat guna. Asas yang kedua yaitu Akuntabel artinya perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.⁷³

Ketiga yaitu Transparansi yang artinya keterbukaan, semua pihak dapat melihat keseluruhan informasi dari penggunaan anggaran. Hak untuk mengetahui.

tentang keuangan desa dengan adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Terakhir yaitu tertib dan disiplin anggaran yang artinya pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.⁷⁴

Berdasarkan penjabaran terkait asas pengelolaan dana desa di atas maka sudah seharusnya dalam implementasi kebijakan dana desa harus melibatkan asas tersebut sebagai wujud pengelolaan yang baik. Implementasi dana desa terkait pembangunan yang dilaksanakan di desa harus melibatkan asas pengelolaan karena dengan adanya partisipasi, akuntabel, transparansi, serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaannya kebijakan yang diterapkan akan lebih tepat guna. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang ditetapkan oleh desa harus dilakukan dengan mengadakan musyawarah

⁷³ BPKP. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. 1-55 (2015)

⁷⁴ Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Nonlaba*. Jakarta: Mitra Wacana Media 2013

desa, sehingga dalam hal ini partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam penentuan kebijakan pembangunan desa.⁷⁵

Lebih lanjut Kemendesa (2016) juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang harus ada dalam implementasi kebijakan di desa adalah sebagai pendamping dalam pembangunan desa dan pemantau ketepatan praktik penerapan program oleh pemerintah desa. Berdasarkan hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat lokal tidak dapat diabaikan partisipasinya dan tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan.

f. Pengembangan Ekonomi Desa

Twelvetrees dalam bukunya Zubaedi mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat adalah *“The process of assisting ordinary people the improve their own communities by undertaking collective action”*.⁷⁶ Sedangkan menurut United Nation, Pengembangan Ekonomi masyarakat di Desa adalah suatu proses yang diDesain untuk menciptakan kondisi ekonomi dan kemajuan sosial untuk komunitas yang berhubungan dengan partisipasi aktif dan untuk memnuhi kemungkinan kepercayaan atas inisiatif komunitas di Desa.⁷⁷

Secara umum, Pengembangan ekonomi masyarakat di Desa

⁷⁵ Kemendesa. *Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat-Desa http://www.djpk.depkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/03/03.-PenggunaanDanaDesa_Kemendes.pdf. Di akses pada 07 April 2019.

⁷⁶ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 5

⁷⁷ Luluhatta, *“Pengembangan Masyarakat”* Online ada pada laman <https://luluhatta.wordpress.com/2014/10/13/pengembangan-masyarakat-community-development/> yang diakses pada 20 Mei 2019.

diartikan sebagai sebuah upaya untuk memperluas, atau meningkatkan, atau mengubah potensi-potensi ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat ke suatu keadaan sebelumnya.⁷⁸

Berdasarkan pengertian diatas, pengembangan ekonomi masyarakat di Desa merupakan upaya meningkatkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh Desa. Adapun Pengembangan masyarakat mencakup aspek kuantitas, dan aspek kontinuitas serta meliputi dimensi cukup luas dan tatarannya yang bervariasi dari kognitif sampai kepada afektif. Dari itu ekonomi masyarakat sangat menentukan pada sebuah kesejahteraan rakyat. Karena ekonomi desa adalah sebuah ekonomi yang benar-benar harus dirubah keadanya pada ekonomi desa yang kekinian, guna untuk mengimbangi kehidupan digital yang terus mengalami perubahan yang begitu pesat. Jika tidak merubah keadaan maka akan terhimpit oleh kerasnya kehidupan yang sudah menggunakan digital. Maka perlu ekonomi desa beralih pada ekonomi desa 4.0

D. Kerangka Berpikir

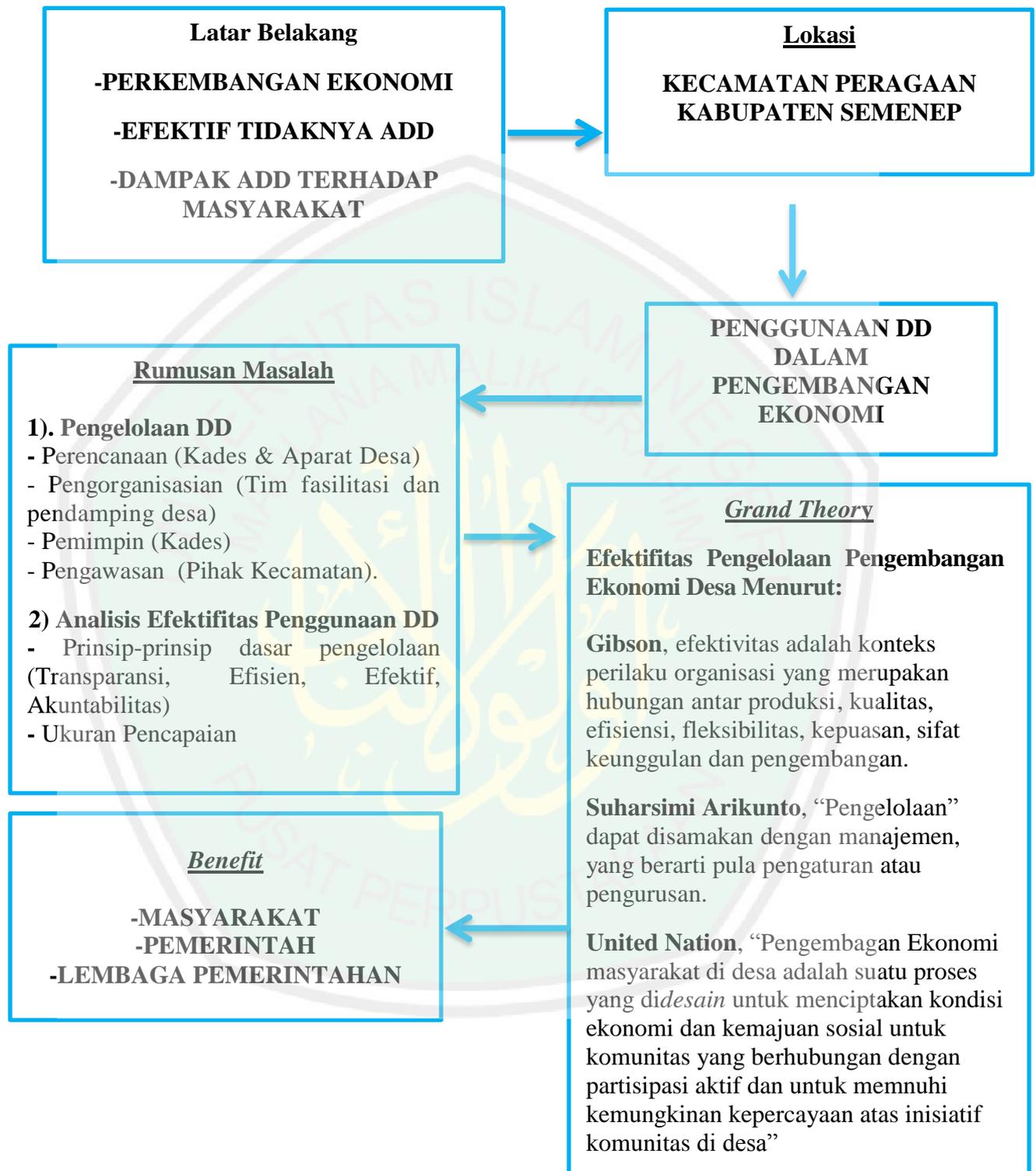
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana menggambarkan sebuah teori yang berhubungan dengan

⁷⁸ Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari : Unhalu Press, 2011), h. 29.

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang dianggap penting untuk diteliti.

Berikut adalah bagan kerangka berpikir dari penelitian ini:





Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dengan mendeskripsikan ke dalam bentuk perkataan yang memanfaatkan metode ilmiah.⁷⁹ Penelitian kualitatif deskriptif adalah bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan untuk diangkat sebagai situasi atau kondisi yang terjadi di lapangan.⁸⁰

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kasus karena dapat digunakan terutama untuk mengembangkan teori yang diangkat dari beberapa latar belakang penelitian yang serupa⁸¹, sehingga dapat dihasilkan teori yang dapat digunakan untuk alokasi Dana Desa dalam pengembangan ekonomi.

Sebagai penelitian Studi kasus seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen bahwa merupakan suatu bentuk rancangan penelitian yang digunakan terutama untuk mengembangkan teori yang diambil dari beberapa

⁷⁹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 33, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.6

⁸⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet 7, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm .69

⁸¹Rudi Hasan, Penyelenggaraan Program SD-SMP Satu Atap dalam Latar Budaya Rumah Betang Kalimantan Tengah, *Jurnal Ilmu Pendidikan* Jidil 19, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 02.

latar penelitian yang serupa, sehingga dapat menghasilkan teori dengan generalisasi yang lebih luas dan lebih umum.⁸² Objek penelitian dalam kualitatif adalah objek yang alamiah atau objek yang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Adapaun yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah : Efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi di desa kecamatan Pragaas kabupaten Sumenep yang dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu : waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi keefektivitasan suatu kegiatan dalam mencaai tujuan penggunaan dana desa.
2. Ketepatan perhitungan biaya : agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan anggaran samapi program tersebut selesai dilaksanakan di desa.
3. Ketepatan dalam pengukuran : hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu progam merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan penggunaan dana desa.

⁸²Dikutip M.miftahul Ulum, Pendidikan Islam dan Realitas Sosial (Studi Atas Kurikulum Pendidikan Islam MAN Model di Propinsi Jawa Timur), Desertasi Doktoral, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 39.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian yang menjadi keharusan turun langsung ke lapangan. Didalam penelitian kualitatif validitas dan reabilitas data kualitatif sangat tergantung pada kepekaan, metodologis, serta integrasi seorang peneliti.

Sebagai instrumen penelitian, peneliti bertindak sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis data, sekaligus melaporkan hasil dari penelitiannya sendiri. Oleh sebab itu, untuk keberhasilan dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus benar-benar mampu berkomunikasi dengan baik dengan objek penelitian, baik sebelum maupun saat terjun ke lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Pragaan Kabupaten sumenep dan 14 Desa yang ada di kecamatan Pragaan. (Jl. Raya Pamekasan Sumenep, Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep 69465).

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan

metode pengumpulan data.⁸³ Selain itu, jenis data juga dikelompokkan menjadi dua yakni:

1. Primer

Adalah data yang diperoleh sendiri oleh perorangan atau organisasi langsung melalui objeknya.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah semua pihak yang memiliki andil dan tahu persis didalam kegiatan pengembangan ekonomi di Desa, dalam hal ini ada (Bapak Camat, Kasi ADD, Kasi BUMDes Se kecamatan Pragaan, Kepala Desa. dan perekonomian)

2. Data Skunder

Adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.⁸⁴

Sumber data skunder adalah sumber data penunjang guna melengkapi dan mendukung data primer. Adapun yang menjadi penunjang terhadap penyelesaian tesis ini adalah anantara lain data-data yang terkait dengan kegiatan pengembangan ekonomi Desa, hasil wawancara, dokumentasi dan lain-lain.

⁸³ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm .77.

⁸⁴ M Aziz Firdausi, *Metodologi Penelitian*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), hlm. 28.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik observasi dapat digolongkan menurut teknik observasi yang berstruktur dan tidak berstruktur. Klasifikasi sedemikian juga terkenal dengan istilah lain, seperti observasi formil dan informil, sedangkan observasi informil juga terkenal dengan nama observasi partisipasi.⁸⁵

Terdapat dua jenis observasi yaitu

a. Observasi Partisipan

Dilakukan ketika peneliti ikut terlibat dalam kegiatan kelompok yang diamati dan diperlakukan sama dengan anggota kelompok lainnya, baik dengan atau tanpa sepengetahuan mereka bahwa mereka sedang diobservasi.

b. Observasi bukan Partisipan

Dilakukan ketika si peneliti tidak terlibat dalam kegiatan kelompok yang diamati, atau sebagai pengamat pasif, mengamati dan mendengarkan aktivitas yang terjadi dan menarik kesimpulan dari pengalaman tersebut.⁸⁶

⁸⁵ J. Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm.72.

⁸⁶ Abuzar Asra dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: InMedia, 2014), hlm. 106.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dibawah tabel ini :

Tabel 3.1
Perencanaan Pelaksanaan Observasi

NO	LANGKAH-LANGKAH	KEGIATAN
01	TAHAP 01	Peneliti turun lapangan dalam rangka perizinan penelitian.
02	Tahap 02	Peneliti mulai melakukan penelitian.
03	Tahap 03	Peneliti melakukan pensinkronan data dengan fakta lapangan.
04	Tahap 04	<i>Finishing</i> penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara penanya (*interviewer*) dengan yang memberikan jawaban (*interviewee*),⁸⁷ dalam rangka mencari tahu kebenaran data dan mengumpulkan data terkait dengan penelitian.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara diarahkan dengan sejumlah pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan cermat tetapi tidak menutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul dengan spontan sesuai konteks pembicaraan yang dilakukan.⁸⁸ Dalam tehnik wawancara ini, peneliti melakukan tahapan-tahapan berikut :

⁸⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 186.

⁸⁸ Maryaeni, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 70.

- a. Menetapkan informan
- b. Menyiapkan pokok pokok masalah sebagai bahan wawancara
- c. Melakukan wawancara
- d. Mengkonfirmasi kesimpulan hasil wawancara
- e. Menulis hasil wawancara
- f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Desain Wawancara

NO	INFORMAN	KONTEKS
01	Kepala Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentang Kecamatan secara umum 2. Tentang Ekonomi yang ada di Kec. Pragaan 3. Tentang Dana Desa di Kec. Pragaan
02	Kasi Dana Desa (DD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentang Dana Desa di 14 Desa 2. Tentang Pelaksanaan Dana Desa 3. Efektif tidaknya Dana Desa
03	Kepala Desa di 14 Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan Masyarakat 2. Dampak DD terhadap perekonomian Desa
04	Masyarakat Sekitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentang pelaksanaan kinerja aparat desa dalam dana desa. 2. Dampak pemberdayaan dana desa terhadap masyarakat.

3. Dokumentasi

Jika data-data berupa catatan saat observasi maupun wawancara disebut data primer, maka data-data dokumentasi dapat disebut data sekunder. Namun data sekunder berupa sumber tertulis

seperti buku, jurnal, tesis, disertasi dan lain-lainya. Data data dokumentasi tersebut dapat menjadi alat penjelas dan konfirmasi atas data-data yang didapat dari hasil observasi maupun wawancara.⁸⁹

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Dokumentasi Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi
01	Permohonan izin penelitian kepada badan KESBANGPOL	Kabupaten Kota Sumenep
02	Permohonan Izin kepada Camat Kec Pragaan Ke 14 Desa	Kec. Pragaan
03	Kegiatan Pengembangan ekonomi	Setiap Desa di 14 Desa
04	Kegiatan Wawancara	Informan Lapangan
05	Kegiatan pengumpulan data	Informan dan Balai Desa terkait

F. Analisi Data

Analisis data adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dihasilkan oleh data itu sendiri.

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman. Yaitu⁹⁰:

⁸⁹ Anis Fuad, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 19.

⁹⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm 129-133.

1. Reduksi Data : Menurut Sugiyono, “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁹¹ Reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul dari hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden tentang perencanaan pengembangan wisata syariah di kabupaten sumenep. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
2. Penyajian Data : Menurut Sugiyono “dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya”⁹²
3. Kesimpulan : Menurut Sugiyono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁹³

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 92

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*., hlm. 95.

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* , hlm. 99.

G. Pengecekan Data

Untuk mengetahui keabsahan peneliti yang diperoleh maka peneliti harus mengecek secara detail, teliti agar penelitian yang dilakukan tidak mengecewakan. Tehnik yang digunakan untuk dijadikan barometer atau pengukuran keabsahan data adalah sebagai berikut :

Triangulasi

Adalah pengecekan data dari menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan beberapa sumber data yang telah ada⁹⁴. Dengan demikian terdapat:

1. Triangulasi Sumber

Adalah menurut Patton yang dikutip oleh Lexy. J. Moleong adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.⁹⁵

2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.⁹⁶

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang di tempuh dalam penelitian ini di kategorikan menjadi 2 tahap.

1. Tahap Pra Lapangan

a) Menyusun rancangan penelitian

⁹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm 241.

⁹⁵Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm 330.

⁹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm 274.

- b) Memilih lapangan penelitian
 - c) Mengurus Perizinan
 - d) Menilai Keadaan lapangan
 - e) Memilih dan Memanfaatkan informan
 - f) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian
 - g) Mengantisipasi persoalan etika Penelitian
2. Tahap pekerjaan lapangan
- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - b. Memasuki lapangan

Berperan serta dalam mengumpulkan data dan tahap analisa data.⁹⁷

⁹⁷ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 241.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA 14 DESA DI KECAMATAN PRAGAAN

1. Profil Desa Sendang

a. Sejarah Desa (Mencakup Luas Daerah dan Jumlah Penduduk)

Secara histories, Desa Sendang Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep menurut para Sesepeuh Desa Sendang terdapat sebuah telaga Sendang (Pemandian) yang sumber airnya terletak di dalam pohon Siwalan dekat pohon Jambu Air yang besar.

Di situlah Jokotole dengan rombongannya berteduh dan mandi, setelah lelah dalam perjalanan dari Pamekasan ke Sumenep. Sendang (Telaga) tersebut merupakan potensi besar bagi penduduk sekitar, karena disamping sebagai air minum juga dibuat pengairan pada tanaman tembakau.

Pada tahun 1965 Sendang itu pernah direnovasi oleh kepala Desa P.Saprawi (H. Syu'ieb 1960-1970) namun setahun kemudian bukan tambah besar malah sumber airnya semakin hari semakin kecil. Lama kelamaan Sendang berair bila musim tembakau tiba dan kering kembali bilaman musim penghujan, sehingga masyarakat memberi julukan Sumber Rejeki. Itulah asal mula Desa diberi nama Desa Sendang.⁹⁸

⁹⁸ Wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang Isma'iel Jumat 29/04/2019 Pkl : 09:25:30 WIB, di kantor Balai Desa Sendang.

Sedangkan geografis desa sendang adalah Wilayah Desa Sendang dilihat dari Topografi berada pada 30 m ketinggian dari permukaan air laut dengan keadaan curah hujan rata-rata 20 mm/tahun, serta suhu rata-rata pertahun adalah 30°C dengan kelembaban udara rata-rata 70 % per tahun.

Secara Administrasi Desa Sendang terletak di wilayah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Wilayah Desa Sendang secara administratif dibatasi oleh wilayah Desa-Desa tetangga. Disebelah utara perbatasan dengan Desa Rombasan, sebelah selatan perbatasan dengan selat Madura, sedangkan disisi barat berbatasan dengan Kaduara Timur dan disisi timur berbatasan dengan Desa Sentol.

Luas wilayah Desa sendang sebesar 351,07 ha hal luas lahan terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti fasilitas umum, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: tanah untuk bangunan 4,242 ha; luas lahan untuk pemakaman 0,5 ha.

Sedangkan untuk aktifitas pertanian dan penunjangannya terdiri dari: Lahan sawah dan ladang seluas; 104,436 ha. Selebihnya

untuk lahan pemukiman seluas 16,362 Ha; tanah bengkok (TKD) 13,160 Ha, lahan perkantoran 54 M 2.⁹⁹

Sedangkan Wilayah Desa Sendang terdiri dari 3 dusun, ketiga wilayah dusun tersebut meliputi :¹⁰⁰

- 1) Dusun Sendang Timur terdiri dari 2 RT
- 2) Dusun Sendang Barat terdiri dari 1RT
- 3) Dusun Duwak Paka' terdiri dari 1 RT

Adapaun demografis kependudukan desa sendang adalah¹⁰¹ Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 933 Jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 442. Sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 491 Jiwa.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Sendang Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	442	47,37%
2	Perempuan	491	52,63%
Jumlah	933	100%	Jumlah

Sumber: Desa Sendang Kecamatan Pragaan, Januari Tahun 2018.

⁹⁹ Data Geografi Desa diambil di Balai Desa Sendang, 29/04/2019, Pkl : 10:30:15 WIB di Kantor Balai Desa Sendang.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Sendang Maswedi, 30/04/2019, Pkl : 08:15:30 WIB di Rumah Kediaman Kepala Desa.

¹⁰¹ Dokumentasi Balai Desa Sendang, 30/04/2019, Pkl : 08:10:11 WIB.

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Sendang 933 jiwa terdiri dari jumjali laki-laki 442 jiwa atau 47,37 % dari jumlah total penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 491 jiwa atau 52,63 % dari total jumlah penduduk yang tercatat dari hasil survei data sekunder dibandingkan dengan data yang ada di administrasi Desa ternyata tidak ada perbedaan yakni jumlah penduduk Desa Sendang saat ini adalah 855 jiwa yang tercatat didalam survei data sekunder. Hal ini mendorong pemerintah Desa untuk mempertahankan sistem administrasi dan terus melakukan cek ulang terhadap data penduduk. Sampai saat ini didapatkan kesimpulan bahwa kinerja dari aparatur Desa sangatlah bagus dan memuaskan.

Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Sendang dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan. pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Sendang yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Sendang berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat data lampiran tabel 4.2. berikut ini:

Tabel. 4.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No	Klompok Usia	L	P	Jumlah	Prosentase
1	0 - 5 th	36	38	74	7.93%
2	6 - 10 th	29	32	61	6.54%
3	11 - 15 th	41	43	84	9.00%
4	16 - 20 th	42	44	86	9.22%
5	21 - 25 th	28	30	58	6.22%
6	26 - 30 th	39	42	81	8.68%
7	31 - 35 th	33	38	71	7.61%
8	36 - 40 th	36	45	81	8.68%
9	41 - 45 th	48	53	101	10.83%
10	46 - 50 th	28	27	55	5.90%
11	51 - 55 th	22	23	45	4.80%
12	56 - 60 th	18	22	40	4.29%
13	61 - 65 th	17	23	40	4.29%
14	66 - 70 th	11	15	26	2.79%
15	71 - th	14	16	30	3.22%
Jumlah		442	491	933	100%

Sumber : Data Desa Sendang 2018

b. Dana Desa (DD) desa Sendang

Tabel .4.3
Anggaran Dana Desa (DD)
Desa Sendang Tahun 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	9.090.000,00	
1.2	Pendapatan Transfer	1.021.201.545,00	
1.2.1	Dana Desa (DD)	716.239.000,00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	304.962.545,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.030.291.545,00	
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	183.147.897,00	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	156.960.000,00	
2.1.2	Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	3.314.500,00	
2.1.3	Operasional Badan Permusyawaratan Desa BPD	2.305.500,00	
2.1.4	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.854.897,00	
2.1.7	Insentif RT/RW	6.120.000,00	
2.1.12	Musyawah Desa Perencanaan Pembangunan Desa	798.500,00	
2.1.13	Musyawah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)	938.500,00	
2.1.14	Penyelenggaraan Musyawarah Desa APBDes	918.500,00	
2.1.15	Penyusunan Pelaporan LPPD, LKPJ Akhir Anggaran	937.500,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	687.674.475,00	
2.2.1	Pembangunan Kantor Kepala Desa (Dsn. Sendang Timur RT.002)	127.199.000,00	
2.2.4	Penerangan Jalan Desa Dsn Sendang Timur Rt. 002 (selatan Kades)	12.320.025,00	
2.2.5	Pembangunan Drainase Dsn. Sendang Timur RT.002 (Selatan Kades)	92.674.000,00	
2.2.5	Pembangunan Drainase Dsn. Sendang Barat RT. 002 (Jalan Mase)	71.512.000,00	
2.2.9	Pembangunan Jalan Makadam Dsn. Duwa' Paka RT.001 (Ahmadi - Feriyanto)	21.726.500,00	
2.2.9	Pembangunan Jalan Makadam Dsn. Duwa' Paka RT.001 (Selatan Balai Desa)	70.939.500,00	
2.2.10	Pembangunan Jembatan Desa Dsn. Duwa' Paka RT.001 (ke Tambak)	15.829.500,00	
2.2.10	Pembangunan Jembatan Desa Dsn. Sendang	40.849.500,00	

	Timur RT.002 (Bhuju' Bhungkel)		
2.2.12	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dsn. Sendang Timur RT.002 (Selatan Kades)	26.766.000,00	
2.2.12	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dsn. Sendang Barat RT.002 (Pak Sudah)	23.004.000,00	
2.2.15	Rehabilitasi Polindes Dsn. Duwa' Paka RT.001	54.061.200,00	
2.2.33	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Sendang Timur RT.002/RW.001 (Bpk. Hamimah)	30.762.000,00	
2.2.33	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Sendang Timur RT.002/RW.001 (Buju' Bungkel)	30.176.000,00	
2.2.33	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Sendang Timur RT.001/RW.001 (Pak Sipul - Pak Rasidah)	40.370.000,00	
2.2.33	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Sendang Timur RT.001/RW.001 (Bpk. Surami)	9.061.000,00	
2.2.34	Rehabilitasi Jalan Paving (Dsn. Sendang Timur RT.002 (Selatan Kades)	20.424.250,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	5.000.000,00	
2.3.2	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pengadaan seragam Hansip/Linmas)	5.000.000,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7.200.000,00	
2.4.1	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Insentif Kader Posyandu)	4.200.000,00	
2.4.2	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan (Insentif Guru Ngaji)	3.000.000,00	
2.5	Bidang Tak Terduga	5.185.000,00	
2.5.2	Kejadian Luar Biasa	5.185.000,00	
	JUMLAH BELANJA	888.207.372,00	
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	12.915.827,00	
3.1.1	SILPA	12.915.827,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	155.000.000,00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	

Sumber : Data Desa sendang Tahun 2018

2. Profil Desa Rombasa

a. Sejarah Desa (Mencakup Luas daerah, dan penduduk)

Pemerintahan Desa Rombasan bisa dikatakan efektif sejak kepemimpinan Bunarjak sebagai Kepala Desa Rombasan (1966-1993). Dimasa kepemimpinan beliau Desa Rombasan dibagi 3 (tiga) wilayah kedesunan yaitu :

- a. Dusun Kolor dengan 1 (Satu) RW (Rukun Warga) dan 1 (Satu) RT (Rukun Tetangga)
- b. Dusun Waru dengan 1 (Satu) RW (Rukun Warga) dan 1 (Satu) RT (Rukun Tetangga)
- c. Dusun Kembang dengan 1 (Satu) RW (Rukun Warga) dan 1 (Satu) RT (RukunTetangga)

Kemudian pada tahun 1993-1998 Kepala Desa Rombasan dijabat oleh Kepala Desa Terpilih yaitu Moh. Suhan. Dimasa kepemimpinan beliau inilah Desa Rombasan dibagi 2 (dua) wilayah kedesunan meliputi :

- a. Dusun Kolor terdiri atas 1 Rukun Warga dan 2 Rukun Tetangga.
- b. Dusun Kembang terdiri atas 1 Rukun Warga dan 2 Rukun Tetangga.

Pada tahun 1998-2000 kepemimpinan dijabat oleh Maskawi, sebagai Pejabat Kepala Desa Rombasan. Karena beberapa hal maka terjadi pergantian Pejabat Kepala Desa. Pada tahun 2000-2003 Pejabat Kepala Desa dijabat oleh Mindira.

Pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2003 jabatan kepala Desa oleh masyarakat dipercayakan kepada Kepala Desa Terpilih pada tahun periode 2003 – 2008 yaitu Muhlis Hidayat

Pada Pemilihan Kepala Desa tahun periode 2008-2014 jabatan Kepala Desa Rombasan oleh masyarakat masih dipercayakan kembali kepada Kepala Desa terpilih yaitu Muhlis Hidayat.

Pada Pemilihan Kepala Desa tahun periode 2015-2020 jabatan Kepala Desa Rombasan oleh masyarakat masih dipercayakan kembali kepada Kepala Desa terpilih yaitu Muhlis Hidayat.¹⁰²

Sedangkan Geografis desa Rombasan adalah¹⁰³ Secara geografis Desa Rombasan terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Sumenep tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Rombasan rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa

¹⁰²Wawancara dengan Sekretaris Desa 21/04/2019, Pkl, 13:21 WIB di Kediaman Sekdes Rombasan.

¹⁰³ Data Geografi Desa diambil di Rumah Sekretaris Desa Rombasan, 21/04/2019, Pkl. 13:00 WIB.

Rombasan beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24-32 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober.

Iklm Desa Rombasan sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember – April dan musim kemarau antara bulan April - Nopember.

Secara Administrasi Desa Rombasan terletak sekitar 5 Km dari ibu kota Kecamatan Pragaan, kurang lebih 41 Km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah Desa-Desa tetangga diantaranya di Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Desa Bekeong Kec. Guluk-Guluk**, Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Desa Sentol Daya dan Desa Sentol Laok**. Disebelah **Selatan** berbatasan dengan **Desa Sentol Laok** sedangkan disebelah **Barat** berbatasan dengan **Desa Rombasan** Kec. Pragaan dan **Desa Kertagena Laok dan Desa Kartagena Daya Kab. Pamekasan**.

Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Rombasan terdiri atas 6 Dusun dengan 21 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi:

- a) Dusun Tengginah terdiri atas 4 Rukun Tetangga;
- b) Dusun Lembanah terdiri atas 4 Rukun Tetangga;
- c) Dusun Sumber Gentong terdiri atas 4 Rukun Tetangga;
- d) Dusun Taretah Dalem terdiri atas 3 Rukun Tetangga;

- e) Dusun Mocol terdiri atas 2 Rukun Tetangga;
- f) Dusun Kerrem terdiri atas 4 Rukun Tetangga

Adapun demografis kependudukan adalah¹⁰⁴ Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Rombasan adalah terdiri dari 1.435 KK, dengan jumlah total 4.344 jiwa, dengan rincian 2.055 laki-laki dan 2.289 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 4.9. berikut ini:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Rombasan Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	2.055	47,31%
2	Perempuan	2.289	52,69%
Jumlah		4.344	100,00%

Sumber: Data desa rombasan tahun 2018

b. Dana Desa (DD) desa Rombasan

Tabel .4.5
Anggaran Dana Desa (DD)
Desa Rombasan Tahun 2018

Kode				Uraian	Anggaran	Ket
1				2	3	4
1.	2.	1		Dana Desa	698.383.000	1.
2	2	1		Penerangan Lingkungan Pemukiman (11.03.04.)	24.071.500	DD
2	2	1	1	Belanja Pegawai (5.1.1)	-	
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	930.000	DD

¹⁰⁴ Data Dokumen Desa diambil di Rumah Sekdes, 21/04/2019, Pkl 13:05 WIB.

				<i>Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi (5.1.2.06.)</i>	25.000	DD
				» Dokumentasi	25.000	
				<i>Belanja Cetak dan Penggandaan (5.1.2.07.)</i>	5.000	DD
				» Fotocopy	5.000	
				<i>Honorarium Tim Pengelola Kegiatan TPK (5.1.2.20)</i>	900.000	DD
				» Ketua	250.000	
				» Sekretaris	200.000	
				» Anggota	450.000	
2	2	1	3	Belanja Modal (5.1.3.)	23.141.500	DD
				» Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan (5.1.3.39)	23.141.500	
2	2	2		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Makadam (11.03.02.09.)	112.838.500	DD
2	2	2	1	Belanja Pegawai (5.1.1)	-	
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	930.000	DD
				<i>Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi (5.1.2.06.)</i>	25.000	DD
				» Dokumentasi	25.000	
				<i>Belanja Cetak dan Penggandaan (5.1.2.07.)</i>	5.000	
				» Fotocopy	5.000	
				<i>Honorarium Tim Pengelola Kegiatan TPK (5.1.2.20)</i>	900.000	DD
				» Ketua	250.000	
				» Sekretaris	200.000	
				» Anggota	450.000	
2	2	2	3	Belanja Modal (5.1.3.)	111.908.500	DD
				» <i>Belanja Modal Jalan Makadam (5.1.3.28)</i>	111.908.500	
2	2	3		Pembangunan dan Pemeliharaan Gorong-Gorong (11.03.02.11.)	29.297.000	DD
2	2	3	1	Belanja Pegawai (5.1.1)	-	
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa	930.000	DD

				(5.1.2.)		
				<i>Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi (5.1.2.06.)</i>	25.000	DD
				» Dokumentasi	25.000	
				<i>Belanja Cetak dan Penggandaan (5.1.2.07.)</i>	5.000	DD
				» Fotocopy	5.000	
				<i>Honorarium Tim Pengelola Kegiatan TPK (5.1.2.20)</i>	900.000	DD
				» Ketua	250.000	
				» Sekretaris	200.000	
				» Anggota	450.000	
2	2	3	3	Belanja Modal (5.1.3.)	28.367.000	DD
				» Belanja Modal Bangunan Gorong-Gorong (5.1.3.33)	28.367.000	
2	2	4		Pembangunan & Pemeliharaan Ged. Sarpras Kesehatan Masy. (11.03.02.1	351.623.750	DD
				Pembangunan Lapangan Futsal		
2	2	4	1	Belanja Pegawai (5.1.1)	-	
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	930.000	DD
				<i>Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi (5.1.2.06.)</i>	25.000	DD
				» Dokumentasi	25.000	
				<i>Belanja Cetak dan Penggandaan (5.1.2.07.)</i>	5.000	DD
				» Fotocopy	5.000	
				<i>Honorarium Tim Pengelola Kegiatan TPK (5.1.2.20)</i>	900.000	DD
				» Ketua	250.000	
				» Sekretaris	200.000	
				» Anggota	450.000	
2	2	4	3	Belanja Modal (5.1.3.)	350.693.750	DD
				» <i>Belanja Modal Bangunan dan Gedung Lainnya (5.1.3.27)</i>	350.693.750	

2	2	5		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras Kesehatan Masy. (11.03.02.15)	23.499.200	DD
				Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Air Bersih		
2	2	5	1	Belanja Pegawai (5.1.1)	-	
2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	949.200	DD
				<i>Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi (5.1.2.06.)</i>	45.000	DD
				» Dokumentasi	45.000	
				<i>Belanja Cetak dan Penggandaan (5.1.2.07.)</i>	4.200	DD
				» Fotocopy	4.200	
				<i>Honorarium Tim Pengelola Kegiatan TPK (5.1.2.20)</i>	900.000	DD
				» Ketua	250.000	
				» Sekretaris	200.000	
				» Anggota	450.000	
2	2	5	3	Belanja Modal (5.1.3.)	22.550.000	DD
				» Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ukur (5.1.3.05)	22.550.000	
				» Anggota	450.000	
				» Barang untuk diberikan kepada Masyarakat	4.794.700	
2	2	7	3	Belanja Modal (5.1.3.)	-	

3. Profil Desa Sentol laok

a) Sejarah desa (Mencakup Luas daerah, Penduduk) ¹⁰⁵

Pemerintahan Desa Sentol Laok sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sesuai dengan perkembangan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Aparat Desa, 30/04/2018, Pk1 13: 56 WIB.

keadaan dan kondisi masyarakat maka wilayah pemerintahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah Lembanah dan Wilayah Tengginah

Dimulai secara administrasi Pemerintahan Desa Sentol Laok belum ada kejelasan tahun kapan pemerintahan Desa Sentol laok berdiri. Namun setelah tahun 1915 Pemerintahan Desa Sentol Laok diawali dengan Pemerintahan Bapak Sarasi sebagai Kepala Desa pertama pada saat itulah penduduk/masyarakat mulai diajak bermusyawarah mengenai tata cara membangun serta mengelola Desa. Berikutnya pada tahun 1930 Pemerintahan Desa Sentol Laok diganti oleh Bapak Admo Angriman sebagai Kepala Desa ke dua, Beliau memutuskan Pemerintahan Desa Sentol Laok menjadi Dua Dusun Yaitu Dusun Lembanah dan Dusun Tengginah sedangkan untuk wilayah Lembanah terdiri atas 3 Rt dan wilayah Tengginah terdiri dari 3 RT. Pada tahun 1942 sampai tahun 1945 kepemimpinan Desa dipimpin oleh Bapak Matsaha sebagai Kepala Desa ketiga dan didampingi oleh Bapak Kumprek sebagai Sekdes Sentol Laok belum ada perkembangan masih dalam penjajahan Jepang. Setelah itu pemerintahan Desa dipimpin oleh Bapak Mai Munaji sebagai Kepala Desa ke empat yang didampingi oleh Bapak Dulkamar sebagai Sekdes dalam menjalankan pemerintaha Desa sampai dengan tahun 1977. setelah itu Bapak Dulkamar meninggal dunia Sekdesnya diganti oleh Bapak Moh.Hasyim

sebagai Sekdes sampai dengan tahun 1985, beliau berhasil mengajak masyarakat untuk mengelola Desa menjadi berkembang. Pada tahun 1985 Bapak Mai Munaji meninggal dunia, setelah Bapak Mai Munaji meninggal dunia kepemimpinan Desa Sentol Laok dipimpin oleh Bapak Moh. Hasyim selaku PJS Kepala Desa Sentol Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Bapak Moh. Hasyim menjabat PJS sampai dengan tahun 1990 dan jabatan Sekdesnya dipegang oleh Bapak Kaprawi sampai tahun 1995. Pada tahun 1990 Bapak Moh. Hasyim resmi menjadi Kepala Desa Sentol Laok sampai tahun 1998 dan Sekdesnya dijabat oleh Bapak Subahri. Pada tahun 1998 diadakan pemilihan Kepala Desa Kembali dan tetap kepemimpinan Desa Sentol Laok dipegang oleh Bapak Moh. Hasyim selaku Kepala Desa Sentol Laok sampai tahun 2007 dan Sekdesnya tetap dipegang oleh Bapak Subahri. Pada tahun 2007 Kepemimpinan Desa Sentol Laok dipegang oleh Bapak Bahri, S. Ag. dan Sekdesnya tetap dipegang Bapak Subahri sampai sekarang. Pada Bulan Mei 2013 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa kembali dengan dua calon Kepala Desa yaitu: Abd Azis dan Bahri, S. Ag dan pada pemilihan Kepala Desa tersebut di menangkan oleh Bapak Bahri, S. Ag kebalikan, maka Kepala Desa Sentol Laok di pegang oleh Bapak Bahri, S. Ag untuk kedua kalinya periode 2013-2019.

Adapun pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Sentol Laok terdiri atas 2 Dusun dengan 6 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi:

- 1) Dusun Lembanah terdiri atas 3 Rukun Tetangga
- 2) Dusun Tengginah terdiri atas 3 Rukun Tetangga

Sedangkan Geografis desa sentol Laok adalah¹⁰⁶Wilayah Desa Sentol Laok secara Geografis berada di 113°38' BB - 113°40' BT dan 7°8' LU-7°6' LS. Dengan Toporafi Wilayah Desa Sentol Laok berada pada ketinggian 0 – 50 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <3% luas wilayah sebanyak 147 Ha. Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Sentol Laok beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24 – 35 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan Januari . Iklim Desa Sentol Laok sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember dan musim kemarau antara bulan Januari Nopember.

Secara Administrasi Desa Sentol Laok terletak sekitar 3 Km dari ibu kota Kecamatan Pragaan, kurang lebih 37 Km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah Desa-Desa tetangga. Di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sentol Daya,

¹⁰⁶ Data Geografi Desa diambil di Balai Desa, 30/04/2019,Pkl, 14:05 WIB.

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pakamban Daya dan Pakamban Laok. Disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sentol Daya sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Desa Rombasan dan Desa Larangan Perreng.

Luas wilayah Desa Sentol Laok sebesar 147 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 3,5 Ha; luas tanah untuk bangunan umum 4.9 Ha; luas tanah untuk pemakaman 1.50 Ha. Sedangkan untuk aktifitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari lahan Sawah 0 Ha, ladang/tegalan 110,00Ha, Hutan rakyat 19,00Ha.

Adapun Demografis kependudukan adalah Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara Administrasi, jumlah total 916 Jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 456 Jiwa, sedangkan berjenis Perempuan berjumlah 460 Jiwa.

Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan Januari 2017 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam Tabel 4.14 berikut ini :

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sentol Laok
Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	2507	43.07%
2	Perempuan	3000	56.92%
Jumlah		5507	100%

Sumber: Data desa sentol laok Tahun 2018

b) Dana Desa (DD) desa Sentol Laok

Tabel. 4.7
Anggaran Dana Desa (DD)
Desa Sentol Laok Tahun 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN	KET
	Dana Desa (DD)	715.403.000	
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	524.530.200	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Paving	42.322.400	DD
	Dusun Tengginah RT 06, RW 02 (Ust. Zai)		
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Paving	20.941.900	DD
	Dusun Tengginah RT 06, RW 02 (Bambang Sulaksono)		
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Paving	30.069.600	DD
	Dusun Tengginah RT 05, RW 02 (Sakduki)		
	Pekerjaan Pemasangan Tembok Embung	314.356.00	DD
	Dusun Lembanah RT 01, RW01		
	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok	32.736.500	DD

	Penahan Tanah		
	Dusun Lembanah Rt 002 Rw 001		
	Bidang Pembinaan Masyarakat	13.937.000	
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	59.163.500	DD
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan	6.009.500	DD
	Bantuan Insentif Guru Ngaji		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan	6.890.700	DD
	Pelatihan Produk Unggulan Desa		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan	2.912.700	DD
	Pelatihan KPMD		
	Bidang Tak Terduga	19.891.956	
	Penyedia Layanan Informasi Tentang Bencana Alam	19.89156	
	SILPA	31.838.306	
	Pengeluaran Pembiayaan		
	Penyertaan Modal Desa	200.000.000	DD

4. Sentol daya

a) Sejarah Desa (Mencakup Luas daerah, Penduduk)¹⁰⁷

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa, Luas wilayah Desa Sentol Daya sebesar 407,11, Ha Dengan jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3267 jiwa.

¹⁰⁷ Data Geografis Desa diambil di Balai Desa Sentol daya, 20/04/2019, Pkl 12: 05 WIB.

Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki berjumlah 1606 jiwa sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1661 jiwa.

Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei data Sekunder yang dilakukan pada bulan Oktober 2016, berkaitan dengan data penduduk pada saat itu terlihat dari blangko yang diisi oleh ketua RT dilingkungan masing-masing. Didapat data seperti yang ada di tabel 4 berikut:

Tabel 4.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Sentol Daya Tahun 2018

N	Jenis Ketamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1606	49,15%
2	Perempuan	1661	50,85%
3	Jumlah	3267	100%

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Sentol Daya 3267 jiwa terdiri dari jumjali laki-laki 1606 jiwa atau 47,55 % dari jumlah total penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 1661 jiwa atau 52,45 % dari total jumlah penduduk yang tercatat dari hasil survei data sekunder dibandingkan dengan data yang ada di administrasi Desa ternyata tidak ada perbedaan yakni jumlah penduduk Desa Sentol Daya saat ini adalah 3267 jiwa yang tercatat didalam survei data

sekunder. Hal ini mendorong pemerintah Desa untuk mempertahankan sistem administrasi dan terus melakukan cek ulang terhadap data penduduk. Sampai saat ini didapatkan kesimpulan bahwa kinerja dari aparatur Desa sangatlah bagus dan memuaskan.

NO	Dusun	Jumlah/orang	Klamen	Jml /orang
1	Masaran	561	Lk	263
			Pr	298
2	Sabidak	990	Lk	484
			Pr	506
3	Nong Bunter	1168	Lk	569
			Pr	599
4	Bates	548	Lk	290
			Pr	258
Jumlah		3257		3257

Secara Geografi wilayah Desa Sentol Daya secara geografis berada di 41.1000 mT - 41.6000 mT; 9113000mU-9109000 mU. Dilihat dari Tupografi ketinggian Desa Sentol Daya berada pada 32 m ketinggian dari permukaan air laut dengan keadaan curah hujan rata-rata 20 mm/tahun, serta suhu rata-rata pertahun adalah 30°c dengan kelembaban udara rata-rata 70 % pertahun.

b) Dana desa (DD) desa sentol daya

Tabel.4.9
Anggaran Dana Desa (APBDes)
Desa sentol daya tahun 2018

Kode				Uraian	Anggaran	Ket
1				2	3	4
1	2	1		Dana Desa	1.115.972.000	DD
1	2	2		Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten		
2	1	11	1	Belanja Pegawai		
2	1	11	2	Belanja Barang dan Jasa	2.414.900,00	
2	1	11	3	Belanja Modal		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.082.770.550,00	
2	2	2		Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi/Drainase Sekitar Masjid Al-Furqan	71.103.200,00	DD
2	2	2	1	Belanja Pegawai		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	87.800,00	
2	2	2	1	Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	81.000,00	
2	2	2	2	Foto Copy dan Cetak	6.800,00	
2	2	2	4	Makan dan Minum Rapat		
2	2	2	4	Honorarium TPK		
2	2	1	3	Belanja Modal	71.015.400,00	
2	2	3		Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi/Drainase Sekitar Pak Jauhari	53.588.700,00	DD
2	2	3	1	Belanja Pegawai		
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa	87.800,00	
2	2	3	1	Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	81.000,00	
2	2	3	2	Foto Copy dan Cetak	6.800,00	
2	2	3	4	Makan dan Minum Rapat		

2	2	3	4	Honorarium TPK		
2	2	1	3	Belanja Modal	53.500.900,00	
2	2	4		Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi/Drainase Nong Bunter/ Muhtar	31.514.200,00	DD
2	2	4	1	Belanja Pegawai		
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa	75.400,00	
2	2	4	1	Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	69.000,00	
2	2	4	2	Foto Copy dan Cetak	6.400,00	
2	2	4	4	Makan dan Minum Rapat		
2	2	4	4	Honorarium TPK		
2	2	4	3	Belanja Modal	31.438.800,00	
2	2	5		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Makadan Jl. Plasa	110.378.700,00	DD
2	2	5	1	Belanja Pegawai		
2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.201.000,00	
2	2	5		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	45.000,00	
2	2	5		Foto Copy dan Cetak	6.000,00	
2	2	5		Makan dan Minum Rapat		
2	2	5		Honorarium TPK	1.150.000,00	
2	2	5	3	Belanja Modal	109.177.700,00	
2	2	6		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Makadan Jl. Jamal	47.745.500,00	DD
2	2	6	1	Belanja Pegawai		
2	2	6	2	Belanja Barang dan Jasa	51.000,00	
2	2	6		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	45.000,00	
2	2	6		Foto Copy dan Cetak	6.000,00	
2	2	6		Makan dan Minum Rapat		
2	2	6		Honorarium TPK	-	
2	2	6	3	Belanja Modal	47.694.500,00	
2	2	7		Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Desa Jl. Pak. Samhari	125.702.650,00	DD
2	2	7	1	Belanja Pegawai		
2	2	7	2	Belanja Barang dan Jasa	1.202.400,00	
2	2	7		Jasa Dekorasi, Publikasi dan	45.000,00	

				Dokumentasi		
2	2	7		Foto Copy dan Cetak	7.400,00	
2	2	7		Makan dan Minum Rapat		
2	2	7		Honorarium TPK	1.150.000,00	
2	2	7	3	Belanja Modal	124.500.250,00	
2	2	8		Pembangunan dan Pemeliharaan Gorong-gorong Jl.Plasa	8.267.000,00	DD
2	2	8	1	Belanja Pegawai		
2	2	8	2	Belanja Barang dan Jasa	944.000,00	
2	2	8		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	39.000,00	
2	2	8		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	2	8		Makan dan Minum Rapat		
2	2	8		Honorarium TPK	900.000,00	
2	2	8	3	Belanja Modal	7.323.000,00	
2	2	9		Pembangunan dan Pemeliharaan Gorong-gorong Jl. Poros	7.861.300,00	DD
2	2	9	1	Belanja Pegawai		
2	2	9	2	Belanja Barang dan Jasa	44.000,00	
2	2	9		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	39.000,00	
2	2	9		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	2	9		Makan dan Minum Rapat		
2	2	9		Honorarium TPK		
2	2	9	3	Belanja Modal	7.817.300,00	
2	2	11		Pembangunan dan Pemeliharaan Gorong-gorong B. Sulai	7.878.900,00	DD
2	2	11	1	Belanja Pegawai		
2	2	11	2	Belanja Barang dan Jasa	44.000,00	
2	2	11		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	39.000,00	
2	2	11		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	2	11		Makan dan Minum Rapat		
2	2	11		Honorarium TPK		
2	2	11	3	Belanja Modal	7.834.900,00	
2	2	12		Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jl. Pak. Suyana	7.418.300,00	DD

2	2	12	1	Belanja Pegawai		
2	2	12	2	Belanja Barang dan Jasa	944.000,00	
2	2	12		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	39.000,00	
2	2	12		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	2	12		Makan dan Minum Rapat		
2	2	12		Honorarium TPK	900.000,00	
2	2	12	3	Belanja Modal	6.474.300,00	
2	2	13		Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jl. Pak Samhari	23.947.700,00	DD
2	2	13	1	Belanja Pegawai		
2	2	13	2	Belanja Barang dan Jasa	44.000,00	
2	2	13		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	39.000,00	
2	2	13		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	2	13		Makan dan Minum Rapat		
2	2	13		Honorarium TPK		
2	2	13	3	Belanja Modal	23.903.700,00	
2	2	14		Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) Bu. Patun	24.724.900,00	DD
2	2	14	1	Belanja Pegawai		
2	2	14	2	Belanja Barang dan Jasa	44.000,00	
2	2	14		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	39.000,00	
2	2	14		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	2	14		Makan dan Minum Rapat		
2	2	14		Honorarium TPK		
2	2	14	3	Belanja Modal	24.680.900,00	
2	2	16		Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) Bates Bawah	26.695.100,00	DD
2	2	16	1	Belanja Pegawai		
2	2	16	2	Belanja Barang dan Jasa	44.000,00	
2	2	16		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	39.000,00	
2	2	16		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	2	16		Makan dan Minum Rapat		
2	2	16		Honorarium TPK		

2	2	16	3	Belanja Modal	26.651.100,00	
2	2	19		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Rabat Beton Jl. Pak.Rus	26.126.800,00	ADD
2	2	19	1	Belanja Pegawai		
2	2	19	2	Belanja Barang dan Jasa	944.000,00	
2	2	19		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	39.000,00	
2	2	19		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	2	19		Makan dan Minum Rapat		
2	2	19		Honorarium TPK	900.000,00	
2	2	19	3	Belanja Modal	25.182.800,00	
2	2	21		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Rabat Beton Jl. Kolpo Barat	56.063.200,00	DD
2	2	21	1	Belanja Pegawai		
2	2	21	2	Belanja Barang dan Jasa	44.400,00	
2	2	21		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	39.000,00	
2	2	21		Foto Copy dan Cetak	5.400,00	
2	2	21		Makan dan Minum Rapat		
2	2	21		Honorarium TPK		
2	2	21	3	Belanja Modal	56.018.800,00	
2	2	22		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Paving Jl. Kolpo	79.482.650,00	DD
2	2	22	1	Belanja Pegawai		
2	2	22	2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2	2	22		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	45.000,00	
2	2	22		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	2	22		Makan dan Minum Rapat		
2	2	22		Honorarium TPK	1.150.000,00	
2	2	22	3	Belanja Modal	78.282.650,00	
2	2	23		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Paving Jl. H. Imam	32.916.850,00	DD
2	2	23	1	Belanja Pegawai		
2	2	23	2	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	
2	2	23		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	45.000,00	
2	2	23		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	

2	2	23		Makan dan Minum Rapat		
2	2	23		Honorarium TPK		
2	2	23	3	Belanja Modal	32.866.850,00	
2	2	24		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Paving JL.Sullam	43.506.850,00	Silpa DD
2	2	24	1	Belanja Pegawai		
2	2	24	2	Belanja Barang dan Jasa	48.000,00	
2	2	24		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	45.000,00	
2	2	24		Foto Copy dan Cetak	3.000,00	
2	2	24		Makan dan Minum Rapat		
2	2	24		Honorarium TPK		
2	2	24	3	Belanja Modal	43.458.850,00	
2	2	25		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Paving JL.Kuburan	72.456.750,00	DD
2	2	25	1	Belanja Pegawai		
2	2	25	2	Belanja Barang dan Jasa	56.400,00	
2	2	25		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	51.000,00	
2	2	25		Foto Copy dan Cetak	5.400,00	
2	2	25		Makan dan Minum Rapat		
2	2	25		Honorarium TPK		
2	2	25	3	Belanja Modal	72.400.350,00	
2	2	26		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Aspal Bates	54.037.750,00	DD
2	2	26	1	Belanja Pegawai		
2	2	26	2	Belanja Barang dan Jasa	51.000,00	
2	2	26		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	45.000,00	
2	2	26		Foto Copy dan Cetak	6.000,00	
2	2	26		Makan dan Minum Rapat		
2	2	26		Honorarium TPK		
2	2	26	3	Belanja Modal	53.986.750,00	
2	2	27		Foto Copy dan Cetak	6.000,00	
2	2	27		Makan dan Minum Rapat		
2	2	27		Honorarium TPK		
2	2	27	3	Belanja Modal	39.406.450,00	
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat	2.202.000,00	

2	4	1		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	9.050.000,00	DD
2	4	1		Belanja Pegawai		
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
2	4	1		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	295.000,00	
2	4	1		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	4	1		Barang yang diberikan kepada masyarakat	8.750.000,00	
2	4	1		Belanja Modal		
2	4	2		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	75.540.000,00	DD
2	4	2		Belanja Pegawai		
2	4	2		Belanja Barang dan Jasa	75.540.000,00	
2	4	2		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	295.000,00	
2	4	2		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	4	2		Insentif kader Kesehatan	28.800.000,00	
2	4	2		Barang yang diberikan kepada masyarakat	46.440.000,00	
2	4	2		Belanja Modal		
2	4	1		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	9.050.000,00	DD
2	4	1		Belanja Pegawai		
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
2	4	1		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	295.000,00	
2	4	1		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	4	1		Barang yang diberikan kepada masyarakat	8.750.000,00	
2	4	1		Belanja Modal		
2	4	2		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	75.540.000,00	DD
2	4	2		Belanja Pegawai		
2	4	2		Belanja Barang dan Jasa	75.540.000,00	
2	4	2		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	295.000,00	
2	4	2		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	4	2		Insentif kader Kesehatan	28.800.000,00	

2	4	2		Barang yang diberikan kepada masyarakat	46.440.000,00	
2	4	2		Belanja Modal		
2	4	1		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	9.050.000,00	DD
2	4	1		Belanja Pegawai		
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
2	4	1		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	295.000,00	
2	4	1		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	4	1		Barang yang diberikan kepada masyarakat	8.750.000,00	
2	4	1		Belanja Modal		
2	4	2		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	75.540.000,00	DD
2	4	2		Belanja Pegawai		
2	4	2		Belanja Barang dan Jasa	75.540.000,00	
2	4	2		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	295.000,00	
2	4	2		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	4	2		Insentif kader Kesehatan	28.800.000,00	
2	4	2		Barang yang diberikan kepada masyarakat	46.440.000,00	
2	4	2		Belanja Modal		
2	4	1		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	9.050.000,00	DD
2	4	1		Belanja Pegawai		
2	4	1		Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
2	4	1		Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	295.000,00	
2	4	1		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	4	1		Barang yang diberikan kepada masyarakat	8.750.000,00	
2	4	1		Belanja Modal		
2	4	2		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	75.540.000,00	DD
2	4	2		Belanja Pegawai		
2	4	2		Belanja Barang dan Jasa	75.540.000,00	
2	4	2		Jasa Dekorasi, Publikasi dan	295.000,00	

				Dokumentasi		
2	4	2		Foto Copy dan Cetak	5.000,00	
2	4	2		Insentif kader Kesehatan	28.800.000,00	
2	4	2		Barang yang diberikan kepada masyarakat	46.440.000,00	
2	4	2		Belanja Modal		
3	2	2		2 Penyertaan Modal Desa	150.141.200,00	DD
				JUMLAH B (RP)	157.141.200,00	
				JUMLAH A-B (RP)	(89.176.150,00)	
				JUMLAH AKHIR		

5. Pakamban Daya

a. Kondisi Geografis Desa¹⁰⁸

Wilayah Desa Pakamban Daya secara Geografis berada di 113°38' BB, 113°39' BT, dan 7°4' LU, 7°6' LS. Dengan Topografi wilayah Desa Pakamban Daya berada pada ketinggian 0-200 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <20% sebanyak 223 Ha dan berombak dengan kemiringan 3,1-15 % sebanyak 25 Ha. Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Pakamban Daya beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24-32°C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober. Iklim Desa Pakamban Daya sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember-April dan musim kemarau antara bulan April Nopember.

¹⁰⁸ Data Geografis Desa diambil di balai Desa Pakamban Daya, 20/04/2019, Pkl. 12:15 WIB.

Secara Administrasi Desa Pakamban Daya terletak sekitar 4 Km dari Kantor Kecamatan Pragaan, ± 37 Km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah Desa-Desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pordapor dan Desa Guluguluk, sebelah timur berbatasan dengan Desa Jaddung, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pakamban Laok, sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Desa Sentol Daya dan Desa Sentol Laok.

Luas wilayah Desa Pakamban Daya sebesar 313,60 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya untuk jalan, untuk bangunan umum dan untuk pemakaman.

Sedangkan untuk aktifitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari lahan sawah 3,0 Ha, Tanah kering 310, 60 Ha. Adapaun demografi kependudukan desa pakamban daya adalah¹⁰⁹ Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3.323 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.618 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 1.705 jiwa.

¹⁰⁹ Data Dokumen Desa diambil di Desa Pakamban Loak, 20/04/2019. Pkl, 12: 00 WIB.

Tabel . 4.10
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Pakamban Daya Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.618	48,69%
2	Perempuan	1.705	51,31%
Jumlah		3.323	100%

Sumber: Data Survey Sekunder Desa Pakamban Daya Kecamatan Pragaan, Januari tahun 2018

b. Dana Desa (DD) desa pakamban daya

Tidak memberikan data APBDes

6. Pakamban Laok

a) Sejarah Desa, Luas daerah dan jumlah Penduduk¹¹⁰

Pemerintahan Desa Pakamban Laok sebelumnya merupakan satu pemerintahan dengan Desa Pakamban Daya yang disebut dengan Desa Pakamban. Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat maka wilayah pemerintahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah utara dan wilayah selatan sedangkan untuk wilayah selatan terdiri atas 4 dusun.

Dimulai secara administrasi pemerintahan Desa Pakamban Laok belum ada kejelasan tahun kapan pemerintahan yang dipimpin oleh Pangeran Adi yang merupakan utusan Raja Keraton Sumenep. Pada saat itulah penduduk/masyarakat mulai diajak bermusyawarah mengenai tata cara membangun serta

¹¹⁰ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pakamban Laok, 15/04/2019, Pkl 14:30 WIB.

mengubah/merubah 4 (empat) perkampungan menjadi satu Desa. Karena masih terkait sejarah wilayah selatan diberi nama Desa Pakamban Laok. Pada kepemimpinannya mulai dibuka jalan utama yang pada saat ini menjadi jalan Propinsi.

Selang beberapa tahun kemudian kepemimpinan Desa Pakamban Laok diganti H. Abdul Halim kemudian oleh Abul Hasan Halim (1987-1989) dimana pada masa kepemimpinannya hanya berjalan beberapa tahun karena ada sesuatu hal maka pemerintah memberhentikannya sehingga kekosongan kepemimpinan Desa Pakamban Laok diganti oleh Penjabat Kepala Desa diantaranya Abd. Salam, Salehoddin, Maskawi.

Setelah sekian lama dipimpin oleh Pejabat Sementara akhirnya pada tahun 1997-2000 kepemimpinan jabatan Kepala Desa dipegang oleh Ahmad dimana pada masa kepemimpinannya terjadi gejolak dimasyarakat Desa Pakamban Laok karena tidak puas dengan Gaya kepemimpinannya.

Kemudian pada tahun 2000-2002 kepemimpinan dijabat lagi oleh Penjabat kepala Desa yaitu Hasan Anshari (Kasi Pembangunan Desa Kec. Pragaan), Pada Tahun 2002-2004 Penjabat Kepala Desa digantikan oleh Rasidi (Kasi Pemdes Kec. Pragaan).

Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2004 jabatan kepala Desa oleh masyarakat dipercayakan kepala Desa terpilih periode

2004-2009 yaitu Muhammad Imam. Pada tahun 2009-2010 kepemimpinan kepala Desa di isi oleh Penjabat Kepala Desa yaitu Hakam Bin Asari dimana program pembangunan yang dilakukan merupakan kelanjutan program sebelumnya. Pada tahun 2016-2017 kepemimpinan kepala Desa di isi oleh Penjabat Kepala Desa yaitu Hakam Bin Asari dimana program pembangunan yang dilakukan merupakan kelanjutan program sebelumnya.

Pada Pemilihan Kepala Desa tahun periode 2017-2023 jabatan Kepala Desa Pakamban Laok oleh masyarakat di percayakan kepada Kepala Desa terpilih yaitu Mukhlisin.

Sedangkan Luas daerah Pakamban laok adalah¹¹¹Desa Pakamban Laok terletak di Kecamatan Pragaan Pulau Madura memiliki luas 2.010957 km².

Secara Geografis Desa Pakamban Laok terletak antara 113°6462' Bujur Timur dan 7°1114' Lintang Utara yang terbagi atas dataran rendah dengan berbagai potensi yang berupa produksi tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari sepanjang kurang lebih 1.5 km arah barat timut yang merupakan daerah penghasil garam dan berbagai biota laut.

Adapun jumlah penduduk desa pakamban laok adalah¹¹²Berdasarkan Data Administrasi Kependudukan Desa Pakamban Laok 14 Februari 2017, jumlah penduduk Desa

¹¹¹ Data Geografi Desa Pakamban Laok diambil di Balai Desa Pakamban alok, 15/04/2019, Pkl: 14:59 WIB.

¹¹² Data Desa diambil di Balai Desa Pakamban Laok, 15/04/2019, Pkl: 15:05 WIB.

Pakamban Laok sebesar 2.359 jiwa dari 715 Kepala Keluarga. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.155 jiwa (48.96%), sedangkan berjenis perempuan berjumlah 1.204 jiwa (51.04%). Data Sekunder sebagai data pembandingan dari data yang ada di Pemerintah Desa dengan kondisi real jumlah penduduk. Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan Februari 2017 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam Tabel 4.11. berikut ini :

Tabel 4.11
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Pakamban Laok Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.155	48.96%
2	Perempuan	1.204	51.04%
Jumlah		2.359	100%

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Pakamban Laok 2.359 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.155 jiwa atau 48,96% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 1.204 jiwa atau 51,04% dari total jumlah penduduk yang tercatat.

b) Dana Desa (DD) Desa Pakamban Laok

Tabel. 4.12
Anggaran Dana Desa (DD)
Desa pakamban laok tahun 2018

Kode				Uraian	Anggaran	Ket
1				2	3	4
1				PENDAPATAN (4.)	1.443.797.010	
1	1			Pendapatan Asli Desa (4.1.)	10.200.000	
1	1	1		Tanah Kas Desa (PUD) (4.1.2.)	10.200.000	
				Hasil Usaha		
				Pasar Desa		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1	2			Pendapatan Transfer (4.2.)	1.433.597.010	
1	2	1		Dana Desa (DD) (4.2.1.)	873.001.000	
1	2	2		Bagian dari hasil pajak retribusi daerah kabupaten (4.2.2.)		
1	2	3		Alokasi Dana Desa (ADD) (4.2.3.)	430.596.010	
1	2	4		Bantuan Provinsi (4.2.4.)		
1	2	5		Bantuan Kabupaten (PBK) (4.2.5.)	130.000.000	
1	2	5	1	Bantuan Keuangan Desa (BKD) PU. Bina Marga	80.000.000	
1	2	5	2	Bantuan Keuangan Desa (BKD) PU. Cipta Karya	50.000.000	
1	3			Pendapatan Lain-lain (4.3.)	-	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		

				JUMLAH PENDAPATAN	1.443.797.010	
2				BELANJA (5.)	1.369.940.710	
2	1			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (11.08.01.)	363.866.710	
2	1	1		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan (11.08.01.01.)	196.177.800	
2	1	1	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	196.177.800	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Operator Siskeudes (5.1.1.0)	109.200.000	
				Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (5.1.1.02.)	10.200.000	
				Tunjangan BPD dan Anggota (5.1.1.03.)	28.800.000	
				Honorarium PTPKD (5.1.1.04.)	22.800.000	
				Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa (5.1.1.05.)	13.553.100	
				Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan BPD dan Anggota (5.1.1.05.)	8.624.700	
				Tunjangan Operator Siskaudes (5.1.1.06.)	3.000.000	
2	1	1	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	-	
2	1	1	3	Belanja Modal (5.1.3.)	-	
2	1	2		Operasional Pemerintahan Desa (11.08.01.02.)	38.578.910	
2	1	2	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	38.578.910	
				Alat Tulis Kantor (5.1.2.01.)	3.244.000	
				Benda Pos (5.1.2.02.)	2.520.000	
				Alat dan Bahan Kebersihan (5.1.2.04.)	510.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	2.400.000	

				Foto Copy Dan Cetak (5.1.2.07.)	672.200	
				Listrik, Telephon, Air, Fax Dan Internet (5.1.2.08.)	6.000.000	
				Transaksi Keuangan (Admin bank) (5.1.2.22.)	272.710	
				Makanan Dan Minuman Rapat (5.1.2.12.)	3.600.000	
				Makanan Dan Minuman Tamu (5.1.2.13.)	1.560.000	
				Pakaian Dinas Dan Atributnya (5.1.2.15.)	13.300.000	
				Belanja Bahan Bacaan (5.1.2.23.)	2.700.000	
				Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Penjaga Kantor (5.1.2.17.)	1.800.000	
2	1	2	3	Belanja Modal (5.1.3.)		-
2	1	3		Operasional BPD (11.08.01.03.)	2.047.000	
2	1	3	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)		-
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	2.047.000	
				Alat Tulis Kantor (5.1.2.01.)	601.500	
				Benda Pos (5.1.2.02.)	125.500	
				Makanan Dan Minuman Rapat (5.1.2.12.)	1.320.000	
2	1	3	3	Belanja Modal (5.1.3.)		-
2	1	4		Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Desa (11.08.01.04.)	100.850.000	
2	1	4	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)		-
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	1.150.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	1.150.000	
2	1	4	3	Belanja Modal (5.1.3.)	99.700.000	
				Belanja Modal Pengadaan Komputer Dan Peralatan Kantor (5.1.3.07.)	52.950.000	
				Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio (5.1.3.08.)	13.750.000	
				Belanja Modal Tanah Kas	33.000.000	

				Desa (5.1.3.01.)		
2	1	5		Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Desa (11.08.01.05.)	5.500.000	
2	1	5	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	5.500.000	
				Upah Jasa Servis (5.1.2.19.)	5.500.000	
2	1	5	3	Belanja Modal (5.1.3.)	-	
2	1	6		Insentif RT/RW (11.08.01.07.)	15.000.000	
2	1	6	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	1	6	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	15.000.000	
				Insentif RT Dan RW (5.1.2.10.)	15.000.000	
2	1	6	3	Belanja Modal (5.1.3.)	-	
2	1	7		Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa (11.08.01.12.)	1.225.000	
2	1	7	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	1	7	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	1.225.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	275.000	
				Foto Copy Dan Cetak (5.1.2.07.)	50.000	
				Makanan Dan Minuman Rapat (5.1.2.12.)	500.000	
				Makanan Dan Minuman Tamu (5.1.2.13.)	400.000	
2	1	7	3	Belanja Modal (5.1.3.)	-	
2	1	8		Musyawarah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) (11.08.01.13.)	1.825.000	
2	1	8	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	1	8	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	1.825.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	275.000	

				(5.1.2.06.)		
				Foto Copy Dan Cetak (5.1.2.07.)	130.000	
				Makanan Dan Minuman Rapat (5.1.2.12.)	500.000	
2	1	10	3	Belanja Modal (5.1.3.)	-	
2	2			PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (11.08.02.)	817.987.150	
2	2	1		Pengadaan, Pemb. dan Pengembng. Kantor Desa(11.08.02.01.)	53.729.500	
				Rehabilitasi Kantor Balai Desa RT. 01 RW. 04		
2	2	1	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	32.500	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	32.500	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	-	
2	2	1	3	Belanja Modal (5.1.3.)	53.697.000	
				Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor (5.1.3.17.)	53.697.000	
2	2	2		Pembangunan dan Pemeliharaan Selokan (11.08.02.06.)	26.812.950	
				Pembangunan Selokan Utara Bpk. Luthfi Dsn. Galis RT. 002 RW. 002		
2	2	2	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	930.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	30.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	900.000	
2	2	2	3	Belanja Modal (5.1.3.)	25.882.950	
				Belanja Modal Bangunan	25.882.950	

				Selokan (5.1.3.34.)		
2	2	3		Pembangunan, dan Pemeliharaan Jalan Makadam (11.08.02.09.)	54.928.025	
				Pembangunan Jalan Makadam Timur bu Bakri RT. 02 RW. 01		
2	2	3	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	925.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	25.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	900.000	
2	2	3	3	Belanja Modal (5.1.3.)	54.003.025	
				Belanja Modal Jalan Makadam (5.1.3.28.)	54.003.025	
2	2	4		Pembangunan Dan Pemeliharaan Gorong- gorong (11.08.02.11.)	9.173.100	
				Gorong-gorong Plat Beton Timur bu As Dsn. Galis RT. 001 RW. 001		
2	2	4	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	930.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	30.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	900.000	
2	2	4	3	Belanja Modal (5.1.3.)	8.243.100	
				Belanja Modal Bangunan Gorong-gorong (5.1.3.33.)	8.243.100	
2	2	5		Pembangunan Dan Pemeliharaan Gorong- gorong (11.08.02.11.)	4.517.000	
				Gorong-gorong Buis Beton Selatan bu. Latib Dsn. Galis RT. 002 RW. 001		
2	2	5	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	

2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	25.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	25.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	-	
2	2	5	3	Belanja Modal (5.1.3.)	4.492.000	
				Belanja Modal Bangunan Gorong-gorong (5.1.3.33.)	4.492.000	
2	2	6		Pembangunan Dan Pemeliharaan Gorong-gorong (11.08.02.11.)	2.348.150	
				Gorong-gorong Buis Beton Timur Bpk. Hamsun Dsn. Galis RT. 002 RW. 002		
2	2	6	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	6	2	Belanja Modal Bangunan Gorong-gorong (5.1.3.33.)	25.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	25.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	-	
2	2	6	3	Belanja Modal (5.1.3.)	2.323.150	
				Belanja Modal Bangunan Gorong-gorong (5.1.3.33.)	2.323.150	
2	2	7		Pembangunan Dan Pemeliharaan Gorong-gorong (11.08.02.11.)	3.653.600	
				Gorong-gorong Buis Beton Selatan Bpk. Sahna Dsn. Talon RT. 002 RW. 003		
2	2	7	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	7	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	25.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	25.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	-	
2	2	7	3	Belanja Modal (5.1.3.)	3.628.600	
				Belanja Modal Bangunan	3.628.600	

				Gorong-gorong (5.1.3.33.)		
2	2	8		Pembangunan Dan Pemeliharaan Gorong-gorong (11.08.02.11.)	4.272.600	
				Gorong-gorong Buis Beton Selatan Ust. Saiful Bahri Dsn. Kac RT. 002 RW. 004		
2	2	8	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	8	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	25.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	25.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	-	
2	2	8	3	Belanja Modal (5.1.3.)	4.247.600	
				Belanja Modal Bangunan Gorong-gorong (5.1.3.33.)	4.247.600	
2	2	9		Pembangunan Dan Pemeliharaan Gorong-gorong (11.08.02.11.)	9.966.700	
				Gorong-gorong Buis Beton ke Brt Kades-Makam Dsn. Galis RT. 002 RW. 002		
2	2	9	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	9	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	1.175.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	25.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	1.150.000	
2	2	9	3	Belanja Modal (5.1.3.)	8.791.700	
				Belanja Modal Bangunan Gorong-gorong (5.1.3.33.)	8.791.700	
2	2	10		Pembangunan dan Pemeliharaan TPT (11.08.02.12.)	12.526.500	
				Pembangunan TPT Utara Bpk. Luthfi Dsn. Galis RT. 002 RW. 002		
2	2	10	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	10	2	Belanja Barang dan Jasa	25.000	

				(5.1.2.)		
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	25.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	-	
2	2	10	3	Belanja Modal (5.1.3.)	12.501.500	
				Belanja Modal Bangunan Tembok Penahan Tanah (5.1.3.38.)	12.501.500	
2	2	11		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras Kes. Masy. (11.08.02.15.)	6.655.850	
				Perbaikan Septik Tank MCK Galis RT. 002 RW. 001		
2	2	11	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	11	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	635.850	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	50.000	
				Sewa Perlengkapan dan Peralatan (5.1.2.11.)	585.850	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	-	
2	2	11	3	Belanja Modal (5.1.3.)	6.020.000	
				Belanja Modal Bangunan MCK (5.1.3.24.)	6.020.000	
2	2	12		Pembangunan atau Perbaikan Embung (11.08.02.18.)	43.922.275	
				Perbaikan Embung Dusun Talon RT. 002 RW. 003		
2	2	12	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	12	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	930.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	30.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	900.000	

2	2	12	3	Belanja Modal (5.1.3.)	42.992.275	
				Belanja Modal Bangunan Embung dan Bendungan Skala Kecil (5.1.3.26.)	42.992.275	
2	2	13		Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving (11.08.02.34.)	125.148.300	
				Pembangunan Jalan Paving Timur K. Rahman Dusun Galis RT. 002 RW. 001		
2	2	13	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	13	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	1.165.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	15.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	1.150.000	
2	2	13	3	Belanja Modal (5.1.3.)	123.983.300	
				Belanja Modal Jalan Paving (5.1.3.29.)	123.983.300	
2	2	14		Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving (11.08.02.34.)	27.767.350	
				Pembangunan Jalan Paving Barat Bpk. En Dusun Galis RT. 01 RW. 01		
2	2	14	1	Belanja Pegawai Belanja Pegawai	-	
2	2	14	2	Belanja Baran Belanja Barang dan Jasa	915.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	15.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	900.000	
2	2	14	3	Belanja Modal Belanja Modal	26.852.350	
				Belanja Modal Jalan Paving (5.1.3.29.)	26.852.350	
2	2	15		Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving (11.08.02.34.)		

				15.614.300		
				Pembangunan Jalan Paving Timur Bpk. Fathor Dusun Galis		
2	2	15	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	15	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	915.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	15.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	900.000	
2	2	15	3	Belanja Modal (5.1.3.)	14.699.300	
				Belanja Modal Jalan Paving (5.1.3.29.)	14.699.300	
2	2	16		Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving (11.08.02.34.)	22.112.850	
				Pembangunan Jalan Paving Barat Bpk. Sahran Dusun Galis RT. 01 RW. 02		
2	2	16	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	16	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	915.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	15.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	900.000	
2	2	16	3	Belanja Modal (5.1.3.)	21.197.850	
				Belanja Modal Jalan Paving (5.1.3.29.)	21.197.850	
				Pembangunan Jalan Paving Barat Bpk. H. Rasid Dusun Galis RT. 02 RW. 02		
2	2	17	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	17	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	915.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	15.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	900.000	
2	2	17	3	Belanja Modal (5.1.3.)	20.589.450	

				Belanja Modal Jalan Paving (5.1.3.29.)	20.589.450	
				Pembangunan Jalan Paving ke K. Salim Dsn. Karang Dalem RT. 02 RW. 05		
2	2	18	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	18	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	915.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	15.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	900.000	
2	2	18	3	Belanja Modal (5.1.3.)	31.157.750	
				Belanja Modal Jalan Paving (5.1.3.29.)	31.157.750	
				Pembangunan Jalan Paving Barat Bpk. Mis Dsn. Karang Dale RT. 02 RW. 05		
2	2	19	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	19	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	915.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	15.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	900.000	
2	2	19	3	Belanja Modal (5.1.3.)	32.392.500	
				Belanja Modal Jalan Paving (5.1.3.29.)	32.392.500	
				Pembangunan Jalan Paving Selatan Bpk. Sahna Dusun Talon RT. 02 RW. 03		
2	2	20	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	20	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	15.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	15.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	-	
2	2	20	3	Belanja Modal (5.1.3.)	35.308.150	
				Belanja Modal Jalan Paving	35.308.150	

				(5.1.3.29.)		
				Pembangunan Jalan Paving ke Bpk. Sapura Dusun Talon RT. 01 RW. 03		
2	2	21	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	21	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	15.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	15.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	-	
2	2	21	3	Belanja Modal (5.1.3.)	40.054.900	
				Belanja Modal Jalan Paving (5.1.3.29.)	40.054.900	
2	2	22		Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving (11.08.02.34.)	22.668.700	
				Pembangunan Jalan Paving Timur Bpk. Fajar Dusun Talon RT. 02 RW. 03		
2	2	22	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	22	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	15.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	15.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	-	
2	2	22	3	Belanja Modal (5.1.3.)	22.653.700	
				Belanja Modal Jalan Paving (5.1.3.29.)	22.653.700	
2	2	23		Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving (11.08.02.34.)	36.432.800	
				Pembangunan Jalan Paving ke Barat Ust. Saiful Bahri Dsn. K RT. 01 RW. 04		
2	2	23	1	Belanja Pegawai	-	
2	2	23	2	Belanja Baran Belanja Barang dan Jasa	15.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	15.000	

				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	-	
2	2	23	3	Belanja Modal (5.1.3.)	36.417.800	
				Belanja Modal Jalan Paving (5.1.3.29.)	36.417.800	
2	2	24		Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving (11.08.02.34.)	28.992.250	
				Pemeliharaan Jalan Paving ke K. Syadili Dusun Talon RT. 01 RW. 03		
2	2	24	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	24	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	15.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	15.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	-	
2	2	24	3	Belanja Modal (5.1.3.)	28.977.250	
				Belanja Modal Jalan Paving (5.1.3.29.)	28.977.250	
2	2	25		Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving (11.08.02.34.)	40.033.300	
				Pembangunan Jalan Paving ke Brt Kades-Makam Dsn. Galis RT. 002 RW. 002		
2	2	25	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	25	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	1.292.000	
				Alat Tulis Kantor (5.1.2.01)	67.000	
				Benda Pos (5.1.2.02)	45.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	30.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	1.150.000	
2	2	25	3	Belanja Modal (5.1.3.)	38.741.300	
				Belanja Modal Jalan Paving (5.1.3.29.)	38.741.300	
2	2	26		Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving (11.08.02.34.)	24.433.300	

				Pemb. Paving Halaman Masjid Nurul Huda Dsn. Kacangan RT. 001 RW. 004		
2	2	26	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	26	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	32.500	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	32.500	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	-	
2	2	26	3	Belanja Modal (5.1.3.)	24.400.800	
				Belanja Modal Jalan Paving (5.1.3.29.)	24.400.800	
2	2	27		Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal (11.08.02.35.)	80.000.000	
				Pembangunan Jalan Aspal Selatan Pak Sahna Dsn. Talon RT. 02 RW. 03		
2	2	27	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	2	27	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	5.588.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06.)	32.500	
				Sewa Perlengkapan dan Peralatan (5.1.2.11.)	4.405.500	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	1.150.000	
2	2	27	3	Belanja Modal (5.1.3.)	74.412.000	
				Belanja Modal Jalan Aspal (5.1.3.44.)	74.412.000	
2	3			BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT (11.12.03.)	18.254.350	
2	3	1		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (11.08.03.01.)	16.699.800	
				Pelatihan dan Pertemuan Rutin Tim Penggerak PKK Desa		
2	3	1	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	

2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	16.699.800	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06)	375.000	
				Foto Copy dan Cetak (5.1.2.07.)	4.800	
				Makanan dan Minuman Tamu (5.1.2.13.)	300.000	
				Makanan dan Minuman Peserta (5.1.2.14.)	3.900.000	
				Honorarium Narasumber/Ahli (5.1.2.21.)	2.400.000	
				Belanja Bahan Praktek dan Latihan (5.1.2.24.)	9.720.000	
2	3	1	3	Belanja Modal (5.1.3.)	-	
2	3	2		Sosialisasi, Pencegahan dan Pembinaan Narkoba (11.08.03.06.)	1.554.550	
				Seminar Anti Narkoba Bersama Karang Taruna Desa		
2	3	2	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	1.554.550	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06)	162.550	
				Foto Copy dan Cetak (5.1.2.07.)	12.000	
				Makanan dan Minuman Peserta (5.1.2.14.)	580.000	
				Honorarium Narasumber/Ahli (5.1.2.21.)	800.000	
2	3	2	3	Belanja Modal (5.1.3.)	-	
2	4			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (11.08.04.)	169.832.500	
2	4	1		Pengelolaan Keg. Pelayanan Kesehatan Masy. (11.08.04.01.)	37.774.000	
				Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu)		

2	4	1	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	37.774.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06)	270.000	
				Foto Copy dan Cetak (5.1.2.07.)	4.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	900.000	
				Insentif Kader Kesehatan (5.1.2.27.)	15.000.000	
				Barang Untuk Diberikan Ke Masyarakat (5.1.2.28.)	21.600.000	
2	4	1	3	Belanja Modal (5.1.3.)	-	
2	4	2		Pengelolaan Keg. Pelynan Penddikan Dan Kebdyaan (11.08.04.02.)	62.653.500	
				Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan		
2	4	2	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	62.653.500	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06)	225.000	
				Foto Copy dan Cetak (5.1.2.07.)	8.000	
				Insentif Guru Keagamaan (5.1.2.25.)	46.200.000	
				Insentif Guru PAUD (5.1.2.26.)	7.200.000	
				Barang Untuk Diberikan Ke Masyarakat (5.1.2.28.)	9.020.500	
2	4	2	3	Belanja Modal (5.1.3.)	-	
2	4	3		Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan (11.08.04.20.)	12.740.000	
				Pelatihan Teknik Pertanian Organik dan Keturunannya		
2	4	3	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	12.740.000	

				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06)	175.000	
				Foto Copy dan Cetak (5.1.2.07.)	40.000	
				Makanan dan Minuman Tamu (5.1.2.13.)	150.000	
				Makanan dan Minuman Peserta (5.1.2.14.)	1.875.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	900.000	
				Honorarium Narasumber/Ahli (5.1.2.21.)	600.000	
				Belanja Bahan Praktek dan Latihan (5.1.2.24.)	9.000.000	
2	4	3	3	Belanja Modal (5.1.3.)	-	
2	4	4		Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian (11.08.04.07.)	56.665.000	
				Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)		
2	4	4	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	4	4	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	56.665.000	
				Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi (5.1.2.06)	1.625.000	
				Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan (5.1.2.24.)	47.890.000	
				Honorarium TPK (5.1.2.20.)	1.150.000	
				Honorarium Narasumber/Ahli (5.1.2.21.)	6.000.000	
2	4	4	3	Belanja Modal (5.1.3.)	-	
2	5			BIDANG TAK TERDUGA (11.12.05.)	-	
2	5	1		-	-	
				-		
2	5	1	1	Belanja Pegawai (5.1.1.)	-	
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa (5.1.2.)	-	

2	5	1	3	Belanja Modal (5.1.3.)	-	
				JUMLAH BELANJA	1.369.940.710	
				SURPLUS / DEFISIT	73.856.300	
3				PEMBIAYAAN (6)	(73.856.300)	
3	1			Penerimaan Pembiayaan (6.1.)		
3	1	1		SILPA (6.1.1.)	32.643.700	
3	1	1	1	SILPA DD (SLD) (6.1.1.01.)	31.089.150	
3	1	1	2	SILPA ADD (SLU) (6.1.1.02.)	1.554.550	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan (6.1.2.)	-	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan (6.1.3.)	-	
				Jumlah (RP)	32.643.700	
3	2			Pengeluaran Pembiayaan (6.2.)		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan (6.2.1.)		
				- Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	6.500.000	
3	2	2		Penyertaan Modal Desa (6.2.2.)	100.000.000	
				Jumlah (RP)	106.500.000	
				JUMLAH PEMBIAYAAN	(73.856.300)	
				SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	-	

7. Profil Desa Pragaan Laok

a. Sejarah desa, Luas daerah dan jumlah penduduk¹¹³

Adapun pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Pragaan Laok terdiri atas 6 Dusun dengan 6 Rukun Warga (RW) dan, 12 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi :

¹¹³ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pragaan Laok, 30/04/2019, Pkl: 16:34:35 WIB.

- ✓ Dusun Aeng Suka terdiri atas 3 Rukun Tetangga. dan 1 Rukun warga (RW)
- ✓ Dusun Maronggi Laok terdiri atas 2Rukun Tetangga dan 1 Rukun warga (RW)
- ✓ Dusun maronggi Daya terdiri atas 2 Rukun Tetangga dan 1 Rukun warga (RW)
- ✓ Dusun Dung Daya terdiri atas 2 Rukun Tetangga. dan 1 Rukun warga (RW)
- ✓ Dusun Dung Laok terdiri atas 1 Rukun tetangga dan 1 Rukun warga (RW)
- ✓ Dusun murnangka terdiri atas 2 Rukun tetangga dan 1 Rukun warga (RW)

Sedangkan luas daerah desa Pragaan laok adalah¹¹⁴ Wilayah Desa Pragaan Laok secara Geografis berada di 113°38' BB - 113°40' BT dan 7°8' LU - 7°6' LS. Dengan Toporafi wilayah Desa Pragaan Laok berada pada ketinggian 0 – 35 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <3% sebanyak 223 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1 – 15 % sebanyak 25 Ha.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Pragaan Laok beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih

¹¹⁴ Dokumen Desa Pragaan Laok diambil, 30/04/2019, Pkl, 16:40 WIB.

kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24 – 32 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober.

Luas wilayah Desa Pragaan Laok sebesar 3007 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 17.85 Ha; luas tanah untuk bangunan umum 0.26 Ha; luas tanah untuk pemakaman 6.50 Ha.

Sedangkan untuk aktifitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari Lahan Sawah 30,00 Ha, Ladang/Tegalan 114,89 Ha, Hutan rakyat 5,00 Ha. Sementara itu peruntukan lahan untuk aktifitas ekonomi terdiri dari lahan tambak garam 53.00 Ha. Selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 49.50 Ha.

Adapun jumlah penduduk desa pragaan laok adalah¹¹⁵ Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 5.507 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3.000 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 2.507 jiwa. Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang

¹¹⁵ Dokumen Desa Pragaan Laok diambil, 30/04/2019, Pkl 16:50 WIB.

dilakukan pada bulan Januari 2012 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Pragaan Laok Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	2507	43.07%
2	Perempuan	3000	56.92%
Jumlah		5507	100%

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Pragaan Laok 4650 jiwa, terdiri dari laki-laki 2003 jiwa atau 43,07% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 2647 jiwa atau 56,92% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Maka dengan jumlah penduduk yang lumayan banyak jumlahnya maka perlu juga pemerintah desa untuk lebih bekerja keras lagi, karena anggaran dana desa turun sesuai dengan jumlah penduduk dan status masyarakat. Apakah masuk pada masyarakat stunting atau tidak, karena setiap perkembangan ada jatah pemberdayaan masyarakat dari pemerintah, baik dari pemerintah setempat atau pemerintah pusat. Dengan begitu masyarakat dapat berkembang lebih maju lagi dari kehidupan yang sebelumnya.

8. Profi Desa Pragaan Daya

a) Sejarah Desa, luas daerah dan Jumlah Penduduk¹¹⁶

Cikal bakal lahirnya Desa Pragaan Daja dirintis oleh Ju' Jatri yang berdomisili di Dusun Blumbang pada waktu itu areal pragaan Daja Pragaan Daja secara umum aset secara kasar berupa hutan belantara oleh karenanya Bapak Jatri pada waktu itu harus berjuang secara optimal dalam rangka merubah perkampungan menjadi sebuah Desa yang mempunyai intensitas survi fail. Hal ini mewariskan untuk aset fenomenal bagi warga pragaan daja. Tentang waktu perjuangan Bapak Jatri ini, tercatat sejak 1880 - 1910.M (30 tahun) kemudian bapak jatri mengabdikan diri kepada Desa. Barulah kemudian Desa yang masih teransisi ini beralih kepada Bapak Kalebun Sabuh Alias Pak Gadhang yang berdomisili di dusun Batu jaran Blok Sabuh. Atau sebelah barat SDN Pragaan daja 1 Masa Pemerintahan Kalebun Sabuh tidak banyak mengalami perubahan karena yang bersangkutan hanya menjabat dari tahun 1910-1920 kemudian pemerintahan ini di ganti oleh Bapak Thaha dari Dusun Blumbang yang memang masih keturunan atau cucu dari ju' Jatri sebagai perintis Desa Pragaan Daja. Pemerintahan ini dengan sekuat tenaga, Pak Thaha sebagai orang nomor satu di Desa ini banyak mengalami perubahan-perubahan terutama penataan lingkungan hidup dengan mengambil buah siwalah dan pohon

¹¹⁶ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pragaan daya diruamahnya, 07/05/2019, Pkl 19:30 WIB.

mangga dari daerah Propinsi Bali untuk ditanam di Desa Pragaan Daja Demi untuk anak cucu warga Desa Pragaan Daja, Namun apa hendak di kata optimisme untuk membangun Desa yang ideal harus membayar mahal politik Praktis karena berhadapan dengan penjajah Belanda, pada waktu itu tidak terlihat adanya perkembangan signifikan Sehingga kurun waktu sekitar 22 Tahun Sejak 1920-1942 Hanya Sebagai Pelengkap Struktur Kepengurusan Desa.

Berbeda dengan rezim yang sebelumnya dengan pemerintahan yang di pegang oleh H. Muthar Sejak Tahun 1942-1971 dari batu jaran yang memberikan angin segar bagi warga Pragaan Daya, rezim ini bisa dikatakan sebagai rezim penegas dari cita-cita rezim pendahulunya karena pemerintahan inilah yang banyak mengembangkan sarana dan prasarana Desa dan tata administrasi tanah Desa yang sudah lama di tungu-tunggu warganya. Seperti pembukaan jalan Desa Pragaan, pengadaan pagar balai Desa sebagai perlengkapan pemerintah Desa.

Berapa tahun kemudian masyarakat Desa Pragaan Daya mulai membangun demokrasi yaitu pada tahun 1971 dengan pemerintahan kepala Desa yang di menangkan oleh bapak Abd. Mughni dari dusun batu jaran. Bapak Abd. Mughni menjabat Kepala Desa sejak tahun 1971-1998 pada pemerintahan inilah Bapak Abd. Mughni Banyak membangun sarana Prasarana, seperti

SDN Pragaan Daja I, SDN Pragaan Daja II SDN Pragaan Daja III namun sekarang tinggal SDN Pragaan Daja I, disisi lain Bapak Abd. Mughni membangun jalan Desa padat karya dari dusun Batujaran sampai dusun Dan-Dan Tembus di Desa Guluk-Guluk dan Prenduan. Gejolak Politik yang semakin Demokratis Masyarakat Desa Pragaan Daja pada tahun 1998 dengan pemilihan kepala Desa terpilihlah saudara H. Sufyan (1998 sampai sekarang) dari dusun batujaran, namun masih ada nasab dengan kalebun Thaha, pada pemerintahan ini saudara H. Sufyan meneruskan cita-cita pemerintahan sebelumnya yaitu membangun Infrastruktur berupa jalan pengerasan jalan Desa dan pengaspalan serta membangun jalan-jalan lingkar atau jalan tembus antar dusun yang dapat memperlancar perekonomian di Desa pragaan daya pada pemerintahan kedua H. Sufyan (2007) betul sangat mendapat apresiasi dari masyarakat dibuktikan sarana dan prasarana semakin berkembang pesat seperti pengaspalan dan jembatan.

Secara geografis Desa Pragaan Daja terletak pada posisi $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 1055 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Sumenep tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Pragaan Daja rata-rata mencapai 3.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 605,04

mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2009.

Adapaun jumlah penduduk desa Pragaan daya adalah¹¹⁷ Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Pragaan Daja adalah terdiri dari 3.516 KK, dengan jumlah total 9662 jiwa, dengan rincian 4603 laki-laki dan 5.059 perempuan. Sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 4. 15
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Tahun 2018

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 – 5	984	1090	2.074 orang	21.46.%
2	6 -10	817	928	1.745.orang	18.06.%
3	11-15	698	778	1.473.orang	15.27.%
4	16-20	535	607	1.142.orang	11.81.%
5	21-25	438	477	915.orang	9.47.%
6	26-30	387	397	784.orang	8.11.%
7	31-35	237	288	525.orang	5.43.%
8	36-40	256	238	494.orang	5.11.%
9	41-45	123	113	236..orang	2.44.%
10	46-50	82	50	132. orang	1.38.%
11	51-55	32	45	77.orang	0.79.%
12	56-60	11	28	39.orang	0.40.%
13	61 >	3	20	23.orang	023.%
Jumlah Total		4603	5.059	9.662 orang	100,00%

¹¹⁷ Dokumen Desa Pragaan Daya diambil di Balai Desa pragaan daya, 08/05/2019, 08:15 WIB

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 21-50 tahun Desa Pragaan Daja sekitar 4.551 atau hampir 49,1 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

b) Dana desa (DD) Desa Pragaan daya

Tabel. 4.16
Anggaran Dana Desa (DD)
Desa Pragaan daya Tahun 2018

Kode			Uraian	Anggaran	Ket	
1			2	3	4	
1		2	Dana Desa (DD)	1.081.485.000,00	DD	
1		2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota			
2			1	Pembangunan Jalan Paving Dusun Batu Jaran Ibu Sulis Menuju Patemon RT/RW 02/01 200 x 1.00 M	53.113.100,00	DD
2			1	Belanja Pegawai :		
2			2	Belanja Barang dan jasa :	1.217.500,00	
2	2		3	Belanja Modal	51.895.600,00	
2	2			Pembangunan Jalan Paving Dusun Batu Jaran Menuju Bpk. Ramuki RT/RW 03/01 106 x 1.00 M	28.503.100,00	DD
2	2		1	Belanja Pegawai :		
2			1	Belanja Barang dan jasa :	817.500,00	
2			2	Belanja Modal	27.685.600,00	
2	4		2	Pembangunan Jalan Paving Dusun Bulu Dari Bpk. Ridwan	18.255.273,00	DD

				Menuju Bpk. Jub RT/RW 04/05 66 x 21.00 M		
2				Belanja Pegawai :		
2	2		1	Belanja Barang dan jasa :	817.500,00	
2	2		1	Belanja Modal	17.437.773,00	
2	2			Pembangunan Jalan Paving Dusun Bulu Dari Bpk. In Wahed Menuju Bpk. Lusi RT/RW 04/05 191 x 1.00 M	50.793.600,00	DD
2		1	2	Belanja Pegawai :		
2			3	Belanja Barang dan jasa :	1.217.500,00	
	2			Belanja Modal	49.576.100,00	
2		1		Pembangunan Jalan Paving Dusun Bulu Menuju Bpk. Sudahnan RT/RW 04/05 25 x 1.50 M	9.609.705,00	DD
2	2		2	Belanja Pegawai :		
2	2		2	Belanja Barang dan jasa :	817.500,00	
2				Belanja Modal	8.792.205,00	
2				Pembangunan Jalan Paving Dusun Nong Pote Menuju Bpk. Korin RT/RW 02/03 55 x 1.00 M	15.348.524,00	DD
2				Belanja Pegawai :		
2				Belanja Barang dan jasa :	817.500,00	
2				Belanja Modal	14.531.024,00	
2				Pembangunan Jalan Paving Dusun Rembang RT/RW 02/02 154 x 1.00 M	40.962.300,00	DD
				Belanja Pegawai :		
2				Belanja Barang dan jasa :	817.500,00	
2				Belanja Modal	40.144.800,00	

2	1	2		Pembangunan Pengaspalan Jalan Dusun Dandan RT/RW 02/06 500 x 2,5 M	174.768.300,00	DD
2	1	2	2	Belanja Pegawai :		
2	1		2	Belanja Barang dan jasa :	1.217.500,00	
2	1		2	Belanja Modal	173.550.800,00	
2	1		2	Pembangunan Pengaspalan Jalan Dusun Nong Pote RT/RW 03/03 216 x 2,5 M	77.272.700,00	DD
2	1	2		Belanja Pegawai :		
2		2	2	Belanja Barang dan jasa :	1.217.500,00	
2	1			Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Dandan RT/RW 04/06 100 x 1,00 M	39.243.100,00	DD
2		1		Belanja Pegawai :		
2		1		Belanja Barang dan jasa :	817.500,00	
2		1		Belanja Modal	38.425.600,00	DD
2		1		PEMBANGUNAN JEMBATAN	254.094.600,00	
2			2	Pembangunan Jembatan Dusun Batu Jaran Mingcalming 8 x 4 M	174.838.500,00	
2		2		Belanja Pegawai :		
2	1	2		Belanja Barang dan jasa :		
2	1			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	1.150.000,00	
2	1		2	Belanja Modal	121.592.500,00	SILPA DD
				Kebutuhan Upah	52.096.000,00	
1		2		Pembangunan Jembatan Dusun Rembang Catch 5 x 3.50 M	61.828.100,00	

1	1			Belanja Pegawai :		
	1			Belanja Barang dan jasa :		
1		2		Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	1.150.000,00	
1	1			Belanja Modal	42.513.100,00	
	1			Kebutuhan Upah	18.165.000,00	
2		2		Rehabilitasi Jembatan Dusun Bulu Sebelah Timur Pak Amtiyamah	17.428.000,00	DD
	3			Belanja Pegawai :		
1	1	1		Belanja Barang dan jasa :		
1				Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000,00	
2	2			Belanja Lain-Lain		
	2			Belanja Modal :	9.596.000,00	
1		2		Kebutuhan Upah	6.932.000,00	DD
1		2		PEMBANGUNAN PLENGSENGAN PEMBUATAN SALURAN AIR	372.755.755,00	
1		2		Pembangunan Plengsengan Dusun Blumbang Laok Bandung 160 M	63.080.750,00	
1				Belanja Pegawai :		
		6		Belanja Barang dan jasa :		
	1	6		Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	1.150.000,00	
	1	6	6	Belanja Modal	43.325.750,00	PLLD SILPA
	1		6	Kebutuhan Upah	18.605.000,00	
			6	Pembangunan Drinase Dusun Blumbang Depan Bpk. Aisiyah 55 M	86.390.810,00	DD
		1		Belanja Pegawai :		

		1	6	Belanja Barang dan jasa :		
1				Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	1.150.000,00	
1			6	Belaanja Modal	59.680.810,00	
2			6	Kebutuhan Upah	25.560.000,00	
	2		6	Pembangunan Palengsengan Depan Pasar Dusun Blumbang 160 x 1,20 M	23.284.195,00	SILPA DD
				Belanja Pegawai :		
				Belanja Barang dan jasa :		
				Jasa Dekorasi, Publikasi ,dan Dokumentasi		
1		2		Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000,00	
1		2		Belanja Lain-Lain		
1		2		Belanja Modal :	-	
2		2		Belanja modal (Pembelian batu belah ,Semin, pasir dll)	22.384.195,00	
1		5	5	Pengadaan Pipa, Kabel dan KWH Meter	19.905.000,00	DD
1				Belanja Pegawai :		
2		5		Belanja Barang dan jasa :		
1				Belanja Modal :	19.905.000,00	
1	5			Belanja modal (Pembelian Pipa untuk Sumur Boor 20 bh x Rp. 6.500 (8 Titik)	1.040.000,00	
1		5		Belanja modal (Pendaftaran 7 Bh KWH PLN untuk Sumur Boor	17.500.000,00	
2		5		Belanja modal (Pembelian Kabel 7 Bh KWH PLN x 30 m x	1.365.000,00	

				Rp. 6.500 untuk Sumur Boor		
1	5			Pengadaan Tiang Tandon Sumur Bor	47.282.000,00	SILPA DD
2		5		Belanja Pegawai :		
1				Belanja Barang dan jasa :		
2			1	Belanja Modal :	47.282.000,00	
2		5		Pengadaan Tiang Tandon untuk Sumur Boor	47.282.000,00	
2	3			Pembangunan Dan Pemeliharaan Gotong Royong	142.140.000,00	DD
	2	1		Belanja Pegawai :	-	
2				Belanja Barang dan jasa :		
2	3		1	Belanja Lain-Lain	-	
2		1		Belanja Modal :		
	1			Pembuatan Saluran Air Tiap Dusun	142.140.000,00	
2	3			PELATIHAN KPMD DAN OPERATOR DESA	3.650.000,00	SILPA DD
2	2		1	Belanja Pegawai :	-	
	2			Belanja Barang dan jasa :	2.750.000,00	
2	3	1		Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000,00	
	3			Pelatihan KPMD dan Kader Teknis	-	
2	4			Belanja Modal :	-	
2	4			PELATIHAN USAHA INDRUSTRI KECIL	9.163.130,00	SILPA DD
2	4			Belanja Pegawai :	-	
2				Belanja Barang dan jasa :	8.263.130,00	
1	4			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000,00	
2	4	1		Belanja Modal :	-	
1	4			PENGELOLAAN		

				KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (ALAT MAEN PAUD)	16.750.000,00	SILPA DD
2	4			Belanja Pegawai :		
1				Belanja Barang dan jasa :	750.000,00	
				Belanja Modal :	16.000.000,00	
2	4		7	PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (INSENTIF GURU NGAJI)	2.800.000,00	SILPA DD
2	4		7	Belanja Pegawai :	-	
2	4		7	Belanja Barang dan jasa :	2.800.000,00	
	4		7	Belanja Modal :	-	
2	4		7	PERENCANAAN & PENGANGGARAN UNTUK WARGA MISKIN, DISABILITAS PEREMPUAN DAN ANAK	3.600.000,00	SILPA DD
2	4	1	8	Belanja Pegawai :	-	
2	4		8	Belanja Barang dan jasa :	2.700.000,00	
2	4		8	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000,00	
2	4		8	Belanja Modal :	-	
2	4		8	PELATIHAN USAHA 4INDRUSTRI KECIL	11.954.700,00	SILPA DD
2	4	9		Belanja Pegawai :	-	
	4	9		Belanja Barang dan jasa :		
2	4		9	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000,00	
2	4		9	Belanja Modal :	11.054.700,00	

2	4		9	BIDANG TAK TERDUGA	1.644.428,00	
2	4		9	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	-	
2		1		Rehabilitasi TPT /Pelengsengan Jln Desa Sebelah Timur Buk sakdi (JOKO KENDIL	1.644.428,00	
2		1		Belanja Pegawai :		
2		1		Belanja Barang dan jasa :	-	
2		1		Belanja Modal :	-	
				JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT	2.502.213.179,00 (129.598.874,00)	
3			1	PEMBIAYAAN	33.932.138,00	
3	1			Penerimaan Pembiayaan	132.887.830,00	
3		2		Silpa DD 2016		
3		2		Silpa DD 2017	112.627.830,00	
3	2		2	Pencairan Dana Cadangan	-	
3	2		1	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	
3	2			JUMLAH (Rp)	132.887.830,00	
3						
3	2			Penyertaan Modal Desa (BUMDesa)	25.432.138,00	DD
				JUMLAH PEMBIAYAAN	98.955.692,00	
				SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		

9. Profil Desa Prenduan

a) Sejarah Desa, Luas Daerah dan Jumlah Penduduk¹¹⁸

Adapun pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Prenduan yang terdiri atas 6 Dusun, dengan 6 Rukun Warga (RW) dan, 24 Rukun Tetangga (RT):

- I. Dusun Pesisir terdiri atas 8 Rukun Tetangga. dan 1 Rukun warga (RW)
- II. Dusun Tamanan terdiri atas 3Rukun Tetangga dan 1 Rukun warga (RW)
- III. Dusun Onggaan terdiri atas 3 Rukun Tetangga dan 1 Rukun warga(RW)
- IV. Dusun Drusah terdiri atas 3 Rukun Tetangga. dan 1 Rukun warga (RW)
- V. Dusun Cecek terdiri atas 5 Rukun tetangga dan 1 Rukun warga (RW)
- VI. Dusun Pangelen terdiri atas 4 Rukun tetangga dan 1 Rukun warga (RW)

Sedangkan geografis desa prenduan adalah¹¹⁹Wilayah Desa Prenduan secara Geografis berada di 113°38' BB-113°40' BT dan 7°8' LU-7°6' LS. Dengan Toporafi wilayah Desa Prenduan berada pada ketinggian 0-35 m dari permukaan air laut, dimana kondisi

¹¹⁸ Dokumen Desa Prenduan di ambil di Balai Desa, 14,/04/2019, Pkl 13:20 WIB.

¹¹⁹ Dokumen Desa Prenduan di ambil di Kantor Balai Desa, 14/04/2019, Pkl 13:40 WIB.

daratan dengan kemiringan <3% sebanyak 223 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1-15 % sebanyak 25 Ha.

Luas wilayah Desa Prenduan sebesar 5.017 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 27.85 Ha; luas tanah untuk bangunan umum 2.26 Ha; luas tanah untuk pemakaman 8.50 Ha.

Adapun demografi kependudukan adalah¹²⁰ Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 13.548 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6.641 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 6.907 jiwa. Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan Januari 2018 beerkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam Tabel 4.17 Berikut ini:

¹²⁰ Dokumentasi Desa Prenduan, 14/04/2019, Pkl 13:59 WIB.

Tabel 4.17
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Prenduan 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	6.641	49.02%
2	Perempuan	6.907	50.98%
Jumlah		13.548	100%

Tabel 4.18
Jumlah Penduduk Perdesun Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Prenduan 2018

No	Alamat Dusun	Jumlah	Laki- Laki	Perempuan
1	Dusun Pesisir	1.193	503	690
2	Dusun Tamanan	888	388	500
3	Dusun Onggaan	896	400	496
4	Dusun Drusah	588	288	300
5	Dusun Pangelen	496	200	296
6	Dusun Cecek	996	456	590
JAMLAH		13.548	6.641	6.907

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Prenduan 13.548 jiwa, terdiri dari laki-laki 6.641 jiwa atau 49,02% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 6.907 jiwa atau 50,98% dari total jumlah penduduk yang tercatat.

b) Dana Desa (DD) Desa Prenduan

Tabel. 4.19
Anggaran Dana Desa (DD)
Desa Prenduan Tahun 2018

Kode	Uraian	Anggaran	Ket
1	2	3	4
	Dana Desa (DD)	856.268.000	
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	733.246.075	DD
	Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarpras Kesehatan Masyarakat	37.195.300	
	Pengeboran Air Bersih Sekitar Rumah Maswi		
	Belanja Pegawai	-	
	Belanja Barang dan Jasa	9.035.500	
	Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
	Foto Copy dan Cetak	3.000	
	Sewa Perlengkapan dan Peralatan	8.000.000	
	Honorarium TPK	900.000	
	Belanja Modal	28.159.800	
	Belanja Modal Bangunan Sarana Kesehatan	28.159.800	
	Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarpras Kesehatan Masyarakat	37.195.300	DD
	Pengeboran Air Bersih Sekitar Rumah Idrisi dusun pesisir		

			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	9.035.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Sewa Perlengkapan dan Peralatan	8.000.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Belanja Modal	28.159.800	
			Belanja Modal Bangunan Sarana Kesehatan	28.159.800	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving	26.795.475	DD
			Pembangunan Paving Sekitar Rumah Pak Hamidi		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	1.035.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Belanja Modal	25.759.975	
			Belanja Modal Jalan Paving	25.759.975	
			Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarpras Kesehatan Masyarakat	37.195.300	DD
			Pengeboran Air Bersih Sekitar Rumah H.		

			Hasbullah		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	9.035.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Sewa Perlengkapan dan Peralatan	8.000.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Belanja Modal	28.159.800	
			Belanja Modal Bangunan Sarana Kesehatan	28.159.800	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving	15.110.725	DD
			Pembangunan Paving Sekitar Rumah Rijal		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	1.035.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Informasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Belanja Modal	14.075.225	
			Belanja Modal Jalan Paving	14.075.225	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving	21.123.150	DD
			Pembangunan Paving		

			Sekitar Rumah H. Turmidzi		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	1.035.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Informasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Belanja Modal	20.087.650	
			Belanja Modal Jalan Paving	20.087.650	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving	68.833.600	DD
			Pembangunan Paving Ke Madrasah Al-Hidayah		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	1.285.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Honorarium TPK	1.150.000	
			Belanja Modal	67.548.100	
			Belanja Modal Jalan Paving	67.548.100	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving	19.352.875	DD
			Pembangunan Paving Sekitar Rumah Pak Singo		
			Belanja Pegawai	-	

			Belanja Barang dan Jasa	1.035.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving	40.147.100	DD
			Pembangunan Paving Jalan Ke Masjid Baiturrahman		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	1.035.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Belanja Modal	39.111.600	
			Belanja Modal Jalan Paving	39.111.600	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving	78.185.600	DD
			Pembangunan Paving Ke Selatan H. Suhal		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	1.285.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Honorarium TPK	1.150.000	

			Belanja Modal	76.900.100	
			Belanja Modal Jalan Paving	76.900.100	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving	12.869.050	DD
			Pembangunan Paving Ke TPU K. Mahdum		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	1.035.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Belanja Modal	11.833.550	
			Belanja Modal Jalan Paving	11.833.550	
			Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Rabat Beton	75.304.800	DD
			Rabat/Plat Beton Selatan Toko Kembar		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	1.285.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Honorarium TPK	1.150.000	
			Belanja Modal	74.019.300	
			Belanja Modal Jalan Rabat	74.019.300	

			Beton		
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras Kesehatan Masyarakat	66.238.400	DD
			Waduk Penampungan Air Bersih		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	1.285.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Honorarium TPK	1.150.000	
			Belanja Modal	64.952.900	
			Belanja Modal Bangunan Sarana Kesehatan	64.952.900	
			Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarpras Kesehatan Masyarakat	37.195.300	DD
			Pengeboran Air Bersih Sekitar Rumah Pak Fit dusun Onggeen		
			Belanja Pegawai	9.035.500	
			Belanja Barang dan Jasa	9.035.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Sewa Perlengkapan dan Peralatan	8.000.000	

			Honorarium TPK	900.000	
			Belanja Modal	28.159.800	
			Belanja Modal Bangunan Sarana Kesehatan	28.159.800	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Gorong-gorong	22.554.700	
			Gorong-gorong Buis Beton Menuju Masjid		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	135.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	22.554.700	
			Belanja Modal	3.000	
			Belanja Modal Bangunan Gorong-gorong	22.419.200	
			Penerangan Lingkungan Pemukiman	10.224.700	DD
			Penerangan Sekitar TPU Onggaan		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	135.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Belanja Modal	10.089.200	

			Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan	10.089.200	
			Penerangan Lingkungan Pemukiman	10.224.700	
			Penerangan Lingkungan Pemukiman	10.224.700	DD
			Penerangan Sekitar TPU Ponteg		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	135.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	3.000	
			Belanja Modal	10.089.200	
			Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan	10.089.200	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving	50.000.000	DD
			Pembangunan Jalan Paving Sekitar Rumah Habib		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
			Belanja Modal	47.000.000	
			Belanja Modal Jalan Paving	47.000.000	
			Bidang Pembinaan Masyarakat	21.415.699	DD

			Pembinaan Keagamaan dan Kerukunan Umat Beragama	4.552.500	
			Peringatan Hari Besar Agama Islam		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	4.552.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	132.500	
			Foto Copy dan Cetak	10.000	
			Makanan dan Minuman Peserta	1.410.000	
			Honorarium Narasumber/Ahli	3.000.000	
			Belanja Modal	21.415.699	
			Pembinaan Keagamaan dan Kerukunan Umat Beragama	4.100.000	DD
			Hibah Peralatan Tempat Ibadah		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	4.100.000	
			Barang Untuk Diberikan Ke Masyarakat	4.100.000	
			Belanja Modal	-	
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	158.839.300	DD
			Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	94.628.300	

			Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu)		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	86.927.700	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	272.500	
			Foto Copy dan Cetak	5.200	
			Honorarium TPK	1.150.000	
			Insentif Kader Kesehatan	72.000.000	
			Belanja Modal	7.700.600	
			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan	7.700.600	
			Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan	9.009.500	DD
			Bantuan Insentif Guru Ngaji		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	9.009.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	7.500	
			Foto Copy dan Cetak	2.000	
			Insentif Guru Keagamaan	9.000.000	
			Belanja Modal	-	
			Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan	4.387.500	DD
			Pelatihan Tata Rias		

			Penganten		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	4.387.500	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	257.500	
			Foto Copy dan Cetak	10.000	
			Makanan dan Minuman Peserta	920.000	
			Honorarium Narasumber/Ahli	800.000	
			Belanja Bahan Praktek dan Latihan	2.400.000	
			Belanja Modal	-	
			Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian	48.000.000	DD
			Bantuan Peralatan Nelayan		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	48.000.000	
			Barang Untuk Diberikan Ke Masyarakat	48.000.000	
			Belanja Modal	-	
			Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian	2.814.000	DD
			Bantuan Benih dan Pakan Ikan Lele		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	2.814.000	

			Barang Untuk Diberikan Ke Masyarakat	2.814.000	
			Belanja Modal	-	
			Bidang Tak Terduga	459.377	
			Penyedia Layanan Informasi Tentang Bencana Alam	459.377	
			Informasi Waspada Bencana Alam		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	459.377	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	323.478	
			Jasa Dekorasi, Publikasi Dan Dokumentasi	135.899	
			Belanja Modal	-	
			JUMLAH (Rp)	- 147.751.632	
			PEMBIAYAAN	(86.935.248)	
			Penerimaan Pembiayaan		
			SILPA	22.064.752	
			SILPA DD (SLD)	18.640.853	
			SILPA ADD (SLU)	3.423.899	
			Pencairan Dana Cadangan	-	
			Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-	
			Jumlah (Rp)	22.064.752	

			Pengeluaran Pembiayaan	-	
			Pembentukan Dana Cadangan	9.000.000	
			- Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	-	
			Penyertaan Modal Desa	100.000.000	
			Jumlah	109.000.000	
			Jumlah Pembiayaan	(86.935.248)	
			Surplus / (Defisit)	- 234.686.880	

10. Profil Desa Aeng Panas

a) Sejarah desa, luas daerah dan jumlah penduduk¹²¹

Adapun pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Aeng Panas terdiri atas 4 Dusun dengan 17 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi :

- Dusun Pesisir terdiri atas 5 Rukun Tetangga
- Dusun Nong Malang terdiri atas 4 Rukun Tetangga
- Dusun Galis terdiri atas 4 Rukun Tetangga
- Dusun Cecek terdiri atas 4 Rukun Tetangga

Sedangkan luas daerah desa aeng panas adalah¹²² Wilayah Desa Aeng Panas secara Geografis berada di 113°38' BB - 113°40' BT dan 7°8' LU - 7°6' LS. Dengan Topografi wilayah

¹²¹ Wawancara dengan Sekretaris Desa di Kantor Balai, pada 25/04/2019, Pkl 09:20:30 WIB.

¹²² Data Geografis Desa diambil di Kantor Balai Desa Aeng Panas, pada 25/04/2019, Pkl, 09:40 WIB.

Desa Aeng Panas berada pada ketinggian 0-35 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <3% sebanyak 223 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1 – 15 % sebanyak 25 Ha. Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Aeng Panas beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24 - 32 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober.

Luas Wilayah Desa Aeng Panas sebesar 315 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, perkebunan, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 10 Ha. luas tanah untuk bangunan umum 57.49 Ha., untuk bangunan umum 10,75 Ha, perkebunan 15,81 Ha, luas tanah untuk pemakaman 4.50 Ha. Sedangkan untuk aktifitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari Lahan Ladang/Tegalan 230,95 Ha, Hutan rakyat 25 Ha.

Adapaun jumlah penduduk desa aeng panas adalah ¹²³ Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total sebanyak

¹²³ Dokumentasi Desa Aeng Panas diambil di Kantor Balai Desa, 25/04/2019, Pkl 10:07 WIB.

4.678 jiwa, terdiri dari 2.287 jiwa laki-laki dan sebanyak 2.391 jiwa perempuan. Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan Januari 2017 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam Tabel 4.20 berikut ini :

Tabel 4.20.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Aeng Panas Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	2	3	4
1	Laki-laki	2.287	48,88 %
2	Perempuan	2.391	51.11 %
Jumlah		4.678	100%

b) Dana desa (DD) desa Aeng panas

Tabel. 4.21
Anggaran Dana Desa (DD)
Desa Aeng panas tahun 2018

Kode	Uraian	Anggaran	Ket
1	2	3	4
	Dana Desa (DD)	806.317.000	DD
	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN	20.974.500	DD

			SALURAN IRIGASI/DRAINASE		
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	9.500	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	-	
			Ketua	-	
			Sekretaris	-	
			Anggota	-	
			Belanja Lain-Lain	9.500	
			Cetak foto kegiatan	9.500	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	20.965.000	
			1. Pembangunan saluran irigasi/Drainase, Jln Desa Dsn Nong Malang, L 80 cm, Dalam 60 cm x P 70 m	20.965.000	
			PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN DESA	22.887.100	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	955.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
			Ketua	250.000	
			Sekretaris	200.000	
			Anggota	450.000	
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	21.932.100	
			1. Pembangunan Jembatan Desa, Dusun Pesisir Beringin L 3 m x P 6 m	21.932.100	
			PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GORONG-GORONG	6.225.500	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	55.000	
			Honorarium Tim Pengelola	-	

			Kegiatan(TPK)		
			Ketua	-	
			Sekretaris	-	
			Anggota	-	
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	6.170.500	
			1. Pembangunan Gorong-Gorong, Dusun Nong Malang Jln Desa, Juk Pandih, L 1 m x P 2.50 m	6.170.500	
			PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TEMBOK PENAHAN TANAH (TPT)	19.563.375	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	-	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	-	
			Ketua	-	
			Sekretaris	-	
			Anggota	-	
			Belanja Lain-Lain		
			Documentasi		
			Fotocopy	-	
			Rapat Persiapan	19.563.375	
			Belanja Modal :	19.563.375	
			1. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), Dusun Cecek, Jln Sungai Brumbung, T 2.6 m x P 32 m	19.563.375	
			PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TEMBOK PENAHAN TANAH (TPT)	16.512.475	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	955.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	900.000	
			Ketua	250.000	

			Sekretaris	200.000	
			Anggota	450.000	
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	15.557.475	
			1. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), Dusun Galis, Jln Desa Depan Balai, T 1.6 x P 30 m	15.557.475	
			PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN RABAT BETON	22.861.975	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	955.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
			Ketua	250.000	
			Sekretaris	200.000	
			Anggota	450.000	
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	21.906.975	
			1. Pembangunan Jalan Rabat Beton, Dusun Pesisir, RT 01 RW 01 Laok Lorong, L 2.5 x P 25 m	21.906.975	
			PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN RABAT BETON	25.790.950	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	55.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	-	
			Ketua	-	
			Sekretaris	-	
			Anggota	-	
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	

			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	25.735.950	
			1. Pembangunan Jalan Rabat Beton, Dusun Nong Malang, Nangkah Subahri, L 2.50 x P 65 m	25.735.950	
			PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN RABAT BETON	34.666.850	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	55.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	-	
			Ketua	-	
			Sekretaris	-	
			Anggota	-	
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	34.611.850	
			1. Pembangunan Jalan Rabat Beton, Dusun Nong Malang, Jalan Masjid Al-Hadits, L 2.20 x P 100 m	34.611.850	
			PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN RABAT BETON	24.369.200	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	55.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	-	
			Ketua	-	
			Sekretaris	-	
			Anggota	-	
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	24.314.200	
			1. Pembangunan Jalan Rabat		

		Beton, Dusun Cecek, RT 04 RW 04, L 2.20 x P 69 M	24.314.200	
		PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN JALAN PAVING	53.919.200	DD
		Belanja Pegawai :		
		Belanja Barang dan jasa :	955.000	
		Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
		Ketua	250.000	
		Sekretaris	200.000	
		Anggota	450.000	
		Belanja Lain-Lain	55.000	
		Documentasi	45.000	
		Fotocopy	10.000	
		Rapat Persiapan	-	
		Belanja Modal :	52.964.200	
		1. Pembangunan Jalan Paving Dusun Pesisir, Toampar K Azis, L : 2.5 x P 100 m	52.964.200	
		PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN JALAN PAVING	26.841.850	DD
		Belanja Pegawai :		
		Belanja Barang dan jasa :	955.000	
		Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
		Ketua	250.000	
		Sekretaris	200.000	
		Anggota	450.000	
		Belanja Lain-Lain	55.000	
		Documentasi	45.000	
		Fotocopy	10.000	
		Rapat Persiapan	-	
		Belanja Modal :	25.886.850	
		1. Pembangunan Jalan Paving Dan Selokan, Dusun Pesisir, RT 04 RW 01, Paving L 1 x P 20 M, Gorong2 Buis 30 cm x 80 m	25.886.850	

				PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN JALAN PAVING	31.212.050	DD
				Belanja Pegawai :		
				Belanja Barang dan jasa :	955.000	
				Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
				Ketua	250.000	
				Sekretaris	200.000	
				Anggota	450.000	
				Belanja Lain-Lain	55.000	
				Documentasi	45.000	
				Fotocopy	10.000	
				Rapat Persiapan	-	
				Belanja Modal :	31.907.350	
				1. Pembangunan Jalan Paving, Dusun Nong Malang, RT 01 RW 02, Nangkah Kamalah, L 1 x P 116 M	31.907.350	
				PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN JALAN PAVING	47.593.050	DD
				Belanja Pegawai :		
				Belanja Barang dan jasa :	955.000	
				Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
				Ketua	250.000	
				Sekretaris	200.000	
				Anggota	450.000	
				Belanja Lain-Lain	55.000	
				Documentasi	45.000	
				Fotocopy	10.000	
				Rapat Persiapan	-	
				Belanja Modal :	46.638.050	
				1. Pembangunan Jalan Paving, Dusun Nong Malang, Jln K. Hanif, L 80 cm x P 200 m	46.638.050	
				PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN JALAN PAVING	47.628.550	DD

			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	55.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	55.000	
			Ketua	-	
			Sekretaris	-	
			Anggota	-	
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	47.573.550	
			1. Pembangunan Jalan Paving, Dusun Nong Malang, Jln Masjid Lengkong, L 1 m x P 175 m	47.573.550	
			PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN JALAN PAVING	18.338.000	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	955.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
			Ketua	250.000	
			Sekretaris	200.000	
			Anggota	450.000	
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	17.383.000	
			1. Pembangunan Jalan Paving, Dusun Galis, Panegaran Timur Jumadin, L 2.20 m x P 34 m	17.383.000	
			PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN JALAN PAVING	31.513.750	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	955.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	900.000	
			Ketua	250.000	
			Sekretaris	200.000	
			Anggota	450.000	

			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	30.558.750	
			1. Pembangunan Jalan Paving, Dusun Cecek, Jln Bai P. Mastum, L 1 m x P 138 m	30.558.750	
			PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN JALAN PAVING	17.658.700	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	55.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	-	
			Ketua	-	
			Sekretaris	-	
			Anggota	-	
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	17.603.700	
			1. Pembangunan Jalan Paving, Dusun Cecek, Jln K. Kurdi Muarif, L 1 m x P 60 m	17.603.700	
			PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN JALAN PAVING	25.262.750	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	955.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
			Ketua	250.000	
			Sekretaris	200.000	
			Anggota	450.000	
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	24.307.750	

			1. Pembangunan Jalan Paving, Dusun Cecek, Jln Khairul Anam, L 2.20 m x P 49 m	24.307.750	
			PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN JALAN PAVING	38.806.550	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	955.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
			Ketua	250.000	
			Sekretaris	200.000	
			Anggota	450.000	
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	37.851.550	
			1. Pembangunan Jalan Paving, Dusun Cecek, Jln Bai P. Mastum, L 1 m x P 138 m	37.851.550	
			PEMBANGUNAN & PEMELIHARAAN JALAN PAVING	23.927.808	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	55.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)		
			Ketua		
			Sekretaris		-
			Anggota		-
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan		-
			Belanja Modal :	23.872.808	
			1. Pembangunan Jalan Paving, Dusun Cecek, Jln Imam Sutaji, L 1 m x P 85 m	23.872.808	

				PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN ASPAL	48.267.150	DD
				Belanja Pegawai :		
				Belanja Barang dan jasa :	955.000	
				Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
				Ketua	250.000	
				Sekretaris	200.000	
				Anggota	450.000	
				Belanja Lain-Lain	55.000	
				Documentasi	45.000	
				Fotocopy	10.000	
				Rapat Persiapan	-	
				Belanja Modal :	47.312.150	
				1. Pembangunan Jalan Aspal dengan Overpaint, Dusun Nong Malang, Jln Nong Malang, L 2.5 m x P 274 m	47.312.150	
				PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN ASPAL	25.594.100	DD
				Belanja Pegawai :		
				Belanja Barang dan jasa :	955.000	
				Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
				Ketua	250.000	
				Sekretaris	200.000	
				Anggota	450.000	
				Belanja Lain-Lain	55.000	
				Documentasi	45.000	
				Fotocopy	10.000	
				Rapat Persiapan	-	
				Belanja Modal :	24.639.100	
				1. Pembangunan Jalan Aspal dengan Overpaint, Dusun Galis, Jln Galis Lengkong, L 2.5 m x P 140 m	24.639.100	
				PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN	29.627.300	DD

			ASPAL		
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	955.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
			Ketua	250.000	
			Sekretaris	200.000	
			Anggota	450.000	
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	28.672.300	
			1. Pembangunan Jalan Aspal dengan Overpaint, Dusun Galis, Jln Kolmanis, L 2.5 M x P 160 M	28.672.300	
			PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN ASPAL	38.115.100	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	55.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	-	
			Ketua	-	
			Sekretaris	-	
			Anggota	-	
			Belanja Lain-Lain	55.000	
			Documentasi	45.000	
			Fotocopy	10.000	
			Rapat Persiapan	-	
			Belanja Modal :	38.060.100	
			1. Pembangunan Jalan Aspal dengan Overpaint, Dusun Cecek, Jln Rongcangka, L 2.5 m x P 222 m	38.060.100	
			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	35.179.625	
			PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9.205.000	DD

		(Pemberdayaan Bidang Olahraga)		
		Belanja Pegawai :	-	
		Belanja Barang dan jasa :	9.205.000	
		Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
		Ketua	250.000	
		Sekretaris	200.000	
		Anggota	450.000	
		Belanja Lain-Lain	55.000	
		Documentasi	45.000	
		Fotocopy	10.000	
		Rapat Persiapan	-	
		Pemberdayaan Bidang Olahraga	8.250.000	
		1. bantuan peralatan olahraga	8.250.000	
		Belanja Modal :		
		PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	16.386.625	DD
		(Radio Komunitas)	-	
		Belanja Pegawai :	-	
		Belanja Barang dan jasa :	16.386.625	
		Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
		Ketua	250.000	
		Sekretaris	200.000	
		Anggota	450.000	
		Belanja Lain-Lain	55.000	
		Documentasi	45.000	
		Fotocopy	10.000	
		Rapat Persiapan	-	
		Pemberian Barang alat radio Komunitas Permata Fm	15.431.625	
		1. Perbaikan Pemancar radio	7.000.000	
		2. Pengadaan audio proescor	3.000.000	
		3. Salon moneter	931.625	
		4. Tiang penguat tower	4.500.000	
		Belanja Modal :		
		PELATIHAN KPMD	3.633.000	DD
		Belanja Pegawai :	-	

			Belanja Barang dan jasa :	3.633.000	
			Honorarium Tim Pengelola Kegiatan(TPK)	900.000	
			Ketua	250.000	
			Sekretaris	200.000	
			Anggota	450.000	
			Belanja Percetakan dan Penggandaan	403.000	
			Percetakan Undangan dan fotocopy	3.000	
			Penggandaan Materi Pelatihan	400.000	
			Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	300.000	
			Biaya Banner	200.000	
			Biaya Dokumentasi	100.000	
			Belanja Makanan dan Minuman	830.000	
			Biaya Makanan snack	400.000	
			Biaya Makanan nasi	400.000	
			Biaya minuman air	30.000	
			Sewa perlengkapan dan Peralatan	400.000	
			Sewa sound sistem	400.000	
			Belanja Honorarium Narasumber	800.000	
			Penyertaan Modal Desa Bumdes	70.000.000	DD
			JUMLAH (Rp)	77.000.000	

11. Profil Desa Larangan Perreng

a) Identitas Desa

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : SUMENEP
Kecamatan : PRAGAAN
Desa/Kelurahan : LARANGAN PERRENG 007¹²⁴

Luas dan Batas Wilayah

Luas Desa/Kelurahan : 614 Ha.

¹²⁴ Dokumentasi data Desa Larangan Perreng diambil di rumahnya sekdes,21/04/2019, Pkl 12:50:31 WIB.

Sebelah Utara : Kec. Guluk-Guluk
 Sebelah Selatan : Desa Sentol Laok
 Sebelah Timur : Ds.Sentol laok/Sentol daya
 Sebelah Barat : Desa Rombasan/ Kab, Pamekasan

Kondisi Geografis

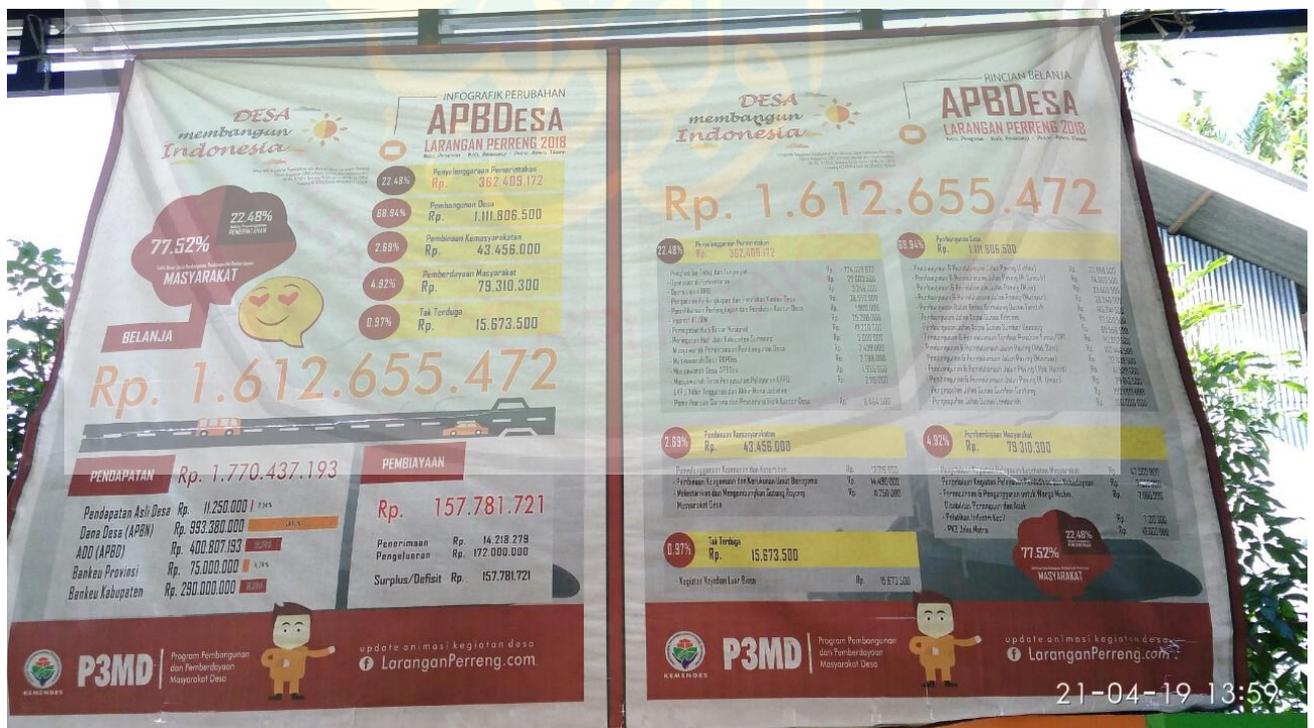
Ketinggian Tanah dari permukaan air laut : 65 m
 Topografi (daratan tinggi, rendah, pantai) : Dataran Tinggi

Kondisi Kependudukan¹²⁵

Laki-Laki : 1.946 Jiwa
 Perempuan : 2.306 Jiwa
 Jumlah : 4.252 Jiwa
 Kepala Keluarga Laki-Laki : 1.019 KK
 Kepala Keluarga Perempuan : 450 KK

b) Dana desa (DD) desa larangan perreng

Tabel. 4.22
Anggaran Dana Desa (DD)
Desa Larangan Perreng Tahun 2018



¹²⁵ Dokumentasi Desa larangan Perreng, 21/04/2019, Pk1, 13:20 WIB.

12. Profil Desa Jaddung

Tidak bersedia memberikan data dan informasi.

13. Profil Desa Kaduarah Timur

a) Identitas Desa Kadurarrah Timur¹²⁶

Provinsi	: JAWA TIMUR
Kabupaten	: SUMENEP
Kecamatan	: PRAGAAN
Desa/Kelurahan	: Kaduarah Timur RT 08,RW 03

Geografis kadurah Timur¹²⁷

Karakteristik wilayah secara Umum

Luas Desa	:235 Ha
Tadah Hujan	: 7 Ha
Irigasi Teknis	:4 Ha
Pegunungan	:236 Ha.
Dataran Tinggi 150	: 150 Ha.
Pesisir	: 8 Ha

Demografis Kependudukan

Jumlah Penduduk Total :2.787

Jumlah Jenis Kelamin

¹²⁶ Dokumentasi Desa Kaduarah Timur, 26/04/2019, Pkl, 08:39:06 WIB

¹²⁷ Wawancara dengan Sekdes Kaduarah Timur di rumahnya, 26/04/2019, Pkl 08:54 WIB.

Jumlah Laki-Laki : 1.374

Jumlah Perempuan : 1.413

b) Dana desa (DD) Desa Kaduarah Timur

Tabel. 4.23
Anggaran Dana Desa (DD)
Desa Kaduarah Timur

Kode	Uraian	Anggaran	Ket
1	2	3	4
	Dana Desa	1.038.516.000,00	Dana Desa
	PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN DUSUN GALIS RT RW 4/3 P SABIT	173.352.200,00	DD
	Belanja Pegawai	900.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	73.500,00	
	Belanja Modal	172.378.700,00	
	PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN DUSUN KETAPANG RT/RW.1/5 MADIN	31.642.100,00	DD
	Belanja Pegawai	900.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
	Belanja Modal	29.967.100,00	
	PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN DUSUN BULU RT/RW.6/5 P HABIB	29.515.000,00	DD
	Belanja Pegawai	900.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
	Belanja Modal	27.840.000,00	
	PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN KETAPANG RT/RW. 1/1 P SUNAR	103.736.100,00	DD
	Belanja Pegawai	-	
	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
	Belanja Modal	102.836.100,00	
	PEMBANGUNAN PAVING	40.332.500,00	DD

			JALAN DUSUN KETAPANG RT/RW. 5/1 ASTAH		
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
			Belanja Modal	39.432.500,00	
			PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN KETAPANG RT/RW. 5/1 DELEM	17.904.200,00	
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
			Belanja Modal	17.004.200,00	
			PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN KETAPANG RT/RW. 5/1 HADI	60.136.400,00	
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
			Belanja Modal	59.236.400,00	
			PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN PONJUN RT/RW. 1/2 RASUDI	64.288.800,00	
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
			Belanja Modal	63.388.800,00	
			PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN PONJUN RT/RW. 1/2 HASBUL	11.043.100,00	DD
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
			Belanja Modal	10.143.100,00	
			PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN PONJUN RT/RW. 3/2 JAMALI	14.898.100,00	DD
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	-	
			Belanja Modal	14.898.100,00	
			PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN PONJUN RT/RW. 4/2 P RINA	37.058.500,00	DD

			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	-	
			Belanja Modal	37.058.500,00	
			PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN GALIS RT/RW. 3/3 TALI	18.282.200,00	DD
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	-	
			Belanja Modal	18.282.200,00	
			PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN GALIS RT/RW. 3/3 SUHAR	15.784.200,00	DD
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	-	
			Belanja Modal	15.784.200,00	
			PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN MALAKAH RT/RW. 3/4 RAMOKI	59.883.600,00	DD
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	59.883.600,00	
			Belanja Modal		
			PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN MALAKAH RT/RW. 2/4 Ersam	17.235.200,00	
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	-	
			Belanja Modal	17.235.200,00	
			PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN MALAKAH RT/RW. 5/4 P. TIMAH	18.110.200,00	DD
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	-	
			Belanja Modal	18.110.200,00	
			PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN BULU RT/RW. 6/5 MAHDI	19.344.200,00	
			Belanja Pegawai	-	
			Belanja Barang dan Jasa	-	
			Belanja Modal	19.344.200,00	

				PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN BULU RT/RW. 6/5 MAIMUN	58.195.800,00	
				Belanja Pegawai	-	
				Belanja Barang dan Jasa	-	
				Belanja Modal	58.195.800,00	
				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	213.270.567,00	DD
				Bantuan issntif guru keagamaan	105.900.000,00	
				Belanja Pegawai	900.000,00	
				Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
				Belanja Modal	-	
				Berlangganan surat kabar jawa pos	2.700.000,00	DD
				Belanja Pegawai	-	
				Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
				Belanja Modal	-	
				Pemberian barang untuk anak yatim	18.550.000,00	DD
				Belanja Pegawai	900.000,00	
				Belanja Barang dan Jasa	17.650.000,00	
				Belanja Modal	-	
				Bidang Tak Terduga	30.000.000,00	DD
				Kegiatan Kejadian Luar Biasa	30.000.000,00	
				JUMLAH BELANJA	1.348.055.367,00	
				SURPLUS / DEFISIT	262.404.857,00	
				PEMBIAYAAN	29.120.567,00	
				Penerimaan Pembiayaan	86.120.567,00	
				SILPA	86.120.567,00	
				Pencairan Dana Cadangan	0,00	
				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	0,00	
				Pengeluaran Pembiayaan	57.000.000,00	
				Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Tahun 2018	7.000.000,00	
				Penyertaan Modal Desa BUMDES	50.000.000,00	

14. Profil Desa Karduluk

a) Sejarah Desa, luas daerah dan jumlah penduduk¹²⁸

Adapun kondisi geografis desa karduluk adalah¹²⁹ Wilayah Desa Karduluk secara Geografis berada di 113°38' BB - 113°40' BT dan 7°8' LU - 7°6' LS. Dengan Topografi wilayah Desa Karduluk berada pada ketinggian 0 – 1000 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan 3 % sebanyak 1.178.25 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1 – 15 % sebanyak 135 Ha.

Luas wilayah Desa Karduluk sebesar 1.178.25 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 36.85 Ha; luas tanah untuk bangunan umum 36 Ha; luas tanah untuk pemakaman 8 Ha. Sedangkan untuk aktifitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari Lahan Sawah / Ladang/Tegalan 904,89 Ha, Hutan rakyat 5,00 Ha.

Adapun jumlah penduduk desa karduluk adalah¹³⁰ Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 11.535 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5.576 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah

¹²⁸ Wawancara dengan Sekdes di Kediaman Rumahnya, 28/04/2019, Pkl 16:37 WIB.

¹²⁹ Data Geografi Desa Karduluk, 28/04/2019, Pkl 17:07 WIB di ambil di Balai Desa.

¹³⁰ Data Desa Karduluk, 28/04/2019, Pkl 17:15 WIB di ambil di Balai Desa.

5.959 jiwa. Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa. Hal ini bisa dilihat di Tabel 4.24 berikut ini :

Tabel 4.24.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Karduluk Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	5.576	48.3 %
2	Perempuan	5.959	51.7 %
Jumlah		11.535	100%

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Karduluk 11.535 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.576 jiwa atau 48,3 % dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 5.959 jiwa atau 51,7 % dari total jumlah penduduk yang tercatat.

b) Dana Desa (DD) Desa Karduluk

Tabel. 4.25
Anggaran Dana Desa (DD)
Desa Aeng panas tahun 2018

Kode	Uraian	Anggaran	Ket
1	2	3	4
	Dana Desa (DD)	1.044.277.000	DD
	Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Drainase	77.497.000	DD

			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	30.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Belanja Modal :	77.467.000	
			Belanja Modal Bangunan Saluran Irigasi / Drainase	77.467.000	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Desa	112.001.300	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	30.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Belanja Modal :	111.971.300	
			Belanja Modal Bangunan Jembatan Desa	111.971.300	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun Palalangan	23.445.050	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	930.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Belanja Modal :	22.515.050	
			Belanja Modal Bangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	22.515.050	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun Blajud (Duki)	32.060.100	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	930.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Belanja Modal :	31.130.100	
			Belanja Modal Jalan Paving	31.130.100	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun	20.957.800	DD

			Dunggaddung (H. Musleh)		
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	30.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Belanja Modal :	20.927.800	
			Belanja Modal Jalan Paving	20.927.800	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun Daleman (H. Samsul)	49.560.100	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	1.180.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Honorarium TPK	1.150.000	
			Belanja Modal :	48.380.100	
			Belanja Modal Jalan Paving	48.380.100	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun Somangkaan (K. Fuad)	67.496.700	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	1.180.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Honorarium TPK	1.150.000	
			Belanja Modal :	66.316.700	
			Belanja Modal Jalan Paving	66.316.700	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving Ke Utara Bank Desa Dunggaddung	29.973.000	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	930.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Belanja Modal :	29.043.000	
			Belanja Modal Jalan Paving	29.043.000	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun Topoar	25.753.900	DD

			(P. Ris)		
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	930.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Belanja Modal :	24.823.900	
			Belanja Modal Jalan Paving	24.823.900	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun Somangkaan (Mahyani)	64.791.500	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	30.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Belanja Modal :	64.761.500	
			Belanja Modal Jalan Paving	64.761.500	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun Bandungan (Rofi'ie)	72.624.000	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	1.180.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Honorarium TPK	1.150.000	
			Belanja Modal :	71.444.000	
			Belanja Modal Jalan Paving	71.444.000	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun Galis (Sahlan)	41.108.900	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	930.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Belanja Modal :	40.178.900	
			Belanja Modal Jalan Paving	40.178.900	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun	36.119.700	DD+SILPA

			Somangkaan (Afif)		
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	30.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Belanja Modal :	36.089.700	
			Belanja Modal Jalan Paving	36.089.700	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun Galis (Nasir)	38.121.800	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	30.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Belanja Modal :	38.091.800	
			Belanja Modal Jalan Paving	38.091.800	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun Palalangan (Hairin)	30.615.600	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	30.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Belanja Modal :	30.585.600	
			Belanja Modal Jalan Paving	30.585.600	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun Bapelle (Ambari)	72.624.000	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	1.180.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Honorarium TPK	1.150.000	
			Belanja Modal :	71.444.000	
			Belanja Modal Jalan Paving	71.444.000	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal Dusun Bandungan	38.409.800	DD
			Belanja Pegawai :		

			Belanja Barang dan jasa :	930.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Belanja Modal :	37.479.800	
			Belanja Modal Jalan Aspal	37.479.800	
			Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal Dusun Moralas	88.854.950	DD
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :	1.180.000	
			Jasa Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	30.000	
			Honorarium TPK	1.150.000	
			Belanja Modal :	87.674.950	
			Belanja Modal Jalan Aspal	87.674.950	
			Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	48.880.000	DD
			Belanja Pegawai :	-	
			Belanja Barang dan jasa :	48.880.000	
			Honorarium TPK	900.000	
			Insentif Kader Kesehatan	5.500.000	
			Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	42.480.000	
			Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	40.000.000	DD
			Belanja Pegawai :	-	
			Belanja Barang dan jasa :	40.000.000	
			Insentif Guru Keagamaan	40.000.000	
			Belanja Modal :		
			Pengelolaan produksi usaha pertanian	10.000.000	
			Belanja Pegawai :	-	
			Belanja Barang dan jasa :	10.000.000	
			Barang untuk diberikan kepada masyarakat	10.000.000	
			Belanja Modal :		
			Program Jalin Matra Feminisasi Kemiskinan	143.750.000	

			Propinsi Jawa Timur		
			Belanja Pegawai :		-
			Belanja Barang dan jasa :	143.750.000	
			Honorarium TPK	18.750.000	
			Barang untun diberikan kepada masyarakat	125.000.000	
			Belanja Modal :		
			BIDANG TAK TERDUGA	8.177.197	
			Kegiatan Kejadian Luar Biasa	8.177.197	
			Belanja Pegawai :		
			Belanja Barang dan jasa :		-
			Belanja Modal :	8.177.197	
			JUMLAH BELANJA	1.751.263.747	
			<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	<i>17.765.234</i>	
			PEMBIAYAAN	(17.765.234)	
			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	41.234.766	
			<i>Penyertaan Modal Desa</i>	50.000.000	DD
			JUMLAH (Rp)	59.000.000	

B. PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN DI KECAMATAN PRAGAAN

1. Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sendang

Adapun paparan data dari Desa Sendang terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Sendang adalah sebagai berikut:

“Dana Desa adalah terdiri dari dua bidang salah satunya adalah bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat jika ada kelebihan Dana maka tidak boleh untuk di campur adukan pada anggaran yang lain, karena hal itu akan melanggar kode etik Dana Desa yang sudah sesuai aturan. Untuk daerah sendang Dana

Desa masih belum cukup dikarenakan tidak meratanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.”¹³¹

Artinya dalam sistem Dana Desa itu sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga Desa itu hanya sebagai penggerak yang sudah jelas dalam aturan perundang-undangan Dana Desa. Dan masyarakat juga dapat mengetahui alur Dana Desa dari pemerintah terdekat, artinya diikutsertakan dalam capaian dari Dana Desa itu sendiri.

Selain itu Sekretaris Desa sedang menuturkan terkait dengan sistem pengelolaan Dana Desa:

“Sistem pengelolaan Dana Desa di Desa sedang adalah yang mengerjakan harus masyarakat sendiri tidak mengambil dari pihak luar, sedangkan kalau sistem keuangannya adalah dikerjakan terlebih dahulu baru uang akan turun karena dengan cara begitu maka kinerja akan semakin jelas. Artinya keuangan sudah ada di rekening Desa. Dari sistem pengelolannya ada tim masing-masing, baik dari tim perencanaan, tim pelaksanaan, tim Arsitektur untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan kuat. Dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat semuanya atas usulan dari masyarakat di bawah. Dari semua usulan akan diambil yang lebih di prioritaskan atau yang lebih penting. Dalam sistem penggunaan Dana Desa ini lebih banyak pada pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan aturan yang sudah ada.”¹³²

Kemudian Sekretaris Desa sedang menuturkan terkait dengan cara pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa sedang:

“Cara untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa adalah dengan cara memonitoring dari Desa baik kepala Desa, sekretaris dan pendamping Desa, dan dari bapak camat setempat juga ikut memonitoring dalam 3 bulan sekali kemudian dari pihak inspektorat juga mengontrol terhadap penggunaan Dana Desa.

¹³¹ Imaiel Wawancara, 27 April 2019

¹³² Imaiel Wawancara, 27 April 2019

Dan Dari laporan program juga menjadi acuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa hal ini dilakukan setiap hari oleh tim pengelola kegiatan bersama aparat Desa. Dan jika anggaran berkurang kemudian ada proyek yang harus dilakukan secara cepat untuk daerah sedang menggunakan swadaya masyarakat dan swakelola.”¹³³

Berdasarkan hasil peneliti di Desa sedang pengelolaan Dana Desa masih kurang terserap kepada masyarakat baik dalam pembangunan Desa atau dalam pemberdayaan masyarakat.

Sudah sesuai rencana meski ada beberapa kendala yang harus segera diperbaiki, salah satunya cara pengelolaan usaha Desa, diperlukan teknis yang berpengalaman, baik juga dari segi pembangunan Desa itu sendiri.¹³⁴

Selain itu, sekretaris Desa menyampaikan beberapa faktor penghambat program pengelolaan Dana Desa:

“Sektor ekonomi yang telah dikembangkan oleh Desa Sendang adalah tambak udang, tambak udang ini adalah sektor terbesar Desa Sendang yang dapat meminimalisir angka kemiskinan dan memberikan peluang usaha terhadap masyarakat sekitar. Dari itu dari semuanya program yang ada baik dari pembanguana Desa dan pemberdayaan masyarakat sudah efektif, hambatannya adalah kekurangan tenaga ahli untuk mengolah lebih berkembang lagi kemudian kesulitan dalam pemasarannya”¹³⁵.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Sendang Adalah program yang terdapat tim didalam pengelolaannya, yang tujuannya direncanakan untuk di realisasikan sebagai wujud pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.

¹³³ Imaiel Wawancara, 27 April 2019.

¹³⁴ Imaiel Wawancara, 27 April 2019.

¹³⁵ Imaiel Wawancara, 27 April 2019.

Gambar 4.1



Gambar 4.2



Foto Fisik Pembangunan Rehabilitas Paving Jl. Sendang Timur

85%



Gambar 4.3
Kegiatan Tambak Udang lokasi di Pesisir Desa senang



Dokumentasi: Desa Sendang

2. Pengelolaan DD Desa Rombasan

Adapun paparan data dari Desa Rombasan terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Rombasan adalah sebagai berikut :

“Kalau bicara soal Dana Desa adalah untuk membantu pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan sistem pengelolaan Dana Desa sesuai pada prokseinya yaitu Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pada langkah kinerjanya adalah sudah ada petugasnya yaitu tim pelaksana kegiatan (TPK) perencanaan, tim pelaksana, dan dipertanggung jawabkan, dan di lestarikan untuk infrastruktur. Sistem dalam anggaran perencanaan Dana Desa yaitu dari Musdes kemudian usulan itu di usulkan di Musdes dan tetap akan di prioritaskan yang paling penting terlebih dahulu”¹³⁶.

Artinya pengelolaan Dana Desa adalah program yang terdapat tim didalam pengelolaannya, yang tujuannya direncanakan untuk di

¹³⁶ Romlatur Hikmah, *Wawancara* 21 April 2019

realisasikan sebagai wujud pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.

Selain itu Sekretaris Desa Sendang menuturkan terkait dengan cara mengetahui pengelolaan Dana Desa.

“Untuk dapat mengetahui pengelolaan Dana Desa, dapat dilihat di surat petanggung jawaban (SPJ) nanti SPJ itu kalau ada permasalahan suruh di perbaiki oleh pihak ekspektorat¹³⁷ sumenep, dan dengan cara kontroling langsung pemerintah Desa baik kepala Desa atau sekretaris tapi yang jelas dalam setipa bulan serta juga kontroling itu sendiri dari pihak ekpektorak sumenep, jika mana ada penyelewangan terhadap Dana Desa. Kemudian sebelum pencairan pendaan Dana Desa itu sebelumnya ada observasi lapangan terlebih dahulu dan melihat pada anggaran yang sudah diajukan, apakah sudah sesuai rencana apa masih belum. Kemudian waktu pelaksanaan kegiatan yang ikut andil adalah tim privikasi dari kecamatan, Kepala Desa, pembangunan, kaur perencanaan yang untuk di lapangan (Pembangunan). Kalau untuk pemberdayaan masyarakat ada kasi pelayanan kaur perencanaan dan tetap akan diverifikasi oleh sekdes”¹³⁸.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Rombasan program pengelolaan Dana Desa masih kurang maksimal didalam pengelolaannya, hal ini bisa dilihat dari infrastruktur yang kurang baik serta pengelolaan pemberdayaan ekonomi Desa yang kurang maksimal, baik; disebabkan dari faktor eksternal atau internal. Sesuai dengan pernyataan sekretaris Desa:

“Pelaksanaan apakah sudah sesuai rencana apa masih belum, ada yang belum sesuai rencana ada yang sudah. Tidak sesuai rencananya adalah lambatnya pencairan Dana. Sedangkan terhadap keberhasilan program alhamdulillah sudah berjalan semua apa yang menjadi program di Desa Rombasan. Kemudian pada sektor ekonomi yang dikembangkan oleh Dana Desa di Desa rombasan adalah lapangan futsal, pelatihan-pelatian yang terkait dengan

¹³⁷ Romlatur Hikmah, *Wawancara* 21 April 2019 Jam 02:15 WIB

¹³⁸ Romlatur Hikmah, *Wawancara* 21 April 2019

Pengembangan ekonomi ,ada yang kerjasama antar Desa (Klompok tani sumber urip) sedangkan produk unggulan adalah buah naga, stik, es kkrim, selai, seni pahatan kayu untuk khias lampu dan lainnya”.¹³⁹

Selain itu, sekretaris Desa menyampaikan beberapa faktor penghambat program pengelolaan Dana Desa

“Disini, oleh saya sendiri sebenarnya sudah bagus pengalokasian Dana Desa, terkadang perturan admisntrasinya itu berubah-berubah sehingga sangat menyulitkan terhadap perangkat Desa untuk menyelesaikan seluruh kegiatan, seperti tahun ini begini, tahun depan begitu. Sedangkan dari kinerja sudah efektif”.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Rombasan Adalah program yang terdapat tim didalam pengelolaannya, yang tujuannya direncanakan untuk di realisasikan sebagai wujud pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.

3. Pengelolaaan Dana Desa (DD) Sentol Laok

Adapun paparan data dari Desa Sentol Laok terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Sentol Laok adalah sebagai berikut :

“Dana Desa adalah lebih di prioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Sentol laol adalah ada TPK (tim pengelola kegitan) atau tim pelaksana kegiatan, jadi kepala Desa tidak ikut andil dalam pengelolaan Dana Desa”.¹⁴⁰

Artinya pengelolaan Dana Desa adalah program yang terdapat tim didalam pengelolaannya, yang tujuannya direncanakan untuk di realisasikan sebagai wujud pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.

¹³⁹ Romlatur Hikmah, *Wawancara* 21 April 2019

¹⁴⁰ Subahri, *Wawancara* 20 April 2019

Selain itu Sekretaris Desa sentol laok menuturkan terkait dengan cara mengetahui pengelolaan Dana Desa:

“Cara untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa adalah dengan cara turun lapangan langsung dengan kegiatan mengontrol, melihat dan lainnya. Dengan adanya pengelolaan Dana Desa tahun 2018 ini sudah sesuai rencana.”¹⁴¹

Berdasarkan hasil observasi di Desa sentol laok program pengelolaan Dana Desa masih kurang maksimal didalam pengelolaannya, hal ini di buktikanya dengan perawatan balai Desa yang sangat jauh ari kelayakan balai Desa yang biasa, serta dilain hal infrastruktur kurang baik serta pengelolaan pemberdayaan ekonomi Desa yang kurang maksimal, baik; disebabkan dari faktor eksternal atau internal. Sesuai dengan pernyataan sekretaris Desa:

“Sektor ekonomi yang sudah dikembangkan oleh Desa sentol laok melalui Dana Desa adalah Bumdes dengan program “Sentol Makmur“ yang bergerak di bidang simpan pinjam dan produk air kemesan. Sedangkan produk unggulan yang ada di Desa Sentol laok adalah camilan kripik Singkong.”¹⁴²

Selain itu, sekretaris Desa menyampaikan beberapa faktor penghambat program pengelolaan Dana Desa salah satunya adalah pengelola dan tkehnisi lapangan .

Dalam pelaksanaa Dana Desa di Desa sentol adalah sudah efektif, dibuktikanya dari program pembangunan dan pemberydayaan tetap berjalan lancar sesuia prosedurnya Meski ada kendala dari tekhnis dan pengelolanaya¹⁴³

¹⁴¹ Subahri, *Wawancara* 20 April 2019

¹⁴² Subahri, *Wawancara* 20 April 2019

¹⁴³ Subahri, *Wawancara* 20 April 2019

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Sentol laok Adalah program yang terdapat tim didalam pengelolaannya, yang tujuannya direncanakan untuk di realisasikan sebagai wujud pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.

4. Pengelolaan Dana Desa Sentol daya

Adapun paparan data dari Desa Sentol daya terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Sentol daya adalah sebagai berikut :

“Dana Desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sarana oleh raga dan lain-lain, sedangkan alokasi Dana Desa (ADD) lebih pada oprasional kebutuhan kantor dan gaji kepala Desa beserta aparatnya. Dalam keuanganya yaitu di gabung dalam APBDes, artinya masuknya uang di gabung namun pelaksanaan dibedakan kare sesuai oprasional yang terstruktur.”¹⁴⁴

Artinya pengelolaan Dana Desa adalah program yang terdapat tim didalam pengelolaannya dan juga suda sesuai dengan undang-undang Desa, sehinga tinggal melaksanakan ke lapangan, yang semua itu tujuannya direncanakan untuk di realisasikan sebagai wujud pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.

Selain itu Sekretaris Desa Sentol daya menuturkan terkait dengan cara mengetahui pengelolaam Dana Desa:

“Sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Sentol dejuh yaitu dikerjakan oleh tim pengadaan barang dan tim pelaksana, dengan cara swakelola oleh masyarakat sekitar, sehingga manfaatnya semakin jelas bagi msyarakat terkecuali msyarakat tekhnisnya tidak ada yang bisa di Desa tersebut maka boleh ngundang terkait material yang akan dijadikan pembangunan harus bisa memberdayakan masyarakat meski hanya sebatas kebutuhan bahan pekerja, cintoh semen, jika msyarakat sekitar ada yang jual semen

¹⁴⁴ Mukmin, *Wawancara* 20 April 2019

maka tidak boleh membeli diluar Desa tersebut karena memang tujuannya adalah memberdayakan kemsकिन dan menimalisir angka kemiskinan. Sehingga setiap ada program DD ini diusahakan upah pekerja harus mencapai 30% dari Dana program. Kalau tiak mencapai maka harus mengambil program padat karya ini dan hal ini sudah dilaksanakan di tahun 2018 ini. Untuk sentol daya lebih banyak pada rabat beton, tembok penahan tanah. Dari awal pengerjaan sampai *finishing*.¹⁴⁵

Berdasarkan hasil observasi di Desa sentol daya program pengelolaan Dana Desa masih kurang maksimal didalam pengelolaannya, hal ini bisa dilihat dari infrastruktur yang kurang baik serta pengelolaan pemberdayaan ekonomi Desa yang kurang maksimal, baik; disebabkan karena kebutuhan bahan masih mengambil dari luar Desa selain itu faktor eksternal. Sesuai dengan pernyataan sekretaris Desa:

“Untuk daerah sentol daya anggaran Dana Desa 2018 sudah sesuai rencana, karena sesuai rencana, *tak bisangobe usa sesui rencna tadek sebisah ngobe*. Untuk mengetahui program sudah berjalan atau tidak survei langsung ke lapangan, *dari laporan cuken ben tak bisah melanutkan manabi laporan kitak mareh*. Manabi bedeh karosakan atas program yang di kerjakan maka tetap sesui rencana, dengan menggunakan anggaran Dana Desa dan donatur masyarakat.¹⁴⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa sentol daya Adalah program yang terdapat tim didalam pengelolaannya baik dalam pelaksanaan dan perencanaanya tidak hanya itu dalam anggaran keuanganya juga terbentuk tim didalamnya, yang tujuannya direncanakan untuk di realisasikan sebagai wujud pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.

¹⁴⁵ Mukmin, *Wawancara* 20 April 2019

¹⁴⁶ Mukmin, *Wawancara* 20 April 2019

5. Pengelolaan Dana Desa Pakamban Daya

Adapun paparan data dari Desa Pakamban Daya terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Pakamban Daya adalah sebagai berikut :

“Dana Desa nekah asli Dana APBN peruntuknya hanya untuk bidang pembangunandan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan nekah meliputi biadng kesehatan bidang pembangunan pendidikan, pendidikan msjida dan mosholla. Dan Dana Desa ini sudah ada tim masing-masing yang melaksanakanya, baik dari pekerjaa, laporan dan perencanaanmya”.¹⁴⁷

Artinya pengelolaan Dana Desa adalah program yang terdapat tim didalam pengelolaannya, yang tujuannya direncanakan untuk di realisasikan sebagai wujud pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa. Selain itu Sekretaris Desa Pakamban daya menuturkan terkait dengan cara mengetahui pengelolaam Dana Desa:

“Sistem pegelola Dana Desa seperti dengan sistem yang ada dari RKUD(rekenng kas daerah ke RKD kemudahan penariaknya sesuai aturan, misal di butuh kan kegiatan A. Jadi pencairnya itu sesuai kebutuhan Desa pakamban daya. Aturan untuk 2018 adalah barang sudah ada baru di bayar, jadi harus kerja dulu, *tettih munkitak mareh lakoh tak olle ekalak* dalam penarikan keuangan adalah kepala Desa, Sekdes hanya mendampingi adminstrasi. Dalam pearnarikan sekarang harus ada isitilah surat permintaan pembayaran SPP definitf yang di prnt pakek deskudes, mayoritas bendahara tidak tau.maka butuh pendampingan oleh sekretaris. Sistem pengeadaan barang sesuia dengan yang di sepakati saat Mosdes baik ketetapan harga dan tekhnisi, seperti paving lokal lebih mahal dari yang diluar ,kemudaian ketahanan barang lebih kuart dari luar. Jadi tetap di tetapkan mengambil diluar. Tapi mayoritas kalau DD dapat dikerjakan oleh mayarakat itu sendiri dan lebih pada paving, kenapa tdak pengaspalan karena untuk pengaspalan sudah di bantu oleh pokmas. Jika ada daerah yang

¹⁴⁷ Hafidz, *Wawancara* 20 April 2019

tertinggal maka di bangun oleh Dana Desa (DD) jembatan, paving,. dan untuk pengembangan ekonomi di sini pengembangan simpan pinjam dengan penyertan modal 170 jutaan.”¹⁴⁸

Kemudian sekretaris Desa Pakamban Daya menuturkan untuk mengetahui pengelolaannya sudah berjalan sesuai atau tidak baik dalam pembangunan Desa atau pengembangan ekonominya hal ini dengan cara memantau langsung kelapangan baik dari kepala Desa dan sekretaris Desa itu sendiri:

“Dalam pengelolaan Dana Desa ini Alhamdulillah untuk pakamban daya sudah berjalan lancar baik dari pengembangan ekonominya dan pembangunan Desa karena sudah terdapat tim masing-masing baik dari pelaksana dan perencanaan dan di pembangunan Desanya bahkan Dananya kurang untuk pengembangan ekominya dan membuka agen BRI link, untuk mengetahui adalah dengan cara terjun langsung ke lapangan setiap bulanya dan ditetapkan pada acara simpan pinjamnya.”¹⁴⁹

Selain itu, sekretaris Desa menyampaikan beberapa faktor penghambat program pengelolaan Dana Desa

“Disini, oleh saya sendiri sebenarnya sudah bagus pengalokasian Dana Desa, terkadang perturan admistrasinya itu berubah-berubah sehingga sangat menyulitkan terhadap perangkat Desa untuk menyelesaikan seluruh kegiatan, seperti tahun ini begini, tahun depan begitu dan faktor penghambat lainnya adalah kurangnya tenaga tekhnisi sehingga dalam proyek besar seperti jembatan harus mendatangkan dari luar . Sedangkan dari kinerja sudah efektif.”¹⁵⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Pakamban Daya Adalah program yang terdapat tim didalam pengelolaannya, yang tujuannya direncanakan untuk di realisasikan sebagai wujud pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.

¹⁴⁸ Hafidz, *Wawancara* 20 April 2019

¹⁴⁹ Hafidz, *Wawancara* 20 April 2019

¹⁵⁰ Hafidz, *Wawancara* 20 April 2019

6. Pengelolaan Dana Desa Pakamban laok

Adapun paparan data dari Desa Pakamban Laok terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Pakamban Laok adalah sebagai berikut :

“Dana Desa itu merupakan Dana yang di alokasikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku nomor tentang Desa 06 tahun 2014, kemudian pada waktu itu diikuti juga dengan peraturan pemerintah tentang Dana Desa nomo 60 tahun 2015 yang bersumber dari APBN yang langsung ke rekening kas Desa melalui bendahara kabupaten, kemudian pengalokasian Dana Desa dan Dana Desa mempunyai rumusan tersendiri Desa lebih cenderung Desa melihat pagunya tapi tidak melihat rumusnya, tapi dirumusan itu ada patokan mulai dari penduduk miskin, dari pendidikan, jarak dari kabupaten, Desa ke Kecamatan. Dan rumus itu sendiri mengacu pada acuan di atasnya. Jadi untuk penentuan alokasi Dana Desa menggunakan pagu, jadi Dana Desa dengan Dana Desa yang lain tidak sama dikarenakan rumusan antar Desa itu tidak sama, melihat pada jumlah penduduk dan, pendidikan dan kesehatan.”¹⁵¹

Artinya pengelolaan Dana Desa adalah program yang terdapat tim didalam pengelolaannya, yang tujuannya direncanakan untuk di realisasikan sebagai wujud pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa yang jelas perencanaannya.

Disamping itu, Sekretaris Desa Pakamban Laok menuturkan terkait dengan cara mengetahui sistem pengelolaan Dana Desa.

“Sistem pengelolaan Dana Desa di Pakamban Laok, sebelum Dana itu terbagi menjadi masing masing kegiatan, itu tersusun dulu kegiatan yang ada, jadi musyawarah Desa disusun RKP setelah RKP disusun APBDES sesuai penganggaran dari masing masing kegiatan. Baik dari harga bahan dan lainnya. Dari itu semua maka ketemu dengan pagu, baik dari ADD dan penghasilan tetap setelah tersusun semuanya, maka ada musyawarah besar untuk penentuan anggaran Dana Desa, jika disetujui maka akan dilanjutkan pada persiapan pelaksanaan.”¹⁵²

¹⁵¹ Hakam, *Wawancara* 15 April 2019.

¹⁵² Hakam, *Wawancara* 15 April 2019.

Sekretaris Desa Pakamban Laok juga menuturkan bagaimana cara mengetahui pengelolaan Dana Desa:

“Cara untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa, dengan cara mengontrol dengan cara lewat proses pencairan yang ada, kemudian baru cek kondisi lapangan sudah selesai apa belum, dan dari masyarakat serta kepala Desa, dan pihak pendamping Desa untuk mengontrol pengelolaan Dana Desa ke lapangan”.¹⁵³

Berdasarkan hasil observasi di Desa Pakamban Laok program pengelolaan Dana Desa masih kurang maksimal didalam pengelolaannya, dikarenakan kekurangan tekhnisi dalam pembangunan Desa hal ini bisa dilihat dari infrastruktur yang kurang baik serta pengelolaan pemberdayaan ekonomi Desa yang kurang maksimal, baik; disebabkan dari faktor eksternal atau internal. Sedangkan dari sektor ekonominya adalah:

“Sektor ekononmi yang telah dikembangkan oleh pakamban laok adalah dengan cara didirikanya pengembangan ekonomi dengan cara konveksi dan unit jasa keuangan, jasa catering, unit pengadaan barang dan jasa, dan itu bisa menyerap tenaga kerja kurang lebih 30 orang secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi sudah berjalan sekitar 2 tahun, pengembangan ekonomi lainnya adalah koperasi, unit simpan pinjam KWT Asri, koperasi wanita syariah dan kegaitan-kegiatan ekonomi lain adalah ada pada pertanian dan tambak garam. Dan kesemuanya dari pengamban ekonomi ini sudah berjalan lancar dengn *omzet* secara keseluruhan 50 juta rupiah.”¹⁵⁴

Selain itu, sekretaris Desa menyampaikan beberapa faktor penghambat program pengelolaan Dana Desa:

“Kalau penggunaan Dana Desa terkait efektif tidaknya dalam pengembangan ekonominya belum efektif karena pendampingan

¹⁵³ Hakam, *Wawancara* 15 April 2019.

¹⁵⁴ Hakam, *Wawancara* 15 April 2019.

pengembangan ekonomi belum ada karena selama ini berjalan dengan sendiri, hambatan yang lain adalah sumber daya manusianya, dengan bekal pengalaman yang bagus maka sektor ekonomi akan berjalan lancar”.¹⁵⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Pakamban Laok adalah program yang terdapat tim didalam pengelolaannya baik dalam perencanaannya dan dalam pemberdayaannya, yang tujuannya direncanakan untuk di realisasikan sebagai wujud pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.

7. Pengelolaan Dana Desa Pragaan laok

Adapun paparan data dari Desa Pragaan Laok menurut sekretaris desa adalah terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Pragaan laok adalah sebagai berikut :

“DD adalah Dana Desa *biasanah* ka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, tidak boleh dialokasikan di perkantoran balai dan oprasional dan DD sumbernya dari APBN”.¹⁵⁶

Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa hanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan tidak boleh di alokasikan kepada selain kepentingan tersebut. Selain itu, pak Sekdes menjelaskan:

“Sistem pengelolaan Dana Desa dengan cara *swadaya* masyarakat, jadi dari pekerja, dan bahan harus dari desa setempat. Sistem

¹⁵⁵ Hakam, *Wawancara* 15 April 2019.

¹⁵⁶ Ach. Fauzi, *Wawancara*, 30 April 2019.

pengelolaan Dana Desa dalam keuangnya adalah sesuai kebutuhan program,”*Pen taon rowah cong epakompol masyarakat kaangkuy kabutuhan se e bentah*“ Setiap tahun itu masyarakat desa di kumpulkan untuk di minta pembangunan apa saja yang masih belum dan tetap mengedapankan yang paling penting dari yang lain. Dari semua kebutuhan masih ada tim previkasi dari kecamatan untuk layak dan tidaknya. Setelah diprevikasi maka diputuskan oleh musyawah MOSDES (Musyawarah Desa). Sistem kerjanya adalah “*melleh material kappi sesuia kebutuhan dan permintaan, tettih akhrinya marenah pembangunan akan bersama*”.¹⁵⁷

Artinya, pengelolaan Dana Desa Pragaan Laok adalah program yang pengelolaannya selain dari tim ada swasembada dari msyarakat sehingga kebutuhan yang kurang dapat terpenuhi dengan sendirinya yakni dengan gotong royong, yang tujuannya direncanakan untuk di realisasikan sebagai wujud pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.

Selain itu, Sekretaris Desa Pragaan laok menuturkan terkait dengan cara pengelolaannya:

“Cara untuk mengetahui dana desa sudah sesuai rencana dengan cara mengontrol tiap hari oleh sekretaris, mungkin ada yang kurang yang belum di beli dan yang kurang manakala kalau sudah selesai, baik dari pekerjaan, layak tidaknya maka jika beres prasasti akan di pasang. Selain dari mengontrol langsung dari laporan bendahara”.¹⁵⁸

Bahkan, pak Sekdes menuturkan komitmen Desa Pragaan Laok:

“Dana desa 2018 sudah sesuai rencana, karena komitmen desa pragaan laok adalah “*engkok tak bisah maambu jika tak sesuia rencana*“ saya tidak bisa menghentikan jika tak sesuia rencana, makanya pekerjaan desa apapun tetap selalu di kontrol jika sudah selesai maka di pasang prasasti dengan begetu sudah sesui rencana, jika belum dipasang belum dikatatakan sesuai rencana.”¹⁵⁹

¹⁵⁷ Ach. Fauzi, *Wawancara*, 30 April 2019

¹⁵⁸ Ach. Fauzi, *Wawancara*, 30 April 2019

¹⁵⁹ Ach. Fauzi, *Wawancara*, 30 April 2019

Disamping itu terdapat beberapa hambatan yang dialami didalam proses pengelolaan DD Desa Pragaan Laok:

“Hambatanya penggunaan Desa di Desa Pragaan Laok adalah tekhnisi dan bahan masih mengambil dari luar desa”. Sektor ekonomi yang menggunakan dana desa adalah jual beli garam, tidak ada yang lain karena “*korang pessenah cong* “ andai uangnya banyak maka akan lebih banyak lagi dalam pengembangan ekonominya. Setahun ini untuk desa praagan laok lebih pada pembangunan desa.¹⁶⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Pragaan Laok adalah program desa yang pengelolaannya selain ditangani tim juga ada swasembada dari masyarakat sehingga jika terdapat kebutuhan yang kurang dapat terpenuhi, yakni: dengan gotong royong, yang tujuannya direncanakan untuk di realisasikan sebagai wujud pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.

8. Pengelolaan Dana Desa Larangan Perreng

Adapun paparan data dari Desa Larangan Perreng menurut sekretaris desa adalah terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Larangan Perreng adalah sebagai berikut:

“Dana desa adalah terdiri dari dua bidang pembangunan dan pemberdayaan jika ada kelebihan dana maka tidak boleh untuk di campur adukan pada anggaran yang lain, karena hal itu akan melanggar kode etik dana desa. Untuk daerah Larangan Perreng dana desa masih belum cukup dikarenakan tikda meratanya pembangunan dan pemberdayaan msyarakat”.¹⁶¹

Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa di Larangan Perreng hanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan jika ada

¹⁶⁰ Ach. Fauzi, *Wawancara*, 30 April 2019

¹⁶¹ Untung Shaleh, *Wawancara*, 21 April 2019

anggaran yang tidak dipakai maka tetap tidak boleh di alokasikan kepada selain kepentingan tersebut. Selain itu, pak Sekdes menjelaskan:

“Sistem pengelolaan dana desa di Desa Larangan Perreng menggunakan aplikasi seskudes, kemudian sisitem pengelolaan dana desanya ada yang di prioritaskan tapi tapi tergantung pada usulan dari masyarakat atas kebutuhan yang ingin di bangun”.¹⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, untuk pengecekannya adalah dengan aplikasi khusus yaitu: Aplikasi Seskudes di Desa Larangan Perreng.

“Cara untuk mengetahui pengelolaan dana desa adalah dengan cara memonetering dari desa baik kepala desa, sekretaris dan pendamping desa. Kemudian pihak ekspektorat juga mengontrol terhadap penggunaan dana desa. Dan Dari laporan program juga menjadi acuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa hal ini dilakukan setiap hari oleh tim pengelola kegiatan bersama aparat desa. Dan jika anggaran berkurang kemudian ada proyek yang harus dilakukan secara cepat untuk daerah Larangan Perreng menggunakan swadaya masyarakat.”¹⁶³

Artinya, pengelolaan Dana Desa selain dari anggaran Dana Desa juga bisa dari swadaya masyarakat setelah pihak desa melakukan monetering dan terdapat kekurangan anggaran Dana Desa sehingga perlu kerjasama dengan masyarakat.

Selain itu Sekretaris Desa menuturkan terkait dengan cara pengelolaanya:

“Dalam penggunaan dana desa ini sudah sesuai rencana tapi kalau dalam anggaran tidak sesuia karena pasti estimasi, ketika dilapangan pasti seperti itu, seperti harga semen di toko dengan pergub Desa tidak sama artinya perencanaan dan pelaksanaan tidak akan sama dalam segi harga bahan. Tapi dalam segi yang lainnya sudah sesuai rencana.”¹⁶⁴

¹⁶² Untung Shaleh, *Wawancara*, 21 April 2019.

¹⁶³ Untung Shaleh, *Wawancara*, 21 April 2019.

¹⁶⁴ Untung Shaleh, *Wawancara*, 21 April 2019.

Pak Sekdes juga menuturkan beberapa pengelolaan DD di Desa

Larangan Perreng dalam beberapa sektor:

Sektor ekonomi yang menggunakan dana desa adalah BUMDES atau pengembangan ekonomi, diantaranya: unit barang dan jasa, budi daya ikan air tawar seperti Lele, Ikan dan Udang, peternakan baik petelur atau daging dan yang terakhir perkreditan yang berbentuk apa saja.¹⁶⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Larangan Perreng adalah program Desa yang pengelolaannya lebih dititik beratkan kepada Bumdes yang ditangani selain tim juga ada swasembada dari masyarakat yang pengecekannya bisa dilakukan dengan monetering langsung serta bisa dipantau dengan mengakses informasi di Aplikasi Seskudes.

9. Pengelolaan Dana Desa Kaduarah Timur

Adapun paparan data di Kaduarah Timur terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kaduarah Timur adalah sebagai berikut:

“Dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, semuanya dilaksanakan dengan baik. Lebih banyak terserap DD kepada masyarakat dari pada ADD, dalam pembangunan yang barusan ini sudah mencapai 22 pembangunan lain lagi dengan pemberdayaan masyarakat.¹⁶⁶”

Artinya, Pengelolaan Dana Desa di Kaduarah Timur lebih diutamakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan baik. Selain itu, pak Sekdes menjelaskan:

¹⁶⁵ Untung Shaleh, *Wawancara*, 21 April 2019.

¹⁶⁶ Qudsi, *Wawancara*, 26 April 2019.

“Sistem pengelolaan dana desa yang mengerjakan harus masyarakat sendiri tidak mengambil dari pihak luar, sedangkan kalau sistem keuangannya adalah dikerjakan terlebih dahulu baru uang akan turun. Artinya keuangan sudah ada di rekening desa. Dari sistem pengelolaannya ada tim masing-masing, baik dari tim perencanaan, tim pelaksanaan, tim arsitektur untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan kuat. Dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat semuanya atas usulan dari masyarakat di bawah. Dari semua usulan akan diambil yang lebih di prioritaskan atau yang lebih penting. Dalam sistem penguasaan dana desa ini lebih banyak pada pembangunan desa dan baru pemberdayaan masyarakat”.¹⁶⁷

Berdasarkan observasi, dalam pengerjaan pembangunan, desa Kaduarah Timur memang lebih mengutamakan tenaga masyarakat sendiri, selain bisa lebih menghemat pengeluaran dan memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat juga hasilnya pasti lebih maksimal karena dikerjakan sendiri.

Cara untuk mengetahui pengelolaan dana desa adalah dengan cara rumusan yang sudah ada di (RAB) lain hal untuk mengetahui apakah sudah sesuai rencana atau belum adalah dengan cara melihat di APBDes, laporan bendahara, kontroling langsung oleh pihak kepala desa dan sekretaris desa, selain itu dari pihak ekspektorat sumenep juga ikut andil dalam pengontrolannya. Dan yang terakhir untuk mengetahui pengelolaan dana desa atau dari anggaran yang lain baik dari masyarakat untuk ingin mengetahuinya dapat dilihat di document balai desa desa karena akan pampang dengan menggunakan banner APBDes.¹⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, untuk pengecekannya adalah dengan mengecek di rumusan di RAB. Selain itu, sekdes juga menyampaikan tentang usaha desa didalam mengembangkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat:

¹⁶⁷ Qudsi, *Wawancara* , 26 April 2019.

¹⁶⁸ Qudsi, *Wawancara* , 26 April 2019.

Sektor ekonomi yang telah dikembangkan oleh Dana Desa adalah simpan pinjam, bengkel sepeda motor dua tempat, obat herbal, selip, camera, dan BRI link.¹⁶⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pengelolaan Dana Desa di Kaduarah Timur lebih diutamakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan anggaran Dana Desa secara maksimal didalam usaha milik Desa.

10. Pengelolaan Dana Desa Pragaan Daya

Adapun paparan data di desa Pragaan Daya terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Pragaan Daya adalah sebagai berikut:

“Kalau bicara tentang dana desa adalah untuk membantu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan sistem pengelolaan dana desa sesuai pada tempatnya yaitu Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pada langkah kerjanya adalah sudah ada petugasnya msing-msing yaitu tim pelaksana kegiatan (TPK), perencanaan, dan keuangan, dan dipertanggung jawabkan, dan di lestarikan untuk infrastruktur. Sistem dalam anggaran perencanaan dana desa yaitu dari Musdes kemudian usulan itu di usulkan di Musdes dan tetap akan di prioritaskan yang paling penting terlebih dahulu tapi tidak dalam artian membuang yang tidak di prioritaskan, layak tidaknya.”¹⁷⁰

Artinya, dana desa adalah sebuah program yang ditangani tim dengan anggaran dari desa yang ditujukan sebagai kegiatan yang bisa membantu desa didalam menyejahterakan rakyatnya yakni; dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan pengelolaannya disesuaikan dengan perencanaan (RKP-APBDES), sesuai dengan penjelasan sekdes Pragaan Daya:

¹⁶⁹ Qudsi, *Wawancara*, 26 April 2019.

¹⁷⁰ Haruju *Wawancara*, 07 Mei 2019.

“Sistem pengelolaan dana desa di Pragaan Daya, sebelum dana itu terbagi menjadi masing masing kegiatan yang sudah ada, sebelumnya sudah tersusun dulu kegiatan yang ada, jadi musyawarah desa disusun RKP setelah RKP disusun APBDES sesuai penganggaran dari masing masing kegiatan yang ada. Baik dari harga bahan dan lainnya. Dari itu semua maka ketemu dengan pagu, baik dari ADD dan penghasilan tetap setelah tersusun semuanya, maka ada musyawarah besar untuk penetapan anggaran dana desa , jika disetujui maka akan dilanjutkan pada persiapan pelaksanaan. Dalam sistem kerja di pengelolaan dana desa adalah lebih mengedepankan dan bahkan menjadi wajib untuk mengambil di desa sendiri, baik dari dai pekerja, bahan, dan teknisinya. Terkecuali tidak ada daerah itu baru bisa mengambil di luar. Karena turjun dari itu semua adalah untuk memberdayakan masyarakat sekitar sehingga manfaatnya sangat jelas menguntungkan pada pihak sendiri.”¹⁷¹

Selain itu, sekdes Pragaan Daya juga menuturkan terkait pengontrolan pengelolaannya:

“Cara untuk mengetahui pengelolaan dana desa adalah dengan cara memonitoring dari desa baik kepala desa, sekretaris dan pendamping desa. Kemudian pihak ekspektorat juga mengontrol terhadap penggunaan dana desa tetapi tidak semua desa yang dikira berpotensi melanggar kode etika pembangunan maka akan ada peninjauan langsung dari pemerintah. Dan Dari laporan program juga menjadi acuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa hal ini dilakukan setiap hari oleh tim pengelola dan bersama aparat desa. Dan jika anggaran berkurang kemudian ada proyek yang harus dilakukan secara cepart untuk daerah Pragaan daya menggunakan anggaran pendapatan desa sendiri melalui masyarakat.”¹⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di desa Pragaan Daya, cara yang dilakukan didalam mengontrol pengelolaan Dana Desa adalah dengan memonitoring langsung ke lingkungan sekitar, hal ini bisa dilakukan oleh kepala desa, sekretaris desa dan pendamping Desa. Sedangkan untuk pengalokasian dana desa itu sendiri di desa Pragaan

¹⁷¹ Haruju Wawancara, 07 Mei 2019.

¹⁷² Haruju Wawancara, 07 Mei 2019.

Daya menurut sekdes desa Pragaan Daya adalah menitik tekankan kepada:

Kemudian sektor ekonomi yang telah di kembangkan oleh Pragaan daya tidak ada karena lebih banyak pada pembangunan desa, baik jalan, paving, dan jembatan. Dengan begitu sangat tidak memberikan pemberdayaan kepada masyarakat.¹⁷³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pengelolaan Dana Desa di Pragaan Daya adalah sebuah kegiatan yang lebih diutamakan untuk pembangunan desa saja.

11. Pengelolaan Dana Desa Preduan

Adapun paparan data hasil penelitian di desa Preduan terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Preduan adalah sebagai berikut:

“Dana desa adalah bersumber dari pemerintah APBN, dan dana desa ini turun, turun juga dengan aturan dana desa. Sehingga tetap dalam keadaan terstruktur. Di kemudian hari jika ada penyelewengan terhadap DD maka akan jelas ketahuan, karena tujuan dan sangkinya akan jelas.”¹⁷⁴

Artinya dana desa adalah dana untuk kesejahteraan desa yang bersumber dari APBN. Yang sudah terstruktur dan prosedural didalam pencairannya. Lebih lanjut sekdes desa Preduan menuturkan:

“Sistem Pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada baik dari pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan dan pencairan. Semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Namun selebihnya ada tim pelaksana dan tim perencanaan dalam desa preduan.”¹⁷⁵

¹⁷³ Haruju Wawancara, 07 Mei 2019.

¹⁷⁴ Fauzy, Wawancara 14 April 2019.

¹⁷⁵ Fauzy, Wawancara 14 April 2019.

Untuk sistem pengeloannya sangat jelas bahwa semua dilaksanakan oleh tim dengan prosedural yang jelas. Selain itu, sekdes desa Prenduan juga menambahkan:

“Untuk mengetahui pengelolaan penggunaan dana desa adalah dengan cara kontrol langsung ke lapangan dan dengan laporan surat pertanggung jawaban (SPJ) selain itu dapat juga dilakukan dengan ikut andilnya masyarakat desa prenduan untuk mengontrol terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat”.¹⁷⁶

Berdasarkan hasil observasi peneliti di desa Prenduan, untuk mengetahui program dana desa berjalan dengan baik adalah dengan mengecek langsung ke lapangan.

Adapun terkait program yang dilaksanakan di desa Prenduan, pak sekdes desa Prenduan menuturkan:

“Sektor ekonomi yang di kembangkan oleh dana desa adalah pinjaman modal untuk UKM, pengaliran air bersih, mitra finansial. Semuanya sudah berjalan dengan lancar, sehingga perlu penerapan lanjutan lebih berkembang lagi”.¹⁷⁷

Artinya Dana Desa adalah Dana untuk program kesejahteraan Desa yang bersumber dari APBN. Yang sudah terstruktur dan prosedural didalam pencairannya yang dikembangkan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat; usaha milik desa.

12. Pengelolaan Dana Desa di Desa Jaddung

Tidak bersedia memberikan data.

13. Pengelolaan Dana Desa di Aeng Panas

¹⁷⁶ Fauzy, *Wawancara* 14 April 2019.

¹⁷⁷ Fauzy, *Wawancara* 14 April 2019.

Adapun paparan data hasil penelitian di desa Prenduan terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Aeng Panas adalah sebagai berikut:

“Dana desa terjadi peningkatan yang sangat luar biasa, dampak dana desa adalah untuk infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sangat jauh lebih maju ketimbang tahun tahun sebelumnya. Karena menyentuhnya pembangunan dan pembedayaan masyarakat sangat terasa. Secara tidak langsung bicara soal infrastruktur bukan hanya soal aspal, jalan, paving tapi adalah akses terhadap ekobnomi masyarakat akses dalam pemberdayaan masyarakat. Sehiingga dengan infrastruktur yang baik maka akan berdampak peningkatan pelayanan masyarakat dan manfaat masyarakat itu sendiri”

Artinya, Dana Desa di Desa Aeng Panas adalah program didalam menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan yang dikhususkan kepada infrastruktur.

Selain itu, sekdes desa Aeng Panas menuturkan terkait pengelola:

“Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah sudah melaksanakan pelatihan-pelatih Bimtek dan pengajian dan sanagt membantu kerukunan ummat beragama.”¹⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tim pengelola Dana Desa sudah diikut sertakan dalam pelatihan.

Adapun sistem pengelolaannya, menurut Sekdes Desa Aeng Panas:

“Sistem pengelolaan dana desa adalah sebagai mana diatur oleh Negara, bahwa ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kontroling. Jadi perencanaan itu dimulai dari Musdus seelah Musdus baru ke Musdes Desa. Sebelum di tetapkan maka di konsultasikan sama BPD apakah yang diusulkan oleh masyarakat itu adalah keinginan atau kebutuhan, maka BPD akan memutuskan dimana yang paling layak untuk dilaksanakan, maka dibawahlah ke musdes untuk ditetapkan manjadi PERDES, setelah jadi Perdes

¹⁷⁸ Zubairi, *Wawancara* 25 April 2019.

maka tinggal pelaksanaan. Hasil dari total pendapatan masyarakat itu antara lain Dana Desa, alokasi Dana Desa, dan hasil Desa.”¹⁷⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem pengelolaan Dana di Desa Aeng Panas dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan Negara.

Lebih lanjut sekdes desa Aeng Panas menuturkan:

“Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa ini adalah dengan cara internal dan eksternal. Internalnya itu adalah dari kita dengan cara info APBDes, dan faktor eksternal. Selain itu untuk memberitahukan kepada masyarakat adalah dengan cara Radio FM desa guna masyarakat bisa tau langsung dengan program yang sudah dilaksanakan dengan baik.”¹⁸⁰

Adapun sistem pengelolaannya berdasarkan hasil wawancara dan observasi adalah dengan dua sebab; *Internal* dan *Eksternal*. Sedangkan untuk sektor pengelolaannya, lebih lanjut sekdes desa Aeng Panas menjelaskan:

“Sektor ekonominya adalah lebih kepada penerapan pelatihan-pelatihan, bimtek dan lainnya, tidak dengan produk dan unit-unit karena masyarakat Aeng panas lebih meminta infrastruktur dari pada pemberdayaan masyarakat.”¹⁸¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengelolaan dana desa di desa Aeng Panas adalah program dari negara yang pengelolaannya dengan sistem internal (dari aparat desa) eksternal (diumumkan ke khalayak umum) yang dikhususkan kepada pengelolaan pembangun Desa, seperti; Infrastruktur sesuai dengan kesepakatan umum.

14. Pengelolaan Dana Desa di Karduluk

¹⁷⁹ Zubairi, *Wawancara* 25 April 2019.

¹⁸⁰ Zubairi, *Wawancara* 25 April 2019.

¹⁸¹ Zubairi, *Wawancara* 25 April 2019.

Adapun paparan data hasil penelitian di Desa Karduluk terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Karduluk adalah sebagai berikut:

“Dana desa adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pusat APBN, sedangkan peruntukannya lebih pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau DD tidak boleh pada oprasioanal kantor, misalnya juga DD bisa diperuntukannya pemberdayaan masyarakat seperti pinjaman modal usaha.”¹⁸²

Artinya, dana desa adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh negara untuk dikelola dalam pengembangan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut pak sekdes, sistem pengelolaannya adalah melalui:

“Sistem pengelolaan Dana Desa adalah ada tim pengelola kegiatan, ada tim perencanaan, ada tim keuangan. Sedangkan miksnismenya adalah dari musyawarah desa kemudian di tetapkan. Jadi semua program yang akan dijalani sudah mengikuti apa yang sudah di musyawarahkan. Anggaran yang tidak terduaga meliputi bencana sehingga akan mengambil keuangan di silfa atau sisa hasil usaha. Kalau ada keuangan diluar dari yang sudah di tetapkan harus diberita acarakan, artinya berita acara perubahan tapi perubahan itu di perbolehkan hanya satu kali dalam 1 tahun.”¹⁸³

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa pengelolaan dana desa adalah sebuah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh tim. Sedangkan untuk mengetahui cara pengelolaannya menurut sekdes desa Karduluk adalah:

“Cara untuk mengetahui pengelolaan dana desa di desa karduluk adalah dengan cara Kontroling langsung dalam catatan kegiatan sudah berjalan. Selain dari kontroling adalah dengan cara laporan , apakah sudah terserap semua apamsih belum, kemudian bapak camat juga ikut memonetering setiap 3 bulan dan dari pemerintah kabupaten melewati badan ekspektorat dengan catatn jika ada hal- hal yang di duga tidak sessuai aturan dan sesuatu waktu BPK

¹⁸² Suaidi, *Wawancara* 28 April 2019.

¹⁸³ Suaidi, *Wawancara* 28 April 2019.

akan turun juga yang di kontrol dari pihak BPK dan Ekspektorat itu adalah surat pertanggung jawaban (SPJ) dan setelah itu kroscek ke lapangan langsung. Jika ada pelanggaran maka harus mengembalikan anggaran kepada kas desa.”¹⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, cara yang dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di desa Karduluk sudah berjalan adalah dengan memonitoring dan di cek dalam bentuk laporan.

Sedangkan untuk sektor ekonomi yang dikelola menurut pak sekdes desa Karduluk adalah:

“Sektor ekonomi yang mengambil pada dana desa adalah foto copy sebesar 50 juta, selain itu membuat pelatihan wirausaha yang mendatangkan tenaga ahli guna memberikan *skill* dan menambah bidang usaha. Selebihnya memang lebih pada pembangunan Desa karena sesuai dengan permintaan masyarakat sekitar.”¹⁸⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Karduluk adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh negara untuk dikelola dalam pengembangan pembangunan Desa; infrastruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat; memberikan pelatihan kepada masyarakat agar bisa mengembangkan *skill* nya.

Esensi dari sebuah pembangunan dan pemberdayaan adalah berdaya guna bagi yang menikmati pembangunan itu sendiri dan dapat memanfaatkannya. Dari dasar inilah penelitian dilakukan di kecamatan Pragaan dalam rangka melihat efektifitas pembangunan desa yang besumber dari dana desa. Penelitian dilakukan dengan melakukan

¹⁸⁴ Suaidi, *Wawancara* 28 April 2019.

¹⁸⁵ Suaidi, *Wawancara* 28 April 2019.

observasi lapangan, wawancara serta dokumentasi yang berlangsung di 14 Desa yang ada di kecamatan Pragaan antara lain :

1. Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi di Desa Sendang

Adapun paparan data hasil penelitian di Desa Karduluk terkait dengan Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi di Desa Sendang adalah sebagai berikut:

“Dana desa dalam pengelompokanya terdiri dari dua bidang salah satunya adalah bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk desa sendang pemberdayaanya melalui tambak garam dan udang. Dengan begitu desa sudah memberikan pelayanan pemberdayaan masyarakat. Tidak melanggar kode etik dana desa yang sudah sesuai aturan. Untuk daerah sendang dana desa masih belum cukup dikarenakan tidak meratanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.”¹⁸⁶

Artinya dalam sistem dana desa itu sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga desa itu hanya sebagai penggerak yang sudah jelas dalam aturan perundang-undangan dana desa. Dengan itu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi belum cukup maksimal dikarenakan masih terlalu banyak pada pembangunan desa. Dan masyarakat juga dapat mengetahui alur dana desa dari pemerintah terdekat, artinya diikutsertakan dalam capaian dari dana desa itu sendiri.

Selain itu Sekretaris desa sendang menuturkan terkait dengan sistem pengelolaan dana desa dalam pengembangan ekonomi.

¹⁸⁶ Imaiel Wawancara, 27 April 2019

“Sistem pengelolaan dana desa dalam pengembangan ekonominya adalah dengan cara lewat Bumdes. Kemudian di kelola oleh tim ahli wirausaha untuk dapat memperoleh hasil usaha yang maksimal, sehingga akan dapat berkembang seterusnya. Sekretaris desa juga menuturkan bahwa masyarakat desa sedang sangat antusias dalam pengembangan ekonomi ini.”¹⁸⁷

Menurut salah seorang masyarakat bernama Fauzi menyatakan bahwa pembangunan yang berdasarkan dari dana desa banyak melakukan pembangunan fisik untuk kebutuhan desa seperti pagar dan balai desa, padahal balai desa masih dalam keadaan baik-baik saja.¹⁸⁸ Disisi lain penulis juga mewawancarai Lukman masyarakat desa setempat. Menurut bapak Lukman Pembangunan Desa lebih diutamakan untuk pembangunan fisik karena pasca konflik desa tidak melakukan pembangunan yang signifikan sehingga pembangunan fisik terus dipacu lebih di tingkatkan lagi, tapi tidak melupakan dalam pengembangan ekonominya.

Dari hasil wawancara dan Observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik memang diperlukan akan tetapi diharapkan juga berimbang dengan pembangunan ekonomi yang bersifat pemberdayaan. Hal ini perlu berimbang sehingga pembangunan manusia juga dapat berimbang antara pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi menjadi penting dalam rentang waktu jangka panjang sehingga setiap kepala Keluarga memiliki taraf ekonomi yang mapan.

¹⁸⁷ Imaiel Wawancara, 27 April 2019

¹⁸⁸ Fauzi Hasil Wawancara, 28 April 2019

2. Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi di Desa Rombasan

“Dana desa merupakan dana yang diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa rombasan, namun dalam pelaksanaan pengalokasan dana desa ini masih lebih kepada pembangunan desa tidak kepada pengembangan ekonominya, dalam artian masih kurang. Dikarenakan beberapa dusun di desa rombasan masih kurang maksimal dan dalam pemerataan pembangunan. Kemudian pada sektor ekonomi yang dikembangkan oleh dana desa di desa rombasan adalah lapangan futsal, pelatihan-pelatihan yang terkait dengan Pengembangan ekonomi, ada yang kerjasama antar desa (Klompok tani sumber urip) sedangkan produk unggulan adalah buah naga, stik, es krim, selai, seni pahatan kayu untuk hias lampu”.¹⁸⁹

Artinya dalam sistem dana desa itu sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah namun yang di prioritaskan oleh pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masih sangat kurang. Desa tidak memberikan celah untuk lebih memaksimalkan dalam pemberdayaan ekonominya. Dengan itu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi belum cukup maksimal dikarenakan masih terlalu banyak pada pembangunan desa. Dan masyarakat juga dapat mengetahui alur dana desa dari pemerintah terdekat, artinya diikutsertakan dalam capaian dari dana desa itu sendiri.

Menurut salah seorang masyarakat yang bernama Edi Rahaman menyatakan bahwa pembangunan yang berdasarkan dari dana desa banyak melakukan pembangunan fisik untuk kebutuhan desa seperti jalan raya aspal, paving bahkan jembatan, kesemuanya itu masih dalam

¹⁸⁹ Romlatur Hikmah, *Wawancara* 21 April 2019

keadaan baik-baik saja.¹⁹⁰ Disisi lain penulis juga mewawancarai masyarakat desa setempat. Menurut bapak yang tidak mau disebutkan namanya Pembangunan Desa lebih diutamakan untuk pembangunan fisik tapi tidak mengabaikan pada pemberdayaan ekonommi karena hal ini yang sangat penting tentunya.

Dari hasil wawancara dan Observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik memang diperlukan akan tetapi diharapkan juga berimbang dengan pembangunan ekonominya yang bersifat pemberdayaan. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan keseimbangan anatar pembangunan desa dan pemberdyaan msyarakat. Kalau lebih lagi dalam pemberdayaan masyarakat ini lebih menjanjikan dari infrastruktur karena masyarakt dapat sejahtera dan mandiri dengan adanya pemberdayaan.

3. Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi di Desa Sentol Laok

Pengelolaan dana desa adalah program Pembangunan dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan disini akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonominya. Dimana yang menjadi informan adalah sekretaris desa yang faham betul terhadap kondisi desa tersebut, tidak hanya itu peneliti melibatkan informan dari masyarakat di desa ini guna mendapatkan data lebih baik kembali.

¹⁹⁰ Edi Rahman Hasil *Wawancara*, 281 April 2019

Selain itu Sekretaris desa Sentol laok menuturkan terkait dengan sistem pengelolaan dana desa dalam pengembangan ekonomi.

“Dana desa adalah lebih di prioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan sistem pengelolaan dana desa di desa Sentol laol adalah ada TPK (tim pengelola kegiatan) atau tim pelaksana kegiatan, jadi kepala desa tidak ikut andil dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam Sektor ekonomi yang sudah dikembangkan oleh desa sentol laok melalui dana desa adalah dengan program “ Sentol Makmur “ yang bergerak di bidang simpan pinjam dan produk air kemesan. Sedangkan produk unggulan yang ada di desa sentol laok adalah camilan kripik singkokng”¹⁹¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana Desa di desa Sentol laok Adalah program yang terdapat tim didalam pengelolaannya, yang tujuannya direncanakan untuk di realisasikan sebagai wujud pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Namun dalam pemberdayaan masyarkat ini dalam pengembangan ekonominya hanya simpan pinjam modal yang berjalan, sedangkan produk Air kemesan akan segera di laksanakan. Kemungkinan dengan bertambahnya air kemesan ini nanti dalam pengembangan ekonominya, diharapkan akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa sentol laok.

Kemudian Menurut salah seorang masyarakat yang bernama Khairul Anam menyatakan bahwa pembangunan yang berdasrakan dari dana desan belum menyeluruh di buktikanya di beberapa tempat pembangunan desa belum merata seperti aspal, paving dan pelesetarian jembatan, disisi lain dalam pengembangan ekomomi sudah sangat membantu terhadap masyarakat dalam berwirausaha, kekuranganya

¹⁹¹ Subahri, *Wawancara* 20 April 2019

terkadang dari sebagian masyarakat uang simpan pinjam yang dari desa tidak digunakan sebaik mungkin akan tetapi lebih memlih untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁹²

Dari hasil wawancara dan Observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik desa belum merata, kemudian pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembang ekonomi sudah cukup berhasil tapi masih perlu pengembangan dan arahan kepada nasabah dan masyarakat umumnya untuk lebih berfikir jangka panjang dengan cara berwirausaha.

4. Efektifitas penggunaan dana desa dalam Pengembangan Ekonomi di desa Sentol Daya

“Dana desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam sistem pengelolaan dana desa di desa sentol dejuh yaitu dikerjakan oleh tim pengadaan barang dan tim pelaksana, dengan cara swakelola oleh masyarakat sekitar, sehingga manfaatnya semakin jelas bagi msyarakat terkecuali msyarakt tekhnisnya tidak ada yang bisa di desa tersebut maka boleh ngundang terkait material yang akan dijadikan pembangunan harus bisa memberdayakan masyarakat meski hanya sebatas kebutuhan bahan pekerja, contoh semen, jika masyarakat sekitar ada yang jual semen maka tidak boleh membeli diluar desa tersebut karena memang tujuanya adalah memberdayakan kemsकिन dan menimalisir angka kemiskinan.”¹⁹³

Artinya mikanisme dana desa itu sudah jelas bahwa dana desa itu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dana desa itu tidak hanya untuk untuk pembangunan desa saja melainka pemberdayaan masyarakat harus banding arah dengan pembangunan desa, dengan cara

¹⁹² Khairul Anam , *Wawancara* 20 April 2019

¹⁹³ Mukmin S.Pdi *Wawancara* 20 April 2019

begitu masyarakat akan mendapatkan dua sisi kebruntungan yaitu dari infrasturktur di pambangunan desanya dan pemberdayaan masyarakat di pengembangan ekonominya. Di desa sentol daya ini lebih memprioritaskan pada pembangunan desanya sedangkan dalam pemberdayaan masyaratnya, yaitu melalui pekerja pembangunan desa. Hal ini sangat membantu di pengembangan ekonominya, dimana pengembangan ekonominya tersebut berfous pada tambak garam saja, selain dari tambak garam masih belum ada.

Kemudian Menurut salah seorang masyarakat yang bernama Ach Fauzi, S.pdi menyatakan bahwa pembangunan yang berdasrakan dari dana desa belum menyeluruh di buktikanya di beberapa tempat pembangunan desa belum merata seperti aspal dan paving disisi lain dalam pengembangan ekomomi sudah sangat membantu terhadap masyarakat dalam pengembagan ekonominya yaitu dengan tambak garam, akan tetapi tambak garam tersebut masih sangat kurang dikarenakan tambak garam tersebut adalah musiman tidak bisa berkepanjangan dengan ini maka di perlukan tambahan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonominya guna memeproleh kesejahteraan bersama.¹⁹⁴

Dari hasil wawancara dan Observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik desa belun merata, kemudian pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengambanga ekonomi sudah cukup berhasil

¹⁹⁴ Ach Fauzi, S.Pdi *Wawancara* 20 April 2019

tapi masih perlu pengembangan dan arahan kepada nasabah dan masyarakat umumnya untuk lebih berfikir jangka panjang dengan cara berwirausaha.

5. Efektifitas penggunaan dana desa dalam Pengembangan Ekonomi di Desa Pakamban Daya

Adapun paparan data hasil penelitian di Desa Karduluk terkait dengan Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi di Desa Pakamban Daya adalah sebagai berikut:

“Dana desa adalah untuk pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat. Desa pakamban daya ini dalam pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan lancar baik dari pengembangan ekonominya dan pembangunan desa karena sudah terdapat tim masing-masing baik dari pelaksana dan perencanaan dan di pembangunan desanya bahkan dananya kurang untuk pengembangan ekonominya dan membuka agen BRI link, untuk mengetahui adalah dengan cara terjun langsung ke lapangan setiap bulanya dan ditetapkan pada acara simpan pinjamnya.”¹⁹⁵

Artinya dalam sistem dana desa itu sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat namun yang di prioritaskan oleh pemerintah adalah pemberdayaan ekonomi. Karena dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi desa itu bisa maju dan berkembang. Dengan itu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi perlu dimaksimalkan kembali, kekurangan terhadap kinerja perlu evaluasi untuk menciptakan yang lebih baik.

Sedangkan Menurut salah seorang masyarakat yang bernama Ach Mujtaba, S.Ud menyatakan bahwa Pengembangan ekonomi yang ada di desa Pakamban daya ini perlu tahapan-tahapan dan evaluasi kembali,

¹⁹⁵ Hafidz, S.Pdi *Wawancara* 20 April 2019

karena masyarakat tidak semuanya tau akan pengembangan ekonomi yang ada di desa pakamban daya ini lebih-lebih pada masyarakat awam (orang tidak mengerti).¹⁹⁶ Disisi lain peneliti juga mewawancarai masyarakat desa setempat yang bernama bapak Santoso. Menurut bapak perlu ada penambahan di pemberdayaan msyarakat atau pengembangan ekonomi untuk lebih baik dan efektif.¹⁹⁷ Sehingga perekonomian masyarakat desa pakamban daya ini bisa lebih lancar dan sentosa.

Dari hasil wawancara dan Observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik desa juga perlu untuk diteruskan, kemudian pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan lagi.

6. Efektifitas penggunaan dana desa dalam Pengembangan Ekonomi di desa Pakamban Laok

“Dana desa itu merupakan dana yang di alokasikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku nomor tentang desa 06 tahun 2014, kemudian pada waktu itu diikuti juga dengan peraturan pemerintah tentang dana desa nomo 60 tahun 2015 yang bersumber dari APBN yang langsung ke rekening kas desa melalui bendahara kabupaten. Dana desa itu sendiri adalah dana untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Di pemberdayaan masyarakat ini adalah pengembangan ekonominya. Desa pakamban laok adalah desa yang berdekatan dengan kecamatan pragaan dan balai desanya berada di dekat jalan provinsi sehingga dalam pengembangan ekonominya ini sangat bisa untuk memberdayakan masyarakat dan mensejahterakan msyarakat, pengembangan ekonomi desa pakamban laok adalah konveksi dan unit jasa keuangan, jasa catering, unit pengadaan barang dan jasa, dan itu bisa menyerap tenaga kerja kurang lebih 30 orang secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi sudah berjalan sekitar 2 tahun, pengembangan ekonomi lainnya adalah koperasi, unit simpan

¹⁹⁶ Ach Mujtaba, S.Ud Wawancara 20 April 2019

¹⁹⁷ Santoso Wawancara 20 April 2019

pinjam kwt asri, koperasi wanita syariah dan kegiatan-kegiatan ekonomi lain adalah ada pada pertanian dan tambak garam. Dan kesemuanya dari pengamban ekonomi ini sudah berjalan lancar dengan omzet secara keseluruhan 50 juta rupiah.”¹⁹⁸

Artinya dalam sistem dana desa ini sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga desa itu hanya sebagai penggerak yang sudah jelas dalam aturan perundang-undangan dana desa. Dengan itu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi belum cukup optimal tapi masih ada kendala-kendala yang menjadi baha evaluasi pihak aparat desa pakamban laok adalah Tekhnisi atau pemandu yang harus mendatangkan dari luar untuk memperoleh pengalaman ilmu terkait dengan pengembangan ekonomi ini dengan begitu maka desa akan semakin sejahtera.

Kemudian Menurut salah seorang masyarakat yang bernama Desty S.Sy menyatakan bahwa pembangunan yang berdasrakan dari dana desa perlu untuk ditingkatkan baik dengan cara perbaikan atau pembenahan ulang, karena di daerah-daerah terpencil masih kurang merata pembangunan desa, diisisi lain dalam pengembangan ekomomi sudah sangat membantu terhadap masyarakat dalam pengembagan ekonominya, hanya perlu wawasan dan pengalaman baru untuk lebih baik mendesain usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat.¹⁹⁹

Dari hasil wawancara dan Observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik memang diperlukan untuk dapat menjaga kesatbilan

¹⁹⁸ Hakam Sp.,S.Pdi *Wawancara* 15 April 2019

¹⁹⁹ Desty S.Sy *Wawancara* 15 April 2019

perekonomian akan tetapi diharapkan juga berimbang dengan pembangunan ekonomi yang bersifat pemberdayaan. Hal ini perlu berimbang sehingga pembangunan manusia juga dapat berimbang antara pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi menjadi penting dalam rentang waktu jangka panjang sehingga setiap kepala Keluarga memiliki taraf ekonomi yang mapan.

7. Efektifitas penggunaan dana desa dalam Pengembangan Ekonomi di desa Pragaan Laok

“Dana desa adalah dana yang diperuntukkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Di pemberdayaan masyarakat ada Sektor ekonomi yang menggunakan dana desa adalah jual beli garam, tidak ada yang lain karena “*korang pessenah cong* “ andai uangnya banyak maka akan lebih banyak lagi dalam pengembangan ekonominya. Setahun ini untuk desa praagan laok lebih pada pembangunan desa.”²⁰⁰

Artinya dalam sistem dana desa ini sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga desa itu hanya sebagai penggerak yang sudah jelas dalam aturan perundang-undangan dana tentang dana desa. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat yang melewati dana desa ini adalah pengembangan ekonomi, pengembangan ekonomi yang ada di desa pragaan laok ini sangat minim karena lebih banyak di pambangunan desa seperti, jalan, paving, jembatan , drainase dan lainnya. Sebtulnya yang harus di genjot adalah di pemberdayaan masyarakat seperti yang sudah di himbau oleh pemereintah dalam undang-undang desa, atau paling tidak sebanding antara pemabanguna desa dan

²⁰⁰ Ach. Fauzi, *Wawancara*, 30 April 2019

pemberdayaan masyarakat. Karenanya perlu perbaikan-perbaikan untuk dapat memberikan pemberdayaan ekonomi yang baik.

Kemudian Menurut salah seorang masyarakat yang bernama Ach Lutfi menyatakan bahwa pembangunan yang berdasarkan dari dana desa belum menyeluruh di buktikanya di beberapa tempat pembangunan desa belum merata seperti perbaikan jalan, pelestarian paving, jembatan. Disisi lain dalam pengembangan ekomominya sangat kurang dikarenakan masyarakat pragaan laok masih belum merasakan pengembangan ekonmi tersebut dan ada juga yang belum tau kalau ada pemberdayaan masyarakat lewat pengembangan ekonomi.²⁰¹

Padahal pengembangan ekonomi ini sangat membantu sekali terhadap kesejahteraan msyarakat pragaan laok.

Dari hasil wawancara dan Observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik perlu untuk ada pemerataan pembangunan , kemudian pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan ekonomi perlu juga ada tahapan-tahapan pengembangan ekonomi lebih optimal lagi, sehingga msyarakat dapat merasakanya lebih baik lagi.

8. Efektifitas penggunaan dana desa dalam Pengembangan Ekonomi di desa Larangan Perreng

“Dana desa adalah terdiri dari dua bidang pembangunan dan pemberdayaan jika ada kelebihan dana maka tidak boleh untuk di campu adukan pada anggaran yang lain, karena hal itu akan melanggar kode etik dana desa. Untuk daerah larangan perreng dana desa masih belum cukup dikarenakan tikda meratanya pembangunan dan pemberdayaan msyarakat, kemudian Sektor

²⁰¹ Ach.Lutfi *Wawancara*, 30 April 2019

ekonomi yang menggunakan dana desa adalah pengembangan ekonomi, diantaranya : unit barang dan jasa, budi daya ikan air tawar seperti lele, ikan,dan udang, peternakan baik petelur atau daging dan yang terakhir perkreditan yang berbentuk apa saja.”²⁰²

Artinya dalam sistem dana desa ini sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sehingga desa itu hanya sebagai penggerak yang sudah jelas dalam aturan perundang-undangan dana desa. Dengan itu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi sudah cukup optimal dibutikanya masyarakat iikut aktif dalam pengelolaan pengembangan ekonomi serta menjadi bagian darinya.

Sedangkan Kemudian Menurut salah seorang masyarakat yang bernama Busthami menyatakan bahwa pembangunan yang berdasarkan dari dana desa sudah merata baik dari jalan aspal, paving , jembatan dan fasilitas kantor balai desa, disisi lain dalam pengembangan ekomominya Sudah bergerak namun masih kurang berkembang dan menjelaskan kepada msyarakat awam (Orang yang tidak tau) sehingga tidak merasakan bahkan tidak tau dengan adanya pengembangan ekonomi ini, tapi mayoritas sudah merasakanya.²⁰³

Dari hasil wawancara dan Observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik memang diperlukan akan tetapi diharapkan juga berimbang dengan pembangunan ekonominya yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan keseimbangan anatar pembangunan desa dan pemberdyaan msyarakat.

²⁰² Untung Shaleh, S.Pd Wawancara, 21 April 2019

²⁰³ Busthami Wawancara, 21 April 2019

Kalau lebih lagi dalam pemberdayaan masyarakat ini lebih menjanjikan dari infrastruktur karena masyarakat dapat sejahtera dan mandiri dengan adanya pemberdayaan.

9. Efektifitas penggunaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi di Desa Jaddung

Tidak bersedia memberikan informasi dan data.

10. Efektifitas penggunaan dana desa dalam Pengembangan Ekonomi di desa Kaduarah Timur

“Dana desa adalah dana yang untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat atau pengembangan ekonomi. Desa Kadurah timur ini adalah desa yang berada di perbatasan pameksan Sumenep, sehingga menjadikan pembangunan desa dan pengembangan ekonomi tolak ukur dengan desa pameksan yang ada disebaliknya. Namun kalau segi pembangunan desa, kaduarah timur sudah cukup merata tinggal beberapa tempat saja yang butuh perhatian khusus, selain itu dari Sektor ekonomi yang telah dikembangkan oleh dana desa kaduarah timur adalah simpan pinjam, bngkel sepeda motor dua tempat, obat herbal, selip, camera, dan BRI link semuanya berjalani sampai sekarang. Alhamdulillah untuk pengembangan ekonomi di desa kadaurah timur ini dapat dirasakan oleh masyarakat desa kadurah timur, dibuktikanya dengan rutinitas klompok ekonomi yang setiap minggunya aktif mengikutinya. Tidak hanya itu cairan PKH ditangani langsung oleh tim Pengembangan ekonomi sehingga tidak perlu ke bank atau ATM tedekat.”²⁰⁴

Artinya dalam sistem dana desa itu sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat namun yang di prioritaskan oleh pemerintah adalah pemberdayaan ekonomi. Karena dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi desa itu bisa maju dan berkembang. Dengan itu pemberdayaan masyarakat melalui

²⁰⁴ Qudsi, S.Pdi Wawancara , 26 April 2019

pengembangan ekonomi perlu dimaksimalkan kembali, kekurangan terhadap kinerja perlu evaluasi untuk menciptakan yang lebih baik.

Kemudian Menurut salah seorang masyarakat yang bernama fatmawati menyatakan bahwa pembangunan yang berdasarkan dari dana desa sudah berjalan dan menyeluruh akan tetapi masih ada beberapa tempat yang perlu perhatian khusus tapi secara umum pembangunan desa sudah berkembang. Disisi lain dalam pengembangan ekonominya masyarakat sudah sangat merasakan akan manfaat bagi saya sendiri dan bagi masyarakat yang lain masuknya saya adalah adanya teknisi atau fasilitator untuk unit usaha PKK untuk lebih berkembang lagi.²⁰⁵

Dari hasil wawancara dan Observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik perlu untuk ada pemerataan pembangunan , kemudian pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan ekonomi perlu juga ada tahapan-tahapan pengembangan ekonomi lebih optimal lagi, sehingga masyarakat dapat merasakannya lebih baik lagi.

11. Efektifitas penggunaan dana desa dalam Pengembangan Ekonomi di desa Pragaan Daya

“Kalau bicara tentang dana desa adalah untuk membantu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan sistem pengelolaan dana desa sesuai pada tempatnya yaitu Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pada langkah kerjanya adalah sudah ada petugasnya masing-masing yaitu tim pelaksana kegiatan (TPK), perencanaan, dan

²⁰⁵ Fatmawati Wawancara , 26 April 2019

keuangan, dan dipertanggung jawabkan, dan di lestarikan untuk infrastruktur. Sistem dalam anggaran perencanaan dana desa yaitu dari Musdus kemudian usulan itu di usulkan di Musdes dan tetap akan di prioritaskan yang paling penting terlebih dahulu tapi tidak dalam artian membuang yang tidak di prioritaskan, layak tidaknya. Kemudian dari sektor ekonomi yang telah di kembangkan oleh Pragaan daya tidak ada karena lebih banyak pada pembangunan desa, baik jalan, paving, dan jembatan. Dengan begitu sangat tidak memberikan pemberdayaan kepada masyarakat.”²⁰⁶

Artinya dalam sistem dana desa ini sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga desa itu hanya sebagai penggerak yang sudah jelas dalam aturan perundang-undangan dana tentang dana desa. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat yang melewati dana desa ini adalah pengembangan ekonomi, pengembangan ekonomi yang ada di desa pragaan daya ini tidak ada karena lebih banyak di pembangunan desa seperti, jalan, paving, jembatan, drainase dan lainnya. Sebetulnya yang harus di genjot adalah di pemberdayaan masyarakat seperti yang sudah di himbau oleh pemereintah dalam undang-undang desa, atau paling tidak sebanding antara pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya perlu perbaikan-perbaikan untuk dapat memberikan pemberdayaan ekonomi yang baik kepada masyarakat pragaan daya.

Menurut salah seorang masyarakat yang bernama Ubaidillah menyatakan bahwa pembangunan yang berdasrakan dari dana desa banyak melakukan pembangunan fisik untuk kebutuhan desa seperti jalan raya aspal, paving bahkan jembatan, dan lainuya, namun untuk

²⁰⁶ Haruju Wawancara, 07 Mei 2019

pemberdayaan masyarakat desa atau pengembangan ekonominya di pragaan daya tidak ada sama sekali sehingga masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan lewat pengembangan ekonomi ini. Padahal di pengembangan ekonomi ini sangat berperan penting terhadap kemandirian masyarakat dan desa itu juga. Karena sifatnya jangka panjang dan berkembang.²⁰⁷ Kalau tetap pada pembangunan desa maka suatu saat jika termakan waktu maka aspal, paving dll akan rusak habislah dana yang besar itu. Disisi lain penulis juga mewawancarai masyarakat desa setempat yang bernama sufyan. Menurutnya Pembangunan Desa lebih diutamakan untuk pembangunan fisik tapi tidak mengabaikan pada pemberdayaan ekonommi karena hal ini yang sangat penting tentunya.²⁰⁸

Dari hasil wawancara dan Observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik perlu untuk ada pemerataan pembangunan , kemudian pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan ekonomi perlu juga ada tahapan-tahapan pengembangan ekonomi lebih optimal lagi, sehingga msyarakat dapat merasakanya lebih baik lagi.

12. Efektifitas penggunaan dana desa dalam pegembangan Ekonomi di desa Prenduan

“Dana desa adalah bersumber dari pemerintah APBN, dan dana desa ini turun, turun juga dengan aturan dana desa. Sehingga tetap dalam keadaan terstruktur. Di kemudian hari jika ada penyelewengan terhadap DD maka akan jelas ketahuan, karena tujuan dan sangkinya akan jelas. Sedangakn Sektor ekonomi yang

²⁰⁷ Ubaidillah Wawancara, 07 Mei 2019

²⁰⁸ Sufyan Wawancara, 07 Mei 2019

di kembangkan oleh dana desa adalah pinjaman modal untuk UKM, pengaliran air bersih, mitra finansial. Semuanya sudah berjalan dengan lancar, sehingga perlu penerapan lanjutan lebih berkembang lagi.”²⁰⁹

Artinya dalam sistem dana desa ini sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sehingga desa itu hanya sebagai penggerak yang sudah jelas dalam aturan perundang-undangan dana desa. Dalam pembangunan desa masih kurang menyeluruh dikarenakan masih ada beberapa dusun yang masih belum tersentuh. Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi sudah cukup optimal dibutikanya masyarakat ikut aktif dalam pengelolaan pengembangan ekonomi serta menjadi bagian didalamnya.

Kemudian Menurut salah seorang masyarakat yang bernama Fitroqil akhbar menyatakan bahwa pembangunan yang berdasarkan dari dana desa perlu untuk ditingkatkan baik dengan cara perbaikan atau pembenahan ulang, karena di daerah-daerah terpencil masih kurang merata pembangunan desa, disisi lain dalam pengembangan ekonomi sudah sangat membantu terhadap masyarakat dalam pengembangan ekonominya, hanya perlu wawasan dan pengalaman baru untuk lebih baik mendesain usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat.²¹⁰

Dari hasil wawancara dan Observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik perlu untuk ada pemerataan pembangunan, kemudian pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan ekonomi perlu

²⁰⁹ Fauzy lubstangsagara *Wawancara* 14 April 2019

²¹⁰ Fitroqil akhbar *Wawancara* 14 April 2019

juga ada tahapan-tahapan pengembangan ekonomi lebih optimal lagi, sehingga masyarakat dapat merasakannya lebih baik lagi.

13. Efektifitas penggunaan dana desa dalam Pengembangan Ekonomi di desa Aeng Panas

Pengelolaan dana desa adalah program Pembangunan dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan disini akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonominya. Dimana yang menjadi informan adalah sekretaris desa yang faham betul terhadap kondisi desa tersebut, tidak hanya itu peneliti melibatkan informan dari masyarakat di desa ini guna mendapatkan data lebih baik kembali guna mendapatkan data lebih baik kembali.

Dana desa terjadi peningkatan yang sangat luar biasa, dampak dana desa adalah untuk infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sangat jauh lebih maju ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Karena menyentuhnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat terasa. Secara tidak langsung bicara soal infrastruktur bukan hanya soal aspal, jalan, paving tapi adalah akses terhadap ekonomi masyarakat akses dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga dengan infrastruktur yang baik maka akan berdampak peningkatan pelayanan masyarakat dan manfaat masyarakat itu sendiri. Sedangkan dalam Sektor ekonominya adalah lebih kepada penerapan pelatihan-palatihan, bimtek dan lainnya, tidak dengan produk dan unit-unit karena masyarakat Aeng panas lebih meminta infrastruktur dari pada pemberdayaan masyarakat.²¹¹

Artinya dalam sistem dana desa ini sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga desa itu hanya sebagai penggerak yang sudah jelas dalam aturan perundang-undangan dana tentang dana desa. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat yang melewati dana

²¹¹ Zubairi, S.Pdi Wawancara 25 April 2019

desa ini adalah pengembangan ekonomi, pengembangan ekonomi yang ada di Aeng Panas tidak ada karena lebih banyak di pembangunan desa seperti, jalan, paving, jembatan, drainase dan lainnya. Sebetulnya yang harus di genjot adalah di pemberdayaan masyarakat seperti yang sudah di himbau oleh pemerintah dalam undang-undang desa, atau paling tidak sebanding antara pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya perlu perbaikan-perbaikan untuk dapat memberikan pemberdayaan ekonomi yang baik kepada masyarakat Aeng Panas.

Menurut salah seorang masyarakat yang bernama Ali Yurdha menyatakan bahwa pembangunan yang berdasar dari dana desa banyak melakukan pembangunan fisik untuk kebutuhan desa seperti jalan raya aspal, paving bahkan jembatan, dan lainnya, namun untuk pemberdayaan masyarakat desa atau pengembangan ekonominya di Aeng Panas tidak ada sama sekali sehingga masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan lewat pengembangan ekonomi ini hanya saja Pelatihan-pelatihan tanpa praktek lapangan. Padahal di pengembangan ekonomi ini sangat berperan penting terhadap kemandirian masyarakat dan desa itu juga. Karena sifatnya jangka panjang dan berkembang.²¹²

Dari hasil wawancara dan Observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik perlu untuk ada pemerataan pembangunan, kemudian pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan ekonomi perlu juga ada tahapan-tahapan pengembangan ekonomi lebih optimal lagi

²¹² Ali Yurdha *Wawancara* 25 April 201

lebih berkembang lagi karena dengan adanya pengembangan ekonomi masyarakat akan sejahtera.

14. Efektifitas penggunaan dana desa dalam Pengembangan Ekonomi di desa Karduluk

“Dana desa adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pusat APBN, sedangkan peruntukannya lebih pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau DD tidak boleh pada oprasioanal kantor, misalnya juga DD bisa diperuntukannya pemberdayaan masyarakat seperti pinjaman modal usaha. Sedangkan Sektor ekonomi yang mengambil pada dana desa adalah foto copy sebesar 50 juta, selain itu membuat pelatihan wirausaha yang mendatangkan tenaga ahli guna memberikan skill dan menambah bidang usaha. Selebihnya memang lebih pada pembangunan desa karena sesuai dengan permintaan masyarakat sekitar.”²¹³

Oleh karena itu dalam sistem dana desa itu sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat namun yang di prioritaskan oleh pemerintah adalah pemberdayaan ekonomi. Karena dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi desa itu bisa maju dan berkembang. Dengan itu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi perlu dimaksimalkan kembali, kekurangan terhadap kinerja perlu evaluasi untuk menciptakan yang lebih baik.

Sedangkan Kemudian Menurut salah seorang masyarakat yang bernama Affan Riyadi menyatakan bahwa pembangunan yang berdasarkan dari dana desa sudah merata baik dari jalan aspal, paving , jembatan dan fasilitas kantor balai desa, akan tetapi masih ada beberapa

²¹³ Suaidi, S.Pdi *Wawancara* 28 April 2019

dusun yang butuh perhatian khusus dalam pembangunan desa.²¹⁴ Tapi secara umum sudah bagus. Disisi lain dalam pengembangan ekomominya Sudah bergerak namun masih kurang berkembang dan menjelaskan kepada msyarakat awam (Orang yang tidak tau) sehingga tidak merasakan bahkan tidak tau dengan adanya pengembangan ekonomi ini, tapi mayoritas sudah merasakanya.

Dari hasil wawancara dan Observasi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik perlu untuk ada pemerataan pembangunan , kemudian pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengambangan ekonomi perlu juga ada tahapan-tahapan pengembangan ekonomi lebih optimal lagi, sehingga msyarakat dapat merasakanya lebih baik lagi.

²¹⁴ Affan Riyadi Wawancara 28 April 2019

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang: (1) Pengelolaan penggunaan dana desa di Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep. (2) Analisis efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi.

1. Pengelolaan Penggunaan Dana Desa

Sebagaimana yang telah di paparkan pada kajian teori istilah adalah Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan dan mengelola.²¹⁵ Sedangkan menurut Thomas Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.²¹⁶

Pengelolaan dana desa Menurut Undang-undang Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.²¹⁷

Kemudian Pengertian dana desa adalah Istilah desa berasal dari bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau

²¹⁵ <https://typoonline.com/kbbi/pengelolaan>

²¹⁶ Thomas. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. 2013

²¹⁷ Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa

tanah leluhur yang merajuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merajuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.²¹⁸

Artinya Pengelolaan dana desa adalah Pengelolaan dan desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang mana akan dibahas di forum Musyawarah rencana pembangunan desa, diman seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan partisipatif dan menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa, selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun RKPDes dan APBDes dan ditetapkan dalam peraturan desa sebagai pedoman pembangunan di desa.

Dengan demikian Pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang *didesain* untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan

²¹⁸ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal..226.

mengharap akan mendapatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dalam tulisan ini penulis juga meneliti pola pemberdayaan dari dana Dana Desa. Salah satu warga yang diwawancarai berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan desa adalah Mamang Hariyanto²¹⁹ beliau adalah aktifis ekonomi syariah mengungkapkan bahwa pembangunan desa tidak selalu pembangunan fisik akan tetapi juga menyentuh pembangunan ekonomi sehingga kedepan masyarakat dapat lebih sejahtera. Pembangunan selama ini lebih fokus pada fisik tidak salah akan tetapi kedepan pembangunan yang bersifat pemberdayaan juga harus digiatkan.

Menurut Junaidi salah seorang masyarakat yang juga salah satu kepala tukang bangunan yang juga ikut bekerja membangun desa. Menurutnya pembangunan infrastruktur bisa dikurangi dengan dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pemberian modal usaha kecil kepada masyarakat serta budidaya ternak sapi bibit unggul seperti yang dilakukan diwilayah ini.²²⁰

Zulfatun Hasanah salah seorang perempuan yang multi talenta menyebutkan pemberdayaan ekonomi dari dana Alokasi Dana Desa cukup penting terutama untuk ibu rumah tangga sebagai usaha sampingan seperti usaha kios dalam menambah pendapatan keluarga.²²¹

Dalam pengelolaan dana desa masih kurang merata di berbagai tempat, hal ini peneliti turut prihatin karena ketimpangan pembangunan

²¹⁹ Wawancara dengan Mamang Hariyanto ,10 Mei 2019

²²⁰ Wawancara dengan Junaidi , 09 Mei 2019

²²¹ Wawancara Zulfatun Hasanah , 08 Mei 2019

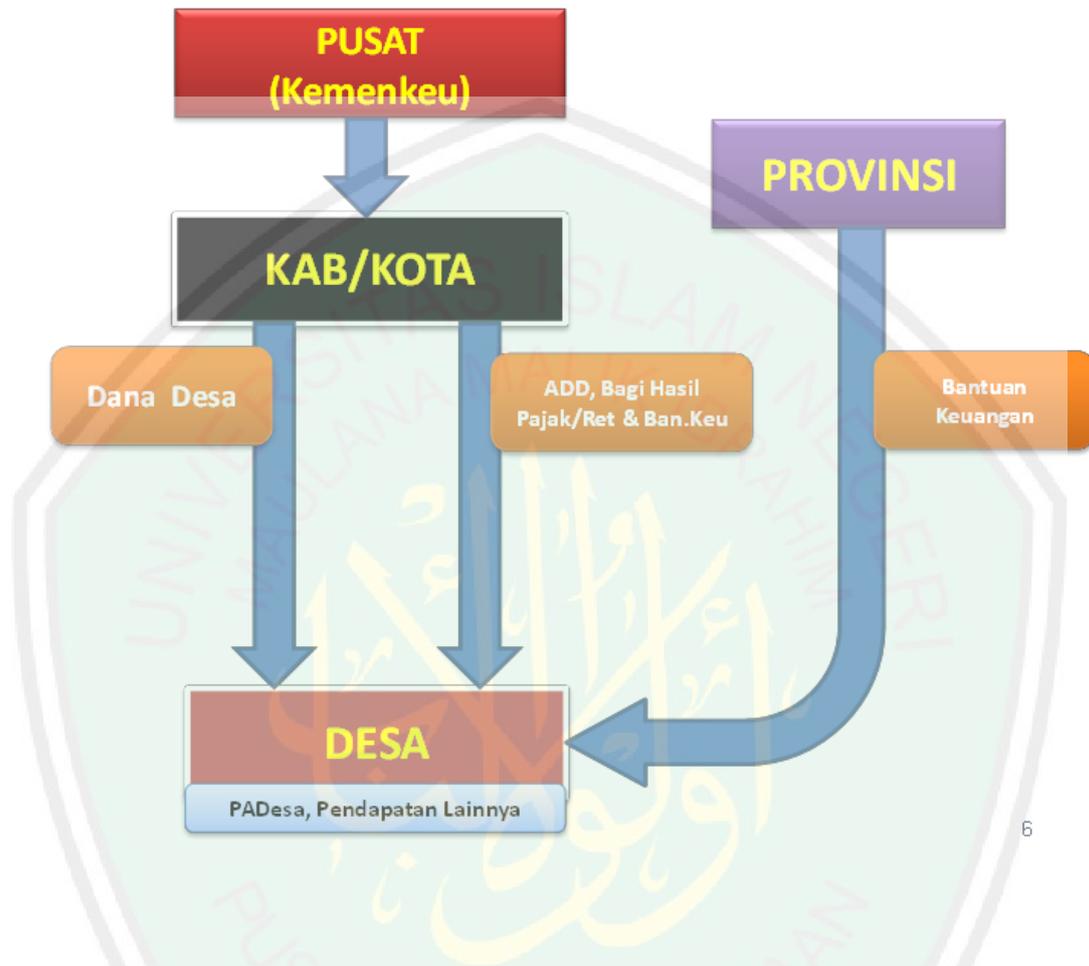
desa masih kerap terjadi di berbagai tempat, dari sektor pembangunan desa meliputi jalan yang masih ada yang tidak di aspal, kemudian, paving belum juga menyerap 100% serta jembatan penghubung dari desa yang satu ke desa yang lain tak kunjung di perhatikan secara serius, padahal ketika melihat pada anggaran dana desa untuk pembangunan cukup besar, oleh karena itu diperlukan upaya-upya untuk lebih tingkatkan kembali untuk mewujudkan kesejahteraan bersanma. Namun dalam pembangunan desa ini sudah cukup bagus ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya perlu mensinergikan kembali.

Dengan demikian Proses pengelolaan dana desa sangat sesuai sekali terhadap tujuan dana desa itu turun tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat, baik dalam pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa ini masyarakat sudah merasakan hasil kerja dana desa ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun sumber dana desa (DD) adalah dari APBN pusat yang berada di kementerian keuangan, yang turun ke desa melalui Kabupaten/Kota selanjutnya langsung ke desa. Sehingga tahapan ini sangat cepat tanap melewati provinsi setempat.

Untuk mengetahui lebih jelasnya alur pengelolaan Dana Desa di kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, dapat dilihat di bagan sebagai berikut :

Bagan: 5.1
Alur Pendapatan Desa



Ket.

Dana Desa (RKUN ke RKUD) Tahap I 40% (April) syarat : 1 Perkada tatacara Alokasi Dana Desa untuk setiap desa 2. Perda APBD/Kota. Tahap II 40% : (Agustus) Syarat Pencairan sesuai perkada yang berpedoman pada peraturan menteri (PP 43/2014) Tahap III: 20% (November) syarat RKUD ke rekening kas Desa 7 Hari setelah diterima di RKUD.

Dalam pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan Pragaan adalah :

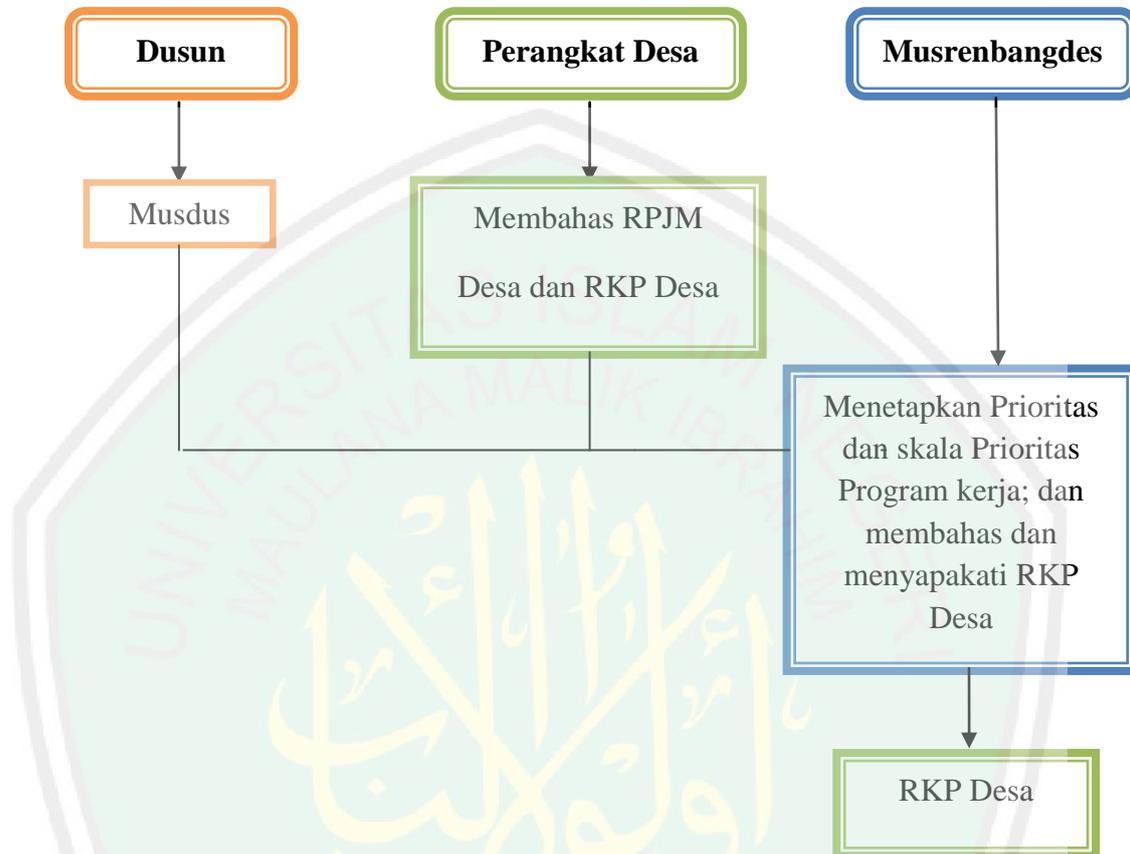
- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan

- c. Pengawasan
- d. Pertanggung jawaban atau pelaporan

Kemudian dalam tahap perencanaan dana desa yang ada di kecamatan Pragaan dimulai dari Musdus atau musyawarah dusun, jadi setiap dusun di desa yang ada di kecamatan pragaan melaksanakan musyawarah dusun atas apa yang dibutuhkan di dusun tersebut baik pembangunan desa ataupun dalam pemberdayaan masyarakat di musyawarahkan setelah itu dianggap selesai, baru desa membahas tentang RPJM (Rencana pembangunan jangka menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Sedangkan RPJM itu Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada **bulan Juni** tahun anggaran berjalan

Bagan 5.2

Tahap Perencanaan Dana Desa di 14 Desa Kecamatan Pragaan



Ket.

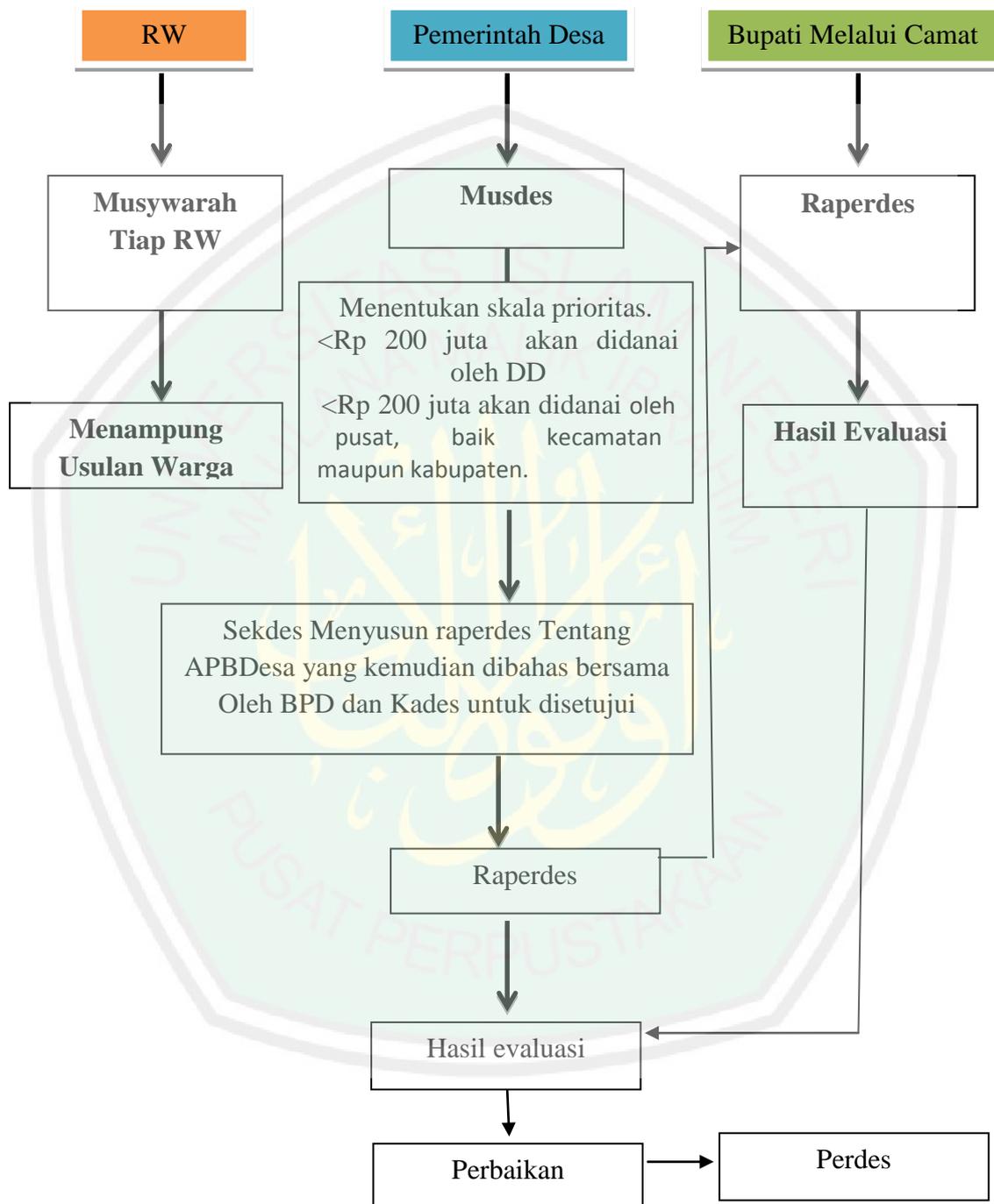
- ✓ Musdus (Musyawarah Dusun)
- ✓ RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)
- ✓ RKP (Rencana Kerja Pemerintah)

Perencanaan adalah suatu aktivitas integritas yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan terdiri dari aktivitas prakiraan, penetapan tujuan, pemrograman, penjadwalan, penganggaran, pengembangan prosidur, penetapan dan interpretasi kebijakan dioperasiakan oleh seorang manajer atau pemimpin untuk mengambil suatu keputusan dalam penetapan tujuan

Pada tahapan perencanaan pengelolaan dan desa, Pemerintah Desa di kecamatan Pragaan beranggapan bahwa penentuan prioritas anggaran merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini ditujukan untuk bisa mengantisipasi jika di kemudian hari akan terjadi kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan program-program yang telah disusun sebelumnya. Demikian pula untuk perencanaan Dana Desa (DD) Desa di Kecamatan Pragaan pada tahun anggaran 2018 ini juga telah ditentukan prioritas program yang akan terlebih dahulu dilaksanakan, yaitu program pembangunan fisik desa. Penentuan program pembangunan desa sebagai prioritas dana desa (DD) selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya juga merupakan salah satu cara Pemerintah Desa di Kecamatan Pragaan untuk menarik partisipasi warganya agar turut terlibat di dalam program-program pemerintahan sehingga ada kesinambungan antara aparat desa dan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini :

Bagan 5.3
Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di 14 Desa



Sumber: dikembangkan Oleh Peneliti dari hasil wawancara di 14 desa di kecamatan Pragaan.

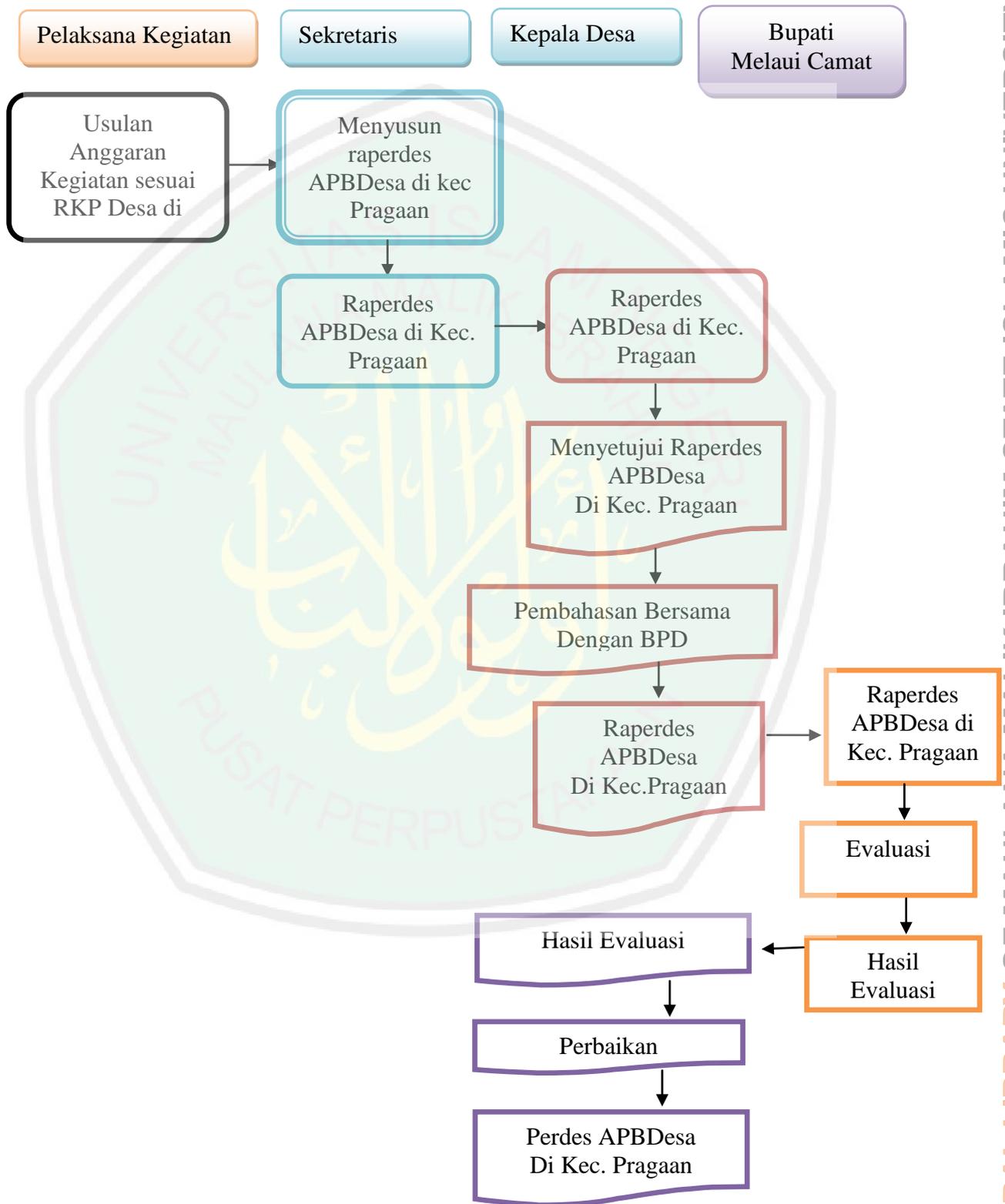
Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa di kecamatan pragaan. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Proses Penyusunan APBDesa yang ada di kecamatan Pragaan dimulai dengan urutan sebagai berikut :

1. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
2. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes (RAPBDes) dan menyampaikan kepada kepala desa.
3. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat.
5. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDes. Dalam hal ini bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan di bawah ini :

Bagan 5.4
Perencanaan Anggaran Dana Desa



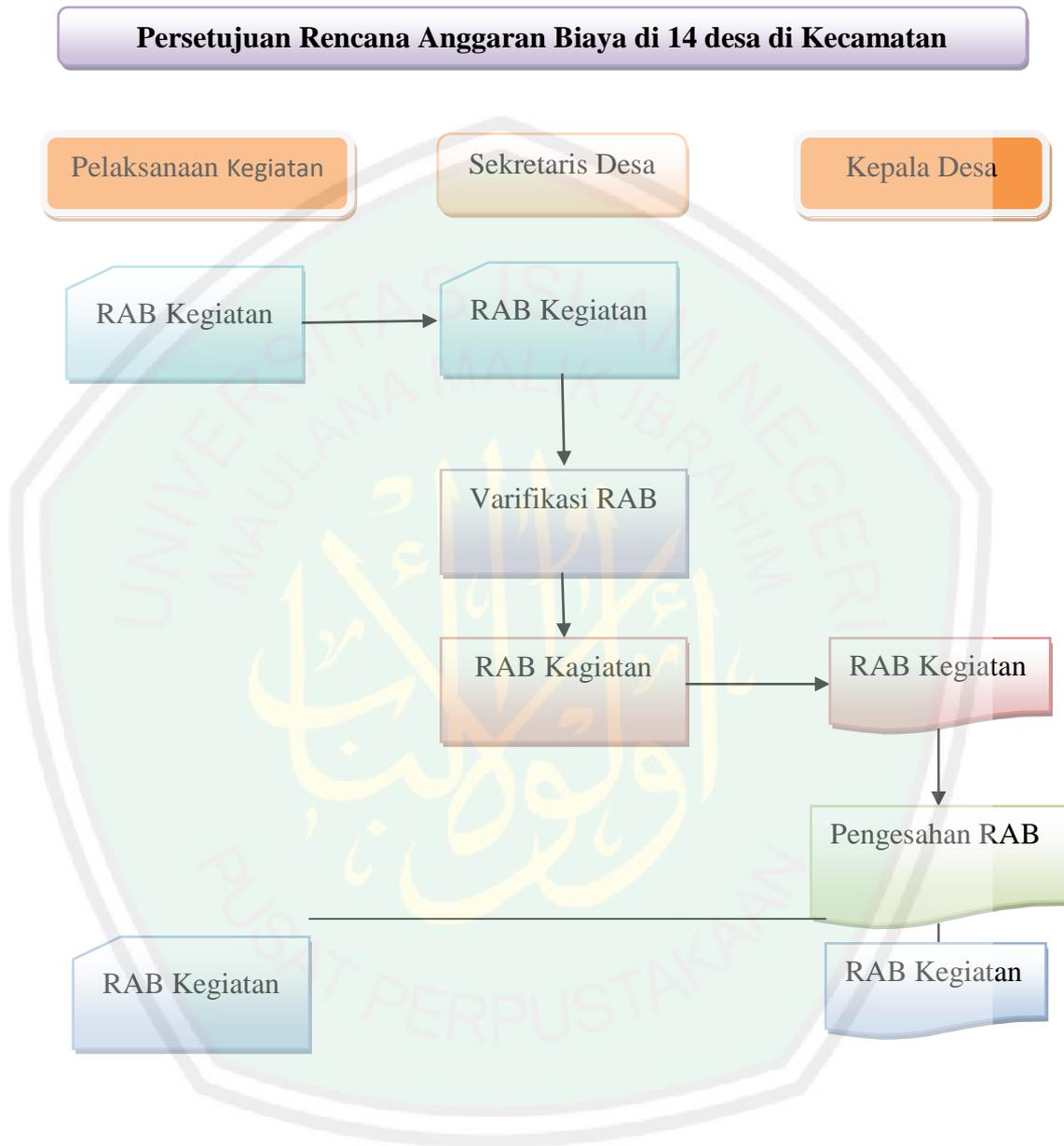
Setelah anggaran di tetapkan maka Pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan yang diperankan oleh kepala seksi yang ada di kecamatan pragaan. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan setelah APBDesa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran baiay. Rencana anggaran biaya sebelum dilaksanakan harus diverivikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

Berdasarkan RAB kegiatan yang telah disetujui oleh kepala desa, pelaksanaan kegiatan melakukan proses kegiatan sesuai Rab tersebut misalnya berupa pengadaan barang yang dilakukan melalui swakelola masyarakat dan melalui penyedia barang dana jasa. Pengadaan barang dan jasa di desa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Proses belanja di desa, terdapat kemungkinan dua cara bagi bendahara desa dalam melakukan pembayaran. Pertama, bendahara desa melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua bendahara desa melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada pelaksana kegiatan. Pilihan terdapat dua mikanisme ini disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam perturan bupati sesuai kondisi daerah msing-masing.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bagan di bawah ini :

Bagan 5.5
Alur Persetujuan Pelaksanaan Dana Desa di 14 Desa
Kecamatan Pragaan Tahun 2018



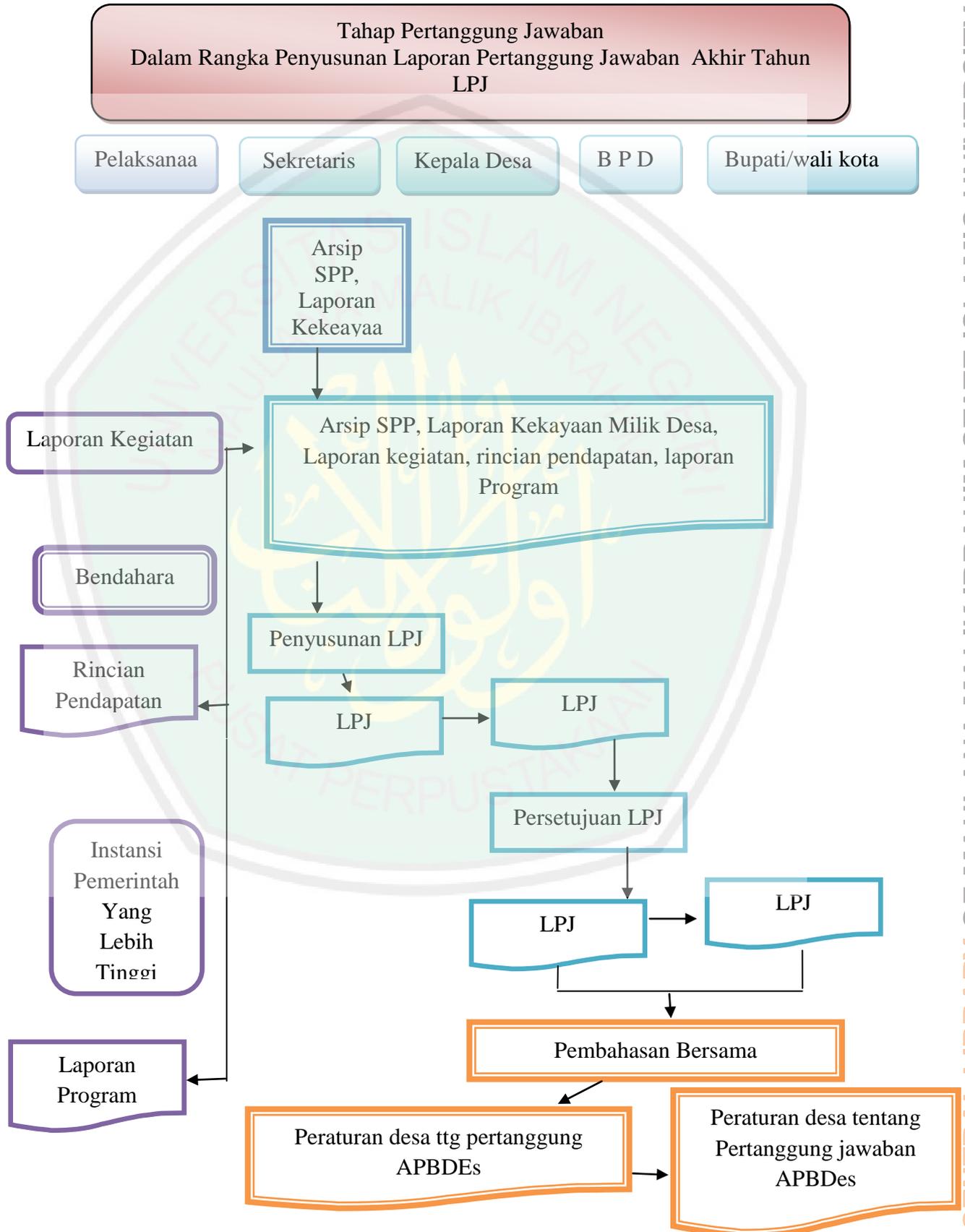
Setelah persetujuan pelaksanaan dana desa maka yang terakhir adalah Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDes yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri :

- Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan
- Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan
- Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Rancangan peraturan desa tentang pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDes. Hal ini didasarkan pada permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa pada pasal 14 di mana dinyatakan hanya 4 jenis rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui camat yaitu tentang : APBDes, Pungutan, Tata ruang, Organisasi Pemerintah desa. Penyusunan laporan pertanggung Jawaban dapat dilihat bagan di bawah ini :

Bagan 5.6
Laporan Pertanggung Jawaban dana desa di Kec.Pragaaan Tahun 2018



2. Analisis Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibatnya, pengaruh, mujaraban, keberhasilan, efektifan.²²² Efektifitas adalah sebuah kosa kata Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris *Effective*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Efektifitas berarti dapat membawahasil berhasil guna.²²³ Sedangkan dalam pengerian lain Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.²²⁴

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa efektifitas adalah program yang dijalankan berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Sedangkan Efektifitas Dana Desa adalah sebagian dari salah satu edentitas pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah dibawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.²²⁵

Oleh karena itu efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi adalah suatu keberhasilan terhadap pemberdayaan

²²² <https://typoonline.com/kbbi/efektif>

²²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia., hal 374

²²⁴ Amin Tunggal Wijaya, Manajemen suatu Pengantar, (Jakarta, Rineka Cipta Jaya, 199), hal 32

²²⁵ J. Koho Riwu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Yoyakarta: Usaha Nasional,1989) hlm. 212

masyarakat di pengembangan ekonominya, sehingga masyarakat dapat merasakan keberhasilan dana desa terhadap pengembangan ekonominya. Pengembangan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat adalah suatu bentuk untuk mensejahterakan masyarakat lewat pengembangan ekonomi. Karena salah satu keberhasilan suatu desa jika pemberdayaan masyarakat berkembang maka kesejahteraan juga dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis juga meneliti pemberdayaan masyarakat atau pengembangan ekonomi dari dana Dana Desa ini, Menurut Nurjannah yang juga merupakan salah seorang warga yang mewakili kaum perempuan menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan hal yang penting dalam rangka keberlangsungan ekonomi warga Desa Pragaan daya kecamatan pragaan Kabupaten sumenep. Ekonomi masyarakat masih dibawah rata-rata dengan berprofesi sebagai petani. Didalam satu keluarga tambah Nurjannah bisa dikembangkan sebuah unit pemberdayaan ekonomi yang memiliki kontribusi untuk keluarganya sendiri minimal seperti produksi emping melinjo yang selama ini dilakukan namun belum memiliki pola pemberdayaan yang baik.²²⁶

Adapun ukuran efektifitas dalam bukunya kebijakan kelembagaan pengawasan berpendapat bahwa efektifitas dapat diukur dari beberapa hal anatara lain :²²⁷

²²⁶ Wawancara dengan Nurjannah, 11 Mei 2019

²²⁷ Makmur. *Efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Bandung 2010 : Refika Aditama

1. Ketepatan penentuan waktu : waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan. Program pembangunan yang dilaksanakan di desa yang ada di kecamatan Praga dengan menggunakan dana desa adalah jalan rabat beton, paving, aspal dan jembatan. Kegiatan pembuatan jalan rabat beton yang panjangnya 200 meter, lebar 1,25 Cm tebal 10 Cm dijadwalkan selama 1 minggu lebih atau 12 hari kerja dengan tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat dari tiap jaga. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari dokumen, untuk pekerjaan penggantian peralatan mesin air bersih dilaksanakan selama 6 hari dan pekerjaan pembuatan jalan rabat beton dilaksanakan selama 12 hari. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan akan tetapi data tersebut tidak disertai dengan jadwal rencana kerja yang terstruktur dengan baik guna menunjang kelancaran operasional. Dalam melaksanakan program kerja tersebut pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yang merupakan pemimpin, berkoordinasi dengan perangkat desa dan BPD sebagai mitra kerja. Koordinasi antara kepala desa, BPD dan perangkat desa serta masyarakat menciptakan komunikasi dua arah dan kerjasama yang berimplikasi pada tingginya partisipasi masyarakat sehingga program pembuatan jalan rabat beton

walaupun ada kendala tetapi dapat diselesaikan. Efektifitas merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Atmosoeperto²²⁸, Produktivitas merupakan suatu ukuran mengenai apa yang diperoleh dengan apa yang diberikan. Penggunaan waktu dalam program pembangunan yaitu pembuatan jalan rabat beton yang ada di desa Bango tersebut selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perencanaan tetapi jika diamati, dengan jumlah tenaga kerja yang ada dan volume pekerjaan, seharusnya waktu yang diperlukan bisa 6 hari saja. Dengan demikian efektivitas dalam penggunaan waktu belum optimal karena tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan.

2. Ketepatan perhitungan biaya : hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal ini dana desa atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan. Indikator yang kedua dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa di desa yang ada di kecamatan Pragaan adalah ketepatan perhitungan biaya. Secara luas, pengertian biaya

²²⁸ Atmosoeperto, *Produktivitas aktualisasi budaya perusahaan*. Jakarta 2001: P.T. Alex Media Kumpotindo

mengandung unsur-unsur yaitu merupakan pengorbanan sumber ekonomi, diukur dengan satuan uang, yang telah terjadi atau yang akan terjadi, dan untuk tujuan tertentu. Anggaran Dana desa yang telah diterima desa yang ada di Kecamatan Pragaan adalah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dengan keseluruhan yang ada dalam tiap desa kurang lebih adalah senilai Rp 993.380.000 yang disalurkan dalam tiga tahap dan digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan regulasi yang telah diatur pemerintah. Ketepatan dalam perhitungan biaya dilaksanakan agar dalam menjalankan suatu kegiatan tidak mengalami kekurangan anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan. Karna jika hal tersebut terjadi maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai sehingga akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program. Dari uraian biaya diatas dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa didesa yang ada di Kecamatan Pragaan dalam proses pembangunan jalan rabat beton, paving, dan jembatan. Dapat diselesaikan tanpa mengalami kekurangan anggaran. Tapi jika diamati lebih lanjut, jumlah anggaran yang dianggarkan pada kedua program pembangunan tersebut dengan hasil pembangunan seharusnya dapat bertahan lama sebelum muncul tanda-tanda kerusakan seperti keretakan dan lubang pada badan jalan. Hal ini tentunya membuat sesuatuyang bisa dicurigai, untuk menyelesaikan

kendala yang timbul dari kurang terbukanya Pemerintah Desa kepada BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah dengan melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah desa setiap dua kali dalam satu minggu. Materi yang dibahas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, meminta nasehat, menyampaikan hasil-hasil yang dilakukan BPD khususnya hasil-hasil dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di pemerintahan Desa dengan rapat koordinasi ini diharapkan agar didalam penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak ada kesenjangan di dalamnya dan mekanisme kerja dari pemerintah desa menjadi terbuka (transparan), sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara BPD dan pemerintah desa, dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD menjadi lancar.

3. Ketepatan dalam pengukuran : hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan. Dalam hal ini, yang melakukan pengukuran panjang jalan rabat beton adalah Teknis Pelaksana Kegiatan selaku pihak yang memimpin jalannya kegiatan. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga melakukan pengukuran yang merupakan bentuk pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya

pemerintahan desa yang ada di kecamatan Pragaan. Dari hasil pengukuran oleh TPK dan BPD menggunakan alat pengukur panjang yaitu meteran, keduanya menunjukkan hasil yang sama dimana pengukuran pertama dilakukan oleh TPK, 211 meter dan pengukuran kedua oleh BPD, 211 Meter. Demikian juga dengan pengukuran kedalaman sumur air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat dikategorikan efektif karena pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda, hasilnya tetap atau tidak berubah. Sedangkan dalam Pembedayaan ekonomi alat ukurnya dengan menggunakan stabilitas ekonomi dan efisiensi tersebut. Jadi melihat hal diatas bahwa dalam konsep pengukuran untuk pembangunan tentunya dalam merumuskan pelaksanaan pembangunan harusnya perlu memikirkan tentang bagaimana perencanaan matang dapat memberi arah yang jelas pada pelaksanaan kerja yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga untuk hasil yang diharapkan daripada pekerjaan yang ada dapat memberi manfaat pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat di dalam usaha-usaha di kehidupannya.

Dari hasil penelitian tentang efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi masih kurang meratanya pemberdayaan masyarakat, Sehingga dana desa lebih kepada pembangunan fisik seperti

infrastruktur padahal pengembangan ekonomi sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu efektifitas pengembangan ekonomi akan mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, kemandirian bagi masyarakat dan berkembang luas bagi desa, oleh karena itu perlu mensinergikan kembali pemberdayaan masyarakat demi kemandirian desa sejahtera. Pengembangan ekonomi ini dapat dimulai dari yang bersifat kecil yang terpenting memanfaatkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab.

Dari hasil observasi penulis dilapangan terlihat bahwa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kecamatan Pragaan sudah dilakukan dengan sesuai harapan masyarakat.

Dari hasil penelitian tentang efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi masih kurang meratanya pemberdayaan masyarakat, Sehingga dana desa lebih kepada pembangunan fisik seperti infrastruktur padahal pengembangan ekonomi sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu efektifitas pengembangan ekonomi akan mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, kemandirian bagi masyarakat dan berkembang luas bagi desa, oleh karena itu perlu mensinergikan kembali pemberdayaan masyarakat demi kemandirian desa sejahtera. Pengembangan ekonomi ini dapat dimulai dari yang bersifat kecil yang terpenting memanfaatkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab.

Untuk mengetahui lebih jelasnya sistem pengelolaan dana desa di kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, dapat dilihat di bagan sebagai berikut :

Tabel. 5.1
Peningkatan Jumlah Dana Desa dalam Pertahun

	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Dana Desa (DD)	20.766,2 T	47.684,7 T	81.184,3 T	103.791,1 T	111.840,2 T
Rata-rata DD per Desa	280,3 Juta	643,6 Juta	1.095,7 Juta	1.400,8 Juta	1.509,5 Juta

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI

Tabel. 5.2

Dana Desa di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun 2018

No	DESA	2018		2018	
		Pembangunan	Belanja Barang dan Jasa	Pemberdayaan	Belanja Modal
01	Sendang	688.472.975	16.474.897	169.160.000	8.914.500
02	Rombasan	517.258.450	4.669.200	900.000	536.660.750
03	Sentol Laok	682.036.200	21.881.112	73.100.500	15.812.900
04	Sentol Daya	1.597.609.300	82.685.100	343.909.000	821.723.100
05	Pakamban Laok	350.640.725	6.518.350	308.324.350	225.570.225
06	Pragaan Daya	970.844.189	55.319.500	153.492.968	360.169.373

07	Preduan	278.483.075	31.442.877	353.892.999	299.287.750
08	Aeng Panas	580.206.833	14.420.000	50.975.100	222.132.650
09	Kaduarah Timur	456.588.100	3.475.000	315.420.567	271.583.500
10	Karduluk	443.606.650	16.420.000	402.770.000	346.833.800

Dengan ini dapat kita lihat bahwa penggunaan Dana Desa di desa Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Kecamatan dalam pengalokasian Dana Desa adalah lebih banyak kepada Pembangunan Desa dari pada Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa program perencanaan penggunaan Dana Desa di kecamatan Peragaan Kabupaten Sumenep adalah efektif sebab pembangunan Desa diyakini akan bisa memperbaiki perekonomian masyarakat di Desa yang infrastrukturnya lebih baik.

Esensi dari sebuah pembangunan adalah berdaya guna bagi yang menikmati pembangunan itu sendiri. Dari dasar inilah penelitian dilakukan di desa yang ada di kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep dalam rangka melihat efektifitas pembangunan desa yang besumber dari dana desa. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi lapangan, wawancara serta dokumentasi yang berlangsung di Kecamatan Pragaan.

Anggaran Dana desa (DD) yang dikucurkan oleh pemerintah Pemerintah melalui APBN kepada desa di Kecamatan Pragaan pada tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp. 993.380.000.

Anggaran Pendapatan Belanja desa di kecamatan Pragaan Tahun 2018 dari sumber dana desa (DD) Terbagi menjadi dua bidang sebagaimana berikut :

- 1) Bidang Pembangunan desa Bidang ini merupakan bidang dari Sumber Dana Desa total anggaran digunakan untuk pembangunan. Sebanyak Rp.4.073.264.795 digunakan untuk

tiga pembangunan yaitu pembangunan pagar desa, pembangunan tempat wudhu, Drinase, jembatan, Paving, Dan lain-lain.

- 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang ini dari total dana desa berjumlah Rp. 1.192.501.938 Dalam bidang ini dilakukan beberapa hal yang dalam rangka peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kewirausahaan, pengembangan ekonomi, kerajinan tangan dan lain-lain.

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang dana desa yang ada di kecamatan Pragaan, untuk Pembangunan banyak di anggarkan kurang lebih mencapai 76 % dari pada pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi produktif. Infrastruktur menjadi penting karena selama ini pembangunan masih sangat minim sehingga masyarakat lebih mengusulkan pada perencanaan anggran di Musdus (Musyawarah Dusun) yang berupa jalan, aspal, perbaikan jalan, Paving, drinase dan jembatan.

Menurut salah seorang masyarakat bernama Fauzi menyatakan bahwa pembangunan yang berdasrakan dari dana desa banyak melakukan pembangunan fisik untuk kebutuhan desa seperti pagar menasah serta jalan kampung. Disisi lain penulis juga mewawancarai Rohman warga desa pragaan daya dusun gunung putih. Masyarakat lebih menginginkan pembangunan desa karena akses perjalanan baik ekonomi akan bisa cepat dan lancar. Menurut bapak Luthfi hayat Pembangunan Desa lebih

diutamakan untuk pembangunan fisik tapi tidak menutup kemungkinan pemberdayaan masyarakat tidak ada, harus ada tandasnya.

Sebagai bahan perbandingan penulis juga mewawancarai beberapa warga di desa lain yang masih satu kecamatan. Menurut Fathorrahman pembangunan desa memang sangatlah penting dan paling penting untuk saat ini karena akses ke daerah yang lain sangatlah lambat dikarenakan infrastruktur masih tidak merata, tapi tidak menutup pemberdayaan masyarakat lewat pengembangan ekonomi juga harus di genjot guna dapat memberdayakan masyarakat lewat ekonomi.

Dari paparan beberapa warga yang telah diwawancarai mengenai Dana Desa dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang berasal dari dana desa telah dibangun beberapa bangunan yang strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa di kecamatan Pragaan Kabupaten Suemeneh. Walaupun lebih banyak bangunan fisik namun semata-mata pembangunan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penulis juga melakukan observasi secara mendalam mengenai pembangunan yang selama ini dilakukan oleh tim pelaksana Dana Desa di Desa yang ada di Kecamatan Pragaan Kabupaten Suemeneh. Seluruh bangunan yang telah dibangun ini memiliki kualitas yang baik terbukti dari keadaan bangunan yang tidak mudah rusak seperti Paving, drainase, jembatan penghubung yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat sudah sangat lama dan baru terwujud dalam tahun ini meski itu tidak merata padahal dana desa sudah ada sejak tahun 2015.

Dalam tulisan ini penulis juga meneliti pola pemberdayaan masyarakat dari Dana Desa (DD) Salah satu warga yang diwawancarai berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan desa adalah Farhan Sr mengungkapkan bahwa pembangunan desa tidak selalu pembangunan fisik akan tetapi juga menyentuh pembangunan ekonomi sehingga kedepan masyarakat dapat lebih sejahtera. Pembangunan selama ini lebih fokus pada fisik tidak salah, akan tetapi kedepan pembangunan yang bersifat pemberdayaan juga harus digiatkan.

Menurut Sufyan warga desa Kadurah timur yang juga salah satu kepala tukang bangunan yang ikut bekerja membangun desa. Menurutnya pembangunan infrastruktur bisa dikurangi dengan dilakukannya pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pemberian modal usaha kecil kepada masyarakat serta budidaya ternak sapi, bibit unggul seperti yang dilakukan diwilayah lain.

Dari hasil wawancara dan penelitian di atas dapat dipahami bahwa pembangunan fisik memang diperlukan akan tetapi diharapkan juga berimbang dengan pembangunan ekonomi yang bersifat pemberdayaan. Hal ini perlu berimbang sehingga pembangunan manusia juga dapat berimbang antara pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi menjadi penting dalam rentang waktu jangka panjang sehingga setiap kepala Keluarga memiliki taraf ekonomi yang mapan

BAB VI

PENUTP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan analisis data hasil penelitian, maka ada 2 kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Pengelolaan penggunaan Dana Desa adalah kegiatan yang *didesain* untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan akan mendapatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
2. Analisis efektifitas penggunaan dana desa dalam Pengembangan Ekonomi adalah suatu keberhasilan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi, sehingga masyarakat dapat merasakan keberhasilan perencanaan pengelolaan dana desa terhadap pengembangan ekonomi desa; Pengembangan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian diatas, maka penelitian ini ditujukan kepada :

1. Dana Desa seharusnya dapat digunakan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak semata-mata untuk pembangunan fisik

saja. Banyak potensi yang bisa digarap di Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep, khususnya 14 Desa tersebut.

2. Masyarakat dapat selalu menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan secara bersama, sehingga akan bisa terus dinikmati dalam waktu yang lama.
3. Memprioritaskan untuk pengembangan ekonominya seperti pertanian,berwirausaha, karena dapat memberikan pintu kesejahteraan dan kemandirian.



DAFTAR PUSTAKA

- Asra, Abuzar dkk, 2014. *Metode Penelitian Survei*, Bogor: InMedia.
- Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Cet 7*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Deliarnov, 2009. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Emzir, 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Fuad, Anis. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Firdausi, M Aziz. 2012. *Metodologi Penelitian*, Tangerang: Jelajah Nusa.
- Huda, Nurul dkk. 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Jonge, Huub De. 1989. *Seri Terjemah MADURA dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan, Ekonomi, dan Islam*, Jakarta:PT. Gramedia.
- Kasiram, 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN-Malang Press.
- Maryaeni, 2012. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet 33*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Numan, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purhantara,Wahyu. 2010.*Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Padangaran, Ayub M. 2011.*Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, Kendari : Unhalu Press.
- Pradja, Juhaya S. 2015. *Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Riwu, J. Koho. 1989. *Ilmu Sosial Dasar*, Yoyakarta: Usaha Nasional.

- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Saibani. A. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Media Pustaka.
- Sholeh, Chabib, Heru Rochansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUSMEDIA.
- Sholahuddin, M. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Supriadi, Deddy. dan Dadang Sholihin. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. Sumpeno,
- Sedarmayanti. (2009). *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Vredembregt, J. 1984. *Metode dan Tehnik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Wijaya, Amin Tunggal. 199. *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta, Rineka Cipta Jaya.
- Wiyata, A. Latief. 2002. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* Yogyakarta: LKIS.
- Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana.
- BPKP. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. 1-55 (2015).
- Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Nonlaba*. Jakarta: Mitra Wacana Media 2013.
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika aditama.
- Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Nonlaba*. Jakarta: Mitra Wacana Media 2013.
- M. Lee. Policy And Rule Configutation : Korean Rural Develoment Movement

Saemaul Undong. Bloomington, Indiana : Indiana University 1990.

Desertasi

Dikutip M. Miftahul Ulum, Pendidikan Islam dan Realitas Sosial (Studi Atas Kurikulum Pendidikan Islam MAN Model di Propinsi Jawa Timur), Desertasi Doktoral, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Jurnal

Rudi Hasan, Penyelenggaraan Program SD-SMP Satu Atap dalam Latar Budaya Rumah Betang Kalimantan Tengah, Jurnal Ilmu Pendidikan Jidil 19, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 02.

Chandra Kusuma Putra dkk (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik vol. 1 No 6.

Ardila,Novi.Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Mensanak Kecamatan Senayan KabupatenLingga.*JurnalNaskahPublik,1-14.*
http://jurnal.umrah.ac.id/wpontent/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a096d0947c6478e525e/2015/09/JURNAL-NOVI.pdf.Diakses pada 25 April 2019.

Web

Badan Pusat Statistik. 2013 Jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin di indonesia badan pusat statitik
https://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1/.

Buku 1 Masterplan Smart City Kabupaten Sumenep.

Dokumentasi Gambar ADD Kecamatan Pragaan, di ambil pada Tanggal 07 Maret 2019.

Dokumentasi Balai Desa sendang, 29/04/2019, Pkl : 10:45:15 WIB di Kantor.

Dokumentasi Kasi DD dan ADD di Kecamatan Pragaan di ambil pada tanggal 07 Maret 2019.

Data Dokumen Desa Sentol laok diambil di Balai Desa Sentol laok, 30/04/2019, Pkl 14: 05 WIB.

Dokumen Balai Desa Sentol Daya, 20/04/2019, Pkl 12 : 32 WIB.

Data Geografis Desa diambil di balai Desa Pakamaban Daya, 20/04/2019, Pkl. 12:15 WIB.

Data Dokumen Desa diambil di Desa Pakamban Loak,20/04/2019. Pkl, 12: 00 WIB.

Data Dokumen Desa Pakamban daya, 20/04/2019, Pkl 11: 35 WIB.

Data Geografi Desa Pakamban Laok diambil di Balai Desa Pakamban alok, 15/04/2019, Pkl: 14:59 WIB.

Data Desa diambil di Balai Desa Pakamban Laok, 15/04/2019, Pkl: 15:05 WIB.

Data Desa diambil di balai Desa Pakamban Laok, 15/04/2019, Pkl 15:15 WIB.

Data Desa Pakamban Laok diambil di Balai Desa Pakamban Laok,15/04/2019, Pkl: 15:26 WIB.

Data UMKM Desa Pakamban Daya, diambil di Balai Desa Pakamban Daya,15/04/2019, Pkl: 15: 40 WIB.

Dokumen Desa Pragaan Laok diambil, 30/04/2019, Pkl, 16:40 WIB.

Dokumen Desa Pragaan Daya diambil di Balai Desa, 08/05/2019, 08:15 WIB.

Dokumen Desa Prenduan di ambil di Balai Desa, 14,/04/2019, Pkl 13:20 WIB.

Data Desa Karduluk, 28/04/2019, Pkl 17:15 WIB di ambil di Balai Desa.

Dokumen Desa Prenduan di ambil di Kantor Balai Desa, 14/04/2019, Pkl 13:40 WIB.

Dokumentasi Desa Aeng Panas diambil di Kantor Balai Desa, 5/04/2019, Pkl 11:25 WIB.

Dokumentasi data Desa Larangan Perreng diambil di rumahnya sekdes,21/04/2019, Pkl 12:50:31 WIB.

Dokumentasi Desa larangan Perreng, 21/04/2019, Pkl, 13:20 WIB.

Dokumentasi Desa Kaduarah Timur, 26/04/2019, Pkl, 08:39:06 WIB.

Data Desa Kaduarah Timur, 26/04/2019, Pkl 09:07 WIB.

<https://jatim.bps.go.id/> diakses 25 Maret 2019.

<https://jatim.bps.go.id/> Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS).

Luluhatta, “*Pengembangan Masyarakat*” Online ada pada laman <https://luluhatta.wordpress.com/2014/10/13/pengembangan-masyarakat-community-development/> yang diakses pada 20 Mei 2019.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Pasal 5.

Pertumbuhan Ekonomi Tak Merata, Pengamat: Akibat Ketimpangan Infrastruktur diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/05/07/mny3e7-pertumbuhan-ekonomi-tak-merata-pengamat-akibat-ketimpangan-infrastruktur> pada tanggal 27 Maret 2019, pukul 14.30 WIB.

Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Kemendesa. *Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa <http://www.djpk.depkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/03/03.-> diakses pada 07 April 2019

Rosnawati, “*Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kab. Way Kanan Dalam Perspektif Islam*”, Skripsi Program Strata 1 IAIN, Lampung, 2015.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Wawancara Darussalam Selaku Bapak Camat Kecamatan Pragaan (Tanggal 14 Maret 2019) Pukul 9:45 WIB.

Wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang Isma'iel Jumat 29/04/2019 Pkl : 09:25:30 WIB, di kantor Balai Desa Sendang.

Wawancara dengan Sekretaris Desa 21/04/2019, Pkl, 13:21 WIB di Kediaman Sekdes Rombasan.

Wawancara dengan Sekdes Desa Pakamban Laok, 20/04/2019, Pkl. 12: 10 WIB.

Wawancara dengan Sekdes Pakamban Daya di Balai Desa Pakamban Daya, 20/04/2019, Pkl 11: 45 Wib.

Wawancara dengan Kepala Desa Pakamban Daya, 20/04/2019, Pkl. 11:20 WIB.

Wawancara dengan Sekretaris Desa Pakamban Laok, 15/04/2019, Pkl 14:30 WIB.

Wawancara dengan Sekretaris Desa Pragaan Laok, 30/04/2019, Pkl: 16:34:35 WIB.

Wawancara dengan Sekretaris Desa Pragaan daya dirumahnya, 07/05/2019, Pkl 19:30 WIB.

Wawancara dengan Sekdes Karduluk di Rumahnya, 28/04/2019, Pkl 17:00 WIB.



Lampiran-Lampiran



DOKUMENTASI Desa Sendang



Pembangunan Jalan Rabat Beton dusun Sendang Timur



Budidaya Ikan Lele Oleh aparat desa dan Masyarakat sekitar dalam pengembangan Ekonomi



Pembangunan Jembatan Desa Dusun Sedang Timur



Penjaringan Lele Oleh Masyarakat



Pembangunan drainase dusun sendang Timur



Hasil Penjaringan lele di kumpulkan di pilah, setelah itu di kembangkan dan dijual

DOKUMENTASI Desa Rombasan



Penggunaan Vacum Friying Oleh aparat desa dan bersama Poktan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lewat produk unggulan



Pelatihan percepatan akses keuangan kepada Petani Buah naga di desa Rombasan



Proses Pengolahan Produk Unggulan Kripik pedas



Pengembangan Buah Naga oleh Pemateri dengan masyarakat



Finishing Pembuatan Facum frying oleh Masyarakat



Proses Pengembangan Buah Naga Menjadi Roti Bauh naga

DOKUMENTASI Desa Sentol Laok



Pembuatan Benduangan air di tinjau langsung oleh Tim pendamping dari Kecamatan



Pelatihan Produk unggulan Kripik pedas oleh tim pendamping dan masyarakat sentol laok



Pembuatan Kamar mandi dan water close umum oleh aparat desa untuk rakyat sentol laok



Pemberian Susu dari kasi pengembangan ekonomi kepada masyarakat lansia



Tim pendamping dan TNI Mengontrol langsung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa Sentol Laok



Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat oleh DPMD Kabupaten

DOKUMENTASI
Desa Sentol Daya



Jalan yang masih belum ada pemaguan



Jembatan Yang masih belum di bangun dengan dana DD



Proses Pembuatan Rabat Beton jalan



Proses Pembuatan Jembatan Jl P. Samhari di desa sentol daya



Proses pengaspalan oleh Aparat desa dengan Kas Dana desa



Finishing Pembangunan Jembatan desa di jalan pak samhari

DOKUMENTASI
Desa Pakamban Laok



Pengadaan Pakan Lele dan Alat Lainnya



Pembuatan Awal Abon Lele



Penyerahan Bantuan Pakan Lele dan Alat lainnya



Setelah di pilah dan di racik, Abon siap di goreng



Salah satu lele yang di kembangkan Oleh Masyarakat



Abon Lele sudah Jadi, dan di bungkus dalam Kemasan



Proses Pembuatan Nagget Rajungan dari bahan Lele Lokal



Praktik Pengembangan Kerajinan dari Batok kelapa Lokal



Peserta Memperhatikan Cara Pembuatan Nagget Rajungan dari Lele



Peserta Praktik Pengembangan Krajinan Batok Kelapa Lokal



Hasil Pembuatan Nagget Rajungan dari bahan Lele Lokal



Hasil Pengembangan Kerajinan Batok Kelapa Lokal

DOKUMENTASI
Desa Pra



**DOKUMENTASI
Desa Pragaan Laok**



Sebelum Pembangunan Paving dusun Aeng Mornangkah



Setelah Pembangunan Paving Dusun Aeng Mornangkah



Sebelum Pembangunan Palengsengan Jalan Dusun Maronggi Daya



Setelah Pembangunan Palengsengan Jalan Dusun Maronggi Daya

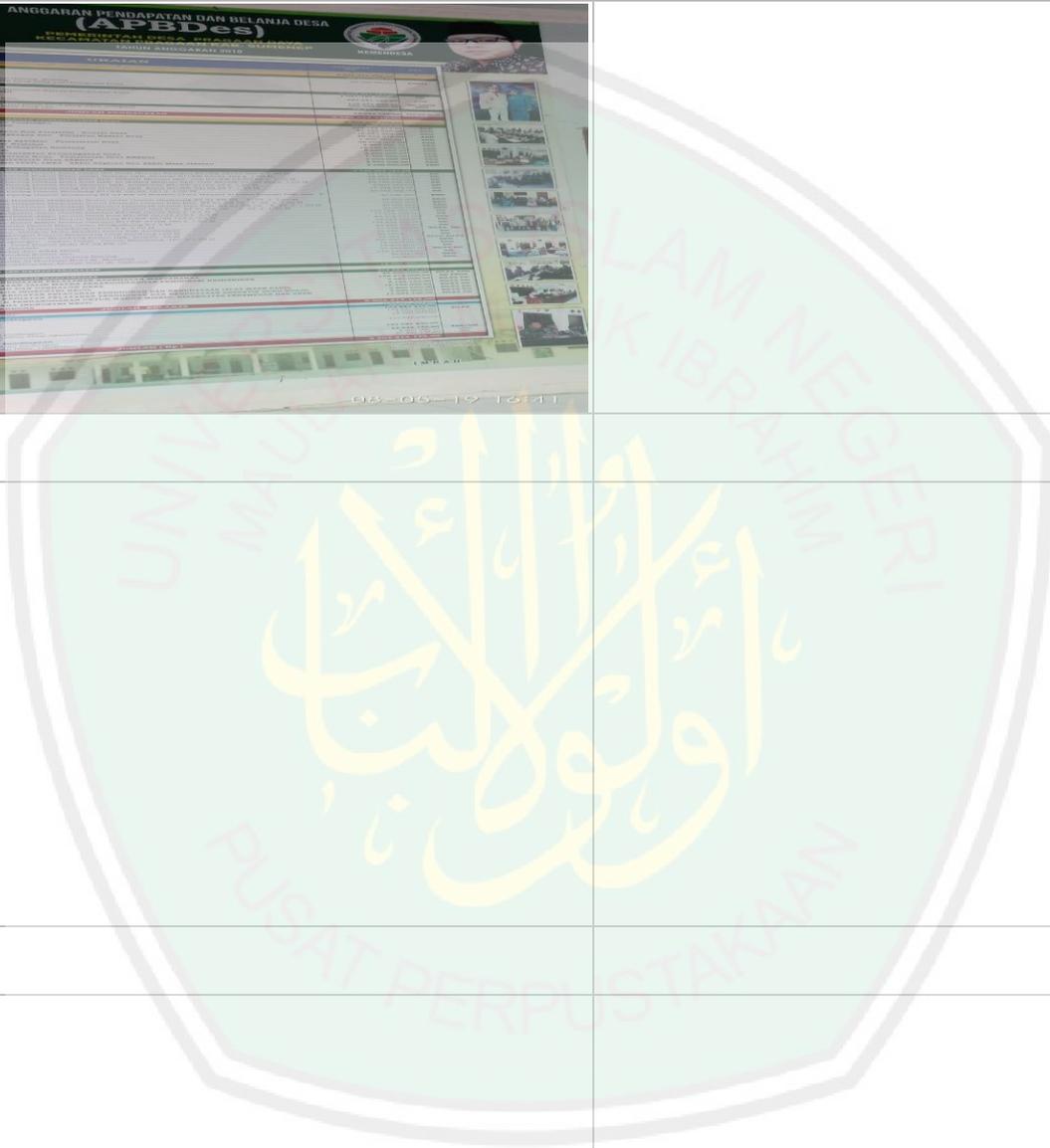


Sebelum ada Palengsengan jalan, Maronggi Laok



Setelah Ada Palengsengan Jalan, Maronggi Laok

DOKUMENTASI
Desa Pragaan Daya



DOKUMENTASI Desa Prnduan



Pembangunan jalan Paving Rumah Pak Singo
Prenduan



Pelatihan Tata Rias Manten oleh Anggota PKK dan
Masyarakat By. Inez



Proses Pembuatan Jalan Paving di Rumah Pak Singo



Proses Tatarias Manten By. Inez di bantu oleh
Peserta



Tanda Selesai dengan Prasasti Pembuatan jalan
Paving



Hasil tata rias By. Inez Beserta Masyarakat
Prenduan

DOKUMENTASI Desa Aeng Panas



Pembangunan Palengsengan di Dusun Ceccek,
Desa Aeng Panas



Syukuran Masyarakat Aeng Panas dengan acara
Rokat Tase' karena sebagian besar masyarakat
adalah nelayan



Pembangunan jalan di dusun Brungbung Desa Aeng
Panas



Masyarakat beserta Aparat desa dan Kecamatan
dalam rangka Rokat Tase'



Pembangunan Jembatan Desa di Dusun Pesisir
Desa Aeng Panas



Penutupan Acara Rokat Tase' dengan pemberian
bantuan pengembangan ekonomi nelayan oleh
kepala desa

DOKUMENTASI
Desa Larangan Perreng



Pemberian Bantuan Sembako Oleh Kepala Desa dan Aparat Desa



Masyarakat dari Kaum laki-laki tampak berada di depan Aparat Desa



Masyarakat dari kaum perempuan yang muda dan yang tua juga sama-sama hadir



Sembako sudah siap di berikan untuk Anak Yatim

DOKUMENTASI
Desa Kaduarah Timur



Pemberian Makanan Tambahan Oleh kepala desa Ke Balita, Anak Yatim dan Lansia



Tampak kepala desa di tengah-tengah lansia dalam pemberian Makanan tambahan (Susu) Lansia



Pembangunan jalan Paving H. Amir Dsusun Gunung desa Kadurah Timur



Pembangunan desa dengan Pengadan Pipa PVC saluran Air Bersih Dusun Panggulan



Penerangan Jalan Umum Dusun Pesisir Timur



Penerangan Dermaga Layanan Dusun Pesisir

DOKUMENTASI Desa Karduluk



Usaha Fotocopy yang di modalkan oleh desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat



Pelatihan Pembuatan Kursi sofa dalam pengembangan ekonomi masyarakat



Pembuatan Jalan Paving ke Plosok Desa



Pemateri mempragakan cara pembuatan kursi sofa



Hasil dari pembuaatan jalan paving ke plosok desa



Masyarakat mencoba mencontoh dari pemateri

**DOKUMENTASI
PENULIS DENGAN INFORMAN**



Foto Penulis dengan bapak Kasi DD dan ADD bapak Bambang di kantor kecamatan se usai Wawancara



Foto Penulis dengan kasi pengembangan ekonomi di kantor kecamatan se usai wawancara



Foto Penulis dengan kepala Sekretaris desa Sentol Daya seusai wawancara

5	11.12.01.07	Inserif RT/RW	3.400.000	ADD
6	11.12.01.08	Peringatan Hari Besar Nasional	4.428.850	ADD
7	11.12.01.09	Peringatan Hari Jadi Sumenep	1.063.500	ADD
8	11.12.01.10	Musyawarah Rencana Pembangunan Desa	2.694.500	ADD
9	11.12.01.13	Musyawarah Desa Rencana Kerja/Pemerintah Desa (RKP/Des)	3.354.500	ADD
9	11.12.01.13	Penyenggaraan Musyawarah Desa APBDes	3.100.500	ADD
10	11.12.01.14	Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ Akhir Anggaran Dan Akhir Masa Jabatan	1.790.700	ADD
	11.12.02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	524.530.200	DD/ADD
1	11.12.02.34	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun RW 02 (List Za)	42.322.400	DD
2	11.12.02.34	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun RW 02 (Bambang Sulaksana)	20.941.900	DD
3	11.12.02.34	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Paving Dusun RW 02 (Sakduki)	30.069.600	DD
4	11.12.02.18	Pekerjaan Pemasangan Tembok Embung Dusun L...	314.356.200	DD
5	11.12.02.16	Pengadaan, Pembangunan dan Peng...	103.600	ADD
6	11.12.02.34	Pembangunan dan Pemeliharaan Lembangan RT 02, RW 01	500	DD
	11.12.03	Bidang Pembinaan Masyarakat	10	ADD
2	11.12.03.06	Sosialisasi, Pencegahan dan		ADD
3	11.12.03.03	Belanja Barang untuk Orgz		ADD
4	11.12.03.07	Melestarikan dan Mengembang...	500	ADD
	11.12.04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	6.400	DD
1	11.12.04.01	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan K...	2.500	DD
2	11.12.04.02	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan P...	3.500	DD
3	11.12.04.02	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan P...	400.700	DD
5	11.12.04.02	Pelatihan Produk Unggulan Desa	72.700	DD
	11.12.05	Bidang Tak Terduga	91.856	DD
1	11.12.05.01	Penyediaan Layanan Informasi Tert...		DD
	6	PEMBIAYAAN	773.161.894	DD
	6.1	Penerimaan Pembiayaan	31.838.306	DD
1	6.1.1	SILPA	31.838.306	DD
	6.2	Pengeluaran Pembiayaan	205.000.000	DD/ADD
2	6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000	ADD
2	6.2.2	Penyediaan Modal Desa	200.000.000	DD

Foto Penulis dengan Sekretaris desa Sentol Laok Seusai wawancara



Foto Penulis dengan Sekretaris desa Larangan Perreng foto ini sesuai wawancara